SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. bahwa setelah dilakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat data yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, sehingga terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan, nomenklatur keuangan daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Khusus terkait dengan penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku ketentuan:

a. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan diberlakukan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025;
b. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan dari penyusunan dokumen penganggaran daerah tahun anggaran 2025;
c. Untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan mulai dari tahun 2027 sehingga penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang disajikan pada tahun anggaran 2026 tetap dapat disandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024.

KELIMA : Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambahkan dalam database klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Sosial;
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
24. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
25. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
26. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
30. Menteri Pemuda dan Olahraga;
31. Gubernur Seluruh Indonesia;
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
33. Bupati dan WalikotaSeluruh Indonesia;
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
35. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

I. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara

berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi:

a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b. fungsi;
c. organisasi;
d. sumber pendanaan;
e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan kode "XX". Kode "XX" yang terdapat pada angka I huruf B dan C terkait urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat kode "XX" dan "XXXX" dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
    1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
        a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
        b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
        c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
        d) urusan pilihan;
        e) unsur pendukung urusan pemerintahan;
        f) unsur penunjang urusan pemerintahan;
        g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;
        h) unsur kewilayahan;
        i) unsur pemerintahan umum; dan
        j) unsur kekhususan dan keistimewaan.

2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:
   a) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kode "XX";
   b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
      (1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan kode angka 1 (satu);
      (2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar diberikan kode angka 2 (dua); dan
      (3) urusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).
   c) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan kode angka 4 (empat);
   d) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan kode angka 5 (lima);
   e) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan kode angka 6 (enam);
   f) unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);
   g) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8 (delapan); dan
   h) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan kode angka 9 (sembilan).
3) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
   a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
   b) urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
   c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
   d) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;

e) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
f) urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
g) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
h) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
i) urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
j) urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
k) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
l) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
m) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
n) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
o) urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
p) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;
q) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
r) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
s) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;

t) urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
u) urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
v) urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
w) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
x) urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
y) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
z) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
aa) urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
ab) urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
ac) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
ad) urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
ae) urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
af) urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.

4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
a) unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
b) unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.

5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
b) unsur keuangan dengan kode 5.02;

c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode 5.05;
f) unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5.06; dan
g) unsur penghubung dengan kode 5.07.

6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
   a) provinsi yang terdiri atas:
      (1) kecamatan dengan kode 7.01;
      (2) kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
      (3) kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
   b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
9) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan yaitu Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01.
10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Penterjemahan urusan pemerintahan menjadi nomenklatur program dan kegiatan untuk memastikan bahwa daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.
11) Klasifikasi dan kodefikasi program disusun berdasarkan pembagian sub urusan dan kegiatan disusun berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk memastikan ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mendukung pelaksanaan asas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

12) Klasifikasi dan kodefikasi sub kegiatan disusun berdasarkan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
b) program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

(1) kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
(2) kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
(3) kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota; dan
(4) sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

Informasi penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat khusus pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a) Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada provinsi berkenaan dengan kode 3.XX;
b) Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada provinsi berkenaan dengan kode 4.XX;
c) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode 5.XX;
d) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kode 6.XX;
e) Pemerintah Aceh dengan kode 7.XX; dan
f) Pemerintah Provinsi Bali dengan kode 8.XX.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam Tabel angka I huruf B dan C.

Pada Kodefikasi Sub Kegiatan, ditambahkan Metadata Sub Kegiatan. Metadata Sub Kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub kegiatan. Atribut informasi yang ditambahkan pada Metadata Sub Kegiatan terdiri atas kinerja, indikator dan satuan. Definisi dari kinerja, indikator dan satuan sebagai berikut:

a) Kinerja adalah hasil yang berupa keluaran (sub output) dari pelaksanaan sub kegiatan.
b) Indikator adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan sub kegiatan.
c) Satuan adalah dasar ukuran dari indikator.

Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan Metadata Sub Kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian yaitu perpindahan ke sub kegiatan lainnya, atau tidak

digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Sub kegiatan tanpa Metadata Sub Kegiatan masih tetap berlaku.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam angka I huruf B dan C.

b. Fungsi

Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan bendahara umum negara.

Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dan diselaraskan menurut fungsi dan sub fungsi terhadap urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program sebagaimana berikut:

1) Penyajian kodefikasi Fungsi, meliputi:
   a) pelayanan umum dengan kode 01;
   b) ketertiban dan keamanan dengan kode 03;
   c) ekonomi dengan kode 04;
   d) perlindungan lingkungan hidup dengan kode 05;
   e) perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 06;

f) kesehatan dengan kode 07;
g) pariwisata dengan kode 08;
h) pendidikan dengan kode 10; dan
i) perlindungan sosial dengan kode 11.

2) Penyajian sub Fungsi dari fungsi yang diuraikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi anggaran di pemerintah pusat yang disajikan dengan kode xx.01 hingga xx.90.

3) Penyajian kodefikasi urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program dan kegiatan disusun berdasarkan penyajian pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam angka I huruf B dan C dimulai dari kode x.xx.01, 1.01.02 dan seterusnya hingga kode 9.01.02 dan seterusnya.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi, urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi dilakukan sebagai dampak pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam I huruf B dan C.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi untuk provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam angka I huruf D dan E.

c. Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar penamaan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perumpunan dalam organisasi. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan organisasi dan tingkatan organisasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja/unit pelaksana teknis daerah antara lain Biro di Sekretariat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai, Kelurahan, dan sejenisnya berdasarkan kondisi pada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan *(mapping)* atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:
    a) Urusan pemerintahan, meliputi:
        (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
        (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
        (3) urusan pemerintahan pilihan.
    b) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
    c) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
    d) Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
    e) Unsur kewilayahan;
    f) Unsur pemerintahan umum; dan
    g) Unsur kekhususan dan Keistimewaan.
2) Kodefikasi Organisasi meliputi:
    a) Urusan pemerintahan daerah

        Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan

urusan pemerintahan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama terdiri atas:
   (a) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 1;
   (b) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 2;
   (c) menunjukkan kode urusan pemerintahan pilihan dengan angka 3;
   (d) menunjukkan kode unsur pendukung pemerintahan daerah dengan angka 4;
   (e) menunjukkan kode unsur penunjang pemerintahan daerah dengan angka 5;
   (f) menunjukkan kode unsur pengawasan pemerintahan daerah dengan angka 6;
   (g) menunjukkan kode unsur kewilayahan dengan angka 7;
   (h) menunjukkan kode unsur pemerintahan umum dengan angka 8; dan
   (i) menunjukkan kode unsur kekhususan dan keistimewaan dengan angka 9.

(2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan daerah.

(3) Pengelompokkan digit pertama dan kedua ke dalam kolom perumpunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyajian kode |x.xx|x.xx|x.xx|.

(4) Digit ketiga merupakan urutan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|01.

(5) Digit keempat merupakan urutan nomenklatur unit kerja/unit pelaksana teknis daerah/kelurahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|xx.0001.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   (a) pendidikan dengan kode 1-1;
   (b) kesehatan dengan kode 1-2;
   (c) pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;
   (d) perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;
   (e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1-5; dan
   (f) sosial dengan kode 1-6.

(2) Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   (a) tenaga kerja dengan kode 2-7;
   (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;
   (c) pangan dengan kode 2-9;
   (d) pertanahan dengan kode 2-10;

(e) lingkungan hidup dengan kode 2-11;
(f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;
(g) pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;
(h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;
(i) perhubungan dengan kode 2-15;
(j) komunikasi dan informatika dengan kode 2-16;
(k) koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
(l) penanaman modal dengan kode 2-18;
(m) kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-19;
(n) statistik dengan kode 2-20;
(o) persandian dengan kode 2-21;
(p) kebudayaan dengan kode 2-22;
(q) perpustakaan dengan kode 2-23; dan
(r) kearsipan 2-24.

(3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
(a) kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;
(b) pariwisata dengan kode 3-26;
(c) pertanian dengan kode 3-27;
(d) kehutanan dengan kode 3-28;
(e) energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
(f) perdagangan dengan kode 3-30;
(g) perindustrian dengan kode 3-31; dan
(h) transmigrasi dengan kode 3-32.

b) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung

merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung urusan pemerintahan; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan

(2) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang urusan pemerintahan; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;
(2) keuangan dengan kode 5-2;
(3) kepegawaian dengan kode 5-3;
(4) pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
(5) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
(6) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6; dan
(7) pengelolaan penghubung dengan kode 5-7.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;
(2) keuangan dengan kode 5-2;
(3) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan kode 5-3;
(4) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5; dan
(5) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6.

d) Unsur Pengawasan

Kode Organisasi berdasarkan unsur Pengawasan digunakan oleh unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah

disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 6, menunjukkan kode unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan kode 6-1.

e) Unsur Kewilayahan

Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 7, menunjukkan kode unsur kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan

(2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan dengan kode 7-1.

f) Unsur Pemerintahan Umum

Kode Organisasi berdasarkan unsur pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan

oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 8, menunjukkan kode unsur pemerintahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

g) Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Unsur kekhususan dan keistimewaan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur kekhususan dan keistimewaan terdiri dari:

(1) Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan **);

(2) Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan ***);

(3) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);

(4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai yang berlaku Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *****); dan

(5) Pemerintah Aceh yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai keistimewaan Aceh menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ******).

Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang kebudayaan	

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkait-an dengan pelayan an dasar	bidang pendidi kan	wajib yang tidak berkait-an dengan pelayan-an dasar	bidang kebuday aan	wajib yang tidak berkait-an dengan pelayan-an dasar	bidang kepemu-daan dan olahraga

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi dilakukan terhadap pemindahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, sebagai berikut:

Semula:

NO	URUSAN/UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	05		Sekretariat MRP Provinsi Papua**
		4-2	0-0	0-0	06		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat**

Menjadi:

NO	URUSAN/UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
9-2	Majelis Rakyat Papua	9-2	0-0	0-0	01		Sekretariat MRP Provinsi Papua**
9-3	Majelis Rakyat Papua Barat	9-3	0-0	0-0	01		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat**

d. Sumber Pendanaan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan ditujukan untuk memberikan informasi atas sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dari setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dijabarkan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana meliputi pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1) Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana umum tersebut disajikan mulai dari kelompok, jenis, hingga objek pendapatan daerah. Penggunaan Sumber Pendanaan bersifat pilihan dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penyajian Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 1.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 1.x.x.x.

2) Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana khusus bersifat baku dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 2.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 2.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 2.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 2.x.x.x.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan dilakukan sebagai dampak antara lain perubahan kebijakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan disajikan dalam angka I huruf H.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang disajikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Neraca;
2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening disusun berdasarkan urutan akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Neraca

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun aset, kewajiban, dan

ekuitas yang ditujukan untuk digunakan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah. Penyusunan neraca ditujukan untuk menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca, terdiri atas:

a) Aset dengan kode 1;
b) Kewajiban dengan kode 2; dan
c) Ekuitas dengan kode 3.

sebagai berikut:

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan LRA disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang ditujukan untuk digunakan dalam penyusunan anggaran dan LRA. Penyusunan anggaran ditujukan untuk menyusun rencana keuangan tahunan daerah. Penyusunan LRA ditujukan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

a) Pendapatan dengan kode 4;
b) Belanja dengan kode 5; dan
c) Pembiayaan dengan kode 6.

sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional (LO)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan-LO dan beban yang ditujukan untuk digunakan dalam LO. Penyusunan LO ditujukan untuk menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening-LO, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan

b) Beban dengan kode 8.

sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dengan kode 7

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban dengan kode 8

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder njau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian dalam neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

a) LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
b) LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
c) LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
d) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah disajikan dalam angka I huruf I, J dan K.

4. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dilakukan terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur:

a. Perencanaan Pembangunan;
b. Sumber Pendanaan; dan
c. Rekening.

Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan meliputi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disajikan pada level sub kegiatan.

Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sumber pendanaan meliputi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sumber dana umum dan sumber dana khusus yang disajikan pada level objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening meliputi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur akun aset, kewajiban, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang disajikan pada level sub rincian objek.

Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur memperhatikan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, koreksi atas kesalahan pengetikan, serta perubahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan. Selain itu, penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur memperhatikan periode waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan diberlakukan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025.
b. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan dari penyusunan dokumen penganggaran daerah tahun anggaran 2025.

c. Untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah penonaktifan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan mulai dari tahun 2027 sehingga penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang disajikan pada tahun anggaran 2026 tetap dapat disandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024.

d. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Rekening sebagai berikut:

1) Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tema Pengaturan sebagai berikut:

a) Penonaktifan atas pemutakhiran Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1,15.5/20741/Keuda Tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.

b) Penonaktifan atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TKD berdasarkan:

(1) Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda Tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;

(2) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ Tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.

2) Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening berdasarkan Perubahan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.

   Tema penonaktifan sebagai berikut:

   a) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya yang semula diklasifikasikan pada objek menjadi diklasifikasikan pada rincian objek dalam objek Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai.
   b) Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang semula diklasifikasikan pada jenis Belanja Pegawai menjadi diklasifikasikan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
   c) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk DBH, DAU, DAK yang semula diklasifikasikan pada rincian objek sebagai bagian dari objek Dana Perimbangan menjadi diklasifikasikan pada objek DBH, DAU, DAK.
   d) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Insentif Fiskal yang semula diklasifikasikan pada satu sub rincian objek insentif fiscal menjadi diklasifikasikan pada dua sub rincian objek yakni insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X					URUSAN X.XX			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara
X	XX	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen
X	XX	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
X	XX	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja
X	XX	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
X	XX	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
X	XX	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen
X	XX	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			
X	XX	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan
X	XX	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
X	XX	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.15	0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Orang
X	XX	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			
X	XX	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
X	XX	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	0056	Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku Perbukuan Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Profesi	Jumlah Pelaku Perbukuan Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Terlaksananya Konten Digital untuk Pendidikan yang dikembangkan	Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan Infrastruktur TIK	Tersedianya Infrastruktur TIK	Jumlah Paket Infrastruktur TIK yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.03	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	1.03	0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	3.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik BagiSatuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga
1	01	02	3.04		Pengelolaan Akademi Komunitas			
1	01	02	3.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
1	01	02	3.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/ Akademi Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang
1	01	02	3.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/ Akademi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Serba GunaAkademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi kenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.04	0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan danAkademi Komunitas	Jumlah Akademi KomunitasDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan	Pendidikan
1	01	02	3.04	0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	3.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	Satuan Pendidikan Akademi Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket
1	01	02	3.04	0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Tersusunnya Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun	Dokumen
1	01	02	3.04	0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas	Tersedianya Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas	Jumlah Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas yang tersedia	Dokumen
1	01	02	3.04	0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Izin Akademi Komunitas yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.04	0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Orang
1	01	02	3.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	3.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Digital
1	01	02	3.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga
1	01	02	3.05		Peningkatan Mutu Akademi Komunitas			
1	01	02	3.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	3.05	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	3.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
1	01	02	3.06		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP			
1	01	02	3.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa
1	01	02	3.07		Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan			
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.08		Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan			
1	01	02	3.08	0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	4.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik BagiSatuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang
1	01	02	4.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga
1	01	02	4.04		Pengelolaan Akademi Komunitas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
1	01	02	4.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/Akademi Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/ Akademi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Serba GunaAkademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit
1	01	02	4.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang
1	01	02	4.04	0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi kenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.04	0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan danAkademi Komunitas	Jumlah Akademi KomunitasDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan	Pendidikan
1	01	02	4.04	0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	4.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik
1	01	02	4.04	0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	Satuan Pendidikan Akademi Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket
1	01	02	4.04	0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Tersusunnya Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas	Tersedianya Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas	Jumlah Data Penelusuran tamatan (*Tracer Study*) Akademi Komunitas yang tersedia	Dokumen
1	01	02	4.04	0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Izin Akademi Komunitas yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Akademi Komunitas yangDiselenggarakan oleh Masyarakat yang diterbitkan	Dokumen
1	01	02	4.04	0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.04	0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Orang
1	01	02	4.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	4.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Digital

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.04	0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05		Peningkatan Mutu Akademi Komunitas			
1	01	02	4.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	4.05	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
1	01	02	4.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	4.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
1	01	02	4.06		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP			
1	01	02	4.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa
1	01	02	4.07		Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08		Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan			
1	01	02	4.08	0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	3.02		Penetapan Kurikulum Muatan Pendidikan Khusus			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.02	0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	03	4.02		Penetapan Kurikulum Muatan Pendidikan Khusus			
1	01	03	4.02	0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
1	01	04	3.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
1	01	04	3.01	0003	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.01	0004	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia	Orang
1	01	04	3.02		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua			
1	01	04	3.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	3.02	0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.02	0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
1	01	04	3.02	0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Laporan
1	01	04	3.02	0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua	Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Yang Diterima Pindah	Orang
1	01	04	3.02	0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat Yang Dilakukan Pemindahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.03		Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
1	01	04	3.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Keamanan	Orang
1	01	04	4.02		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua Barat			
1	01	04	4.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	4.02	0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.02	0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
1	01	04	4.02	0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Laporan
1	01	04	4.02	0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat	Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat Yang Diterima Pindah	Orang
1	01	04	4.02	0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua	Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Yang Dilakukan Pemindahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.03		Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
1	01	04	4.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus
1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	Bahasa
1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Peserta Didik
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0012	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had Aly	Sekolah Sekolah Tinggi/Ma'had Aly yang Berdiri	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had Aly yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	0013	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had Aly	Sekolah Tinggi/Ma'had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	0014	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0017	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0018	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Ditetapkannya Standar Pendidikan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan	Dokumen
1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.01	0003	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh	Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	08	7.01	0004	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.03	0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen
1	01	08	7.03	0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.04	0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.05	0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine* dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine* dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center* yang Dilakukan Pengembangan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center* yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Terbangunnya Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintenance Center* yang dibangun	Unit
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan *Surveilans* Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan *Surveilans* Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan *Surveilans* Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya dan Terkelolanya *Public Safety Center* (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
1	02	02	1.02	0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit
1	02	02	3.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Tersedinya Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Tersedia	Unit
1	02	02	3.01	0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Kabupaten/ Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	3.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/ Fasyankes
1	02	02	3.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit
1	02	02	3.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	4.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun	Unit
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	4.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/ Fasyankes
1	02	02	4.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen
1	02	02	4.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen
1	02	02	4.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0058	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	3.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	3.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang
1	02	03	3.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang
1	02	03	3.02	0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia	Orang
1	02	03	3.02	0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang
1	02	03	3.02	0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit
1	02	03	3.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen
1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua Terintegrasi dengan Program JKN			
1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang
1	02	03	3.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya di Daerah Terpencil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	3.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi Tenaga Kesehatan, Khususnya di Daerah Terpencil dan/atau Rawan Konflik			
1	02	03	3.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.06		Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
1	02	03	3.06	0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang
1	02	03	3.07		Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
1	02	03	3.07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang
1	02	03	3.08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP			
1	02	03	3.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	4.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	4.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang
1	02	03	4.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang
1	02	03	4.02	0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.02	0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang
1	02	03	4.02	0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit
1	02	03	4.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit
1	02	03	4.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua Terintegrasi dengan Program JKN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat JaminanKesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang
1	02	03	4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya di Daerah Terpencil			
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi Tenaga Kesehatan, Khususnya di Daerah Terpencil dan/atau Rawan Konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	03	4.06		Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
1	02	03	4.06	0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang
1	02	03	4.07		Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang
1	02	03	4.08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP			
1	02	03	4.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen
1	02	05	3.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	3.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	dokumen
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	dokumen
1	02	07			PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN			
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta			
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Unit
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit
1	02	07	4.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta			
1	02	07	4.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Unit
1	02	07	4.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan PengukuranIndikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit
1	02	07	4.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Terbangunnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Terehabilitasinya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0031	Rehabilitasi *Check* Dam	Terehabilitasinya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	1.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Beroperasi dan Terpeliharanya Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	SITU
1	03	02	1.01	0068	Revitalisasi Situ	Terlaksananya Revitalisasi Situ	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	SITU

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0069	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Penampung Air Alami
1	03	02	1.01	0070	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	Terlaksananya Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Penampung Air Alami
1	03	02	1.01	0071	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0074	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0076	Peningkatan *Breakwater*	Meningkatnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0077	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	1.01	0080	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0081	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0083	Peningkatan Bangunan Sabo	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0084	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0085	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan *Breakwater*	Terbangunnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan *Check* Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0091	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0093	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Beroperasi dan Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0100	Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meningkatnya *Seawall* dan Terbangunanya Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan *Check* Dam	Terbangunnya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	02	1.01	0104	Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Meningkatnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	1.01	0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0112	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Beroperasi dan Terpeliharanya Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	Danau
1	03	02	1.01	0113	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Beroperasi dan Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0114	Peningkatan *Check* Dam	Meningkatnya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0115	Rehabilitasi *Breakwater*	Terehabilitasinya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga
1	03	02	1.02	0031	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.02	0033	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga
1	03	02	1.02	0035	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0036	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Daerah Irigasi yang mendapatkan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	DI
1	03	02	1.02	0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Kawasan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	DI
1	03	02	3.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	3.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi	Dokumen
1	03	02	4.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	4.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi	Dokumen
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/ Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen
1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/ Kota
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
1	03	04	1.01	0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten/ Kota
1	03	04	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA	Meningkatnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/ Kota
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang
1	03	04	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Unit
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/ Kota
1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/ kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0006	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0008	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0013	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0014	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0015	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0016	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0017	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0018	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan	Unit
1	03	07	1.01	0021	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0023	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	07	1.01	0025	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPA di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik
1	03	07	1.01	0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	unit
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Unit
1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	SR
1	03	07	1.01	0032	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0034	Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0035	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPST di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0036	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah SPA di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0037	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02		Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pemberian Bantuan untuk Pembangunan Layak Huni dan Kawasan Permukiman Layak Terutama bagi OAP			
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	07	3.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersedianya dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02		Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pemberian Bantuan untuk Pembangunan Layak Huni dan Kawasan Permukiman Layak Terutama bagi OAP			
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	07	4.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Jumlah dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhun Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Terselenggaranya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/ Kota
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	0021	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang
1	03	08	6.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	6.01	0009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	kabupaten/ kota
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan
1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	10	1.01	0029	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Jembatan
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM
1	03	10	1.01	0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terbangunnya Terowongan/Tunnel	Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	Terowongan/ Tunnel
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan
1	03	10	1.01	0037	Pembangunan Underpass	Terbangunnya Underpass	Jumlah Underpass yang Dibangun	Underpass
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
1	03	10	1.01	0039	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	Flyover
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	11	3.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi	Orang
1	03	11	4.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	4.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi	Orang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi
1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi	Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.01	0008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	Dokumen
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	1.02	0007	Penyusunan RTRW Provinsi	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.02	0010	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Berita Acara
1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/KotaÂ	Dokumen
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	1.04	0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.04	0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	1.04	0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	3.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksanana Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.02	0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara
1	03	12	3.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progress dan tindak lanjut dari Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	3.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	3.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	3.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	3.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	3.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	3.05		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen
1	03	12	3.06		Pengawasan Penataan Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	3.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	3.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	4.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	4.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksanana Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.02	0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara
1	03	12	4.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progress dan tindak lanjut dari Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	4.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan
1	03	12	4.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	4.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	4.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	4.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	4.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	4.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	4.05		Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
1	03	12	4.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen
1	03	12	4.06		Pengawasan Penataan Ruang			
1	03	12	4.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	4.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	4.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	6.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	6.03	0003	Pengelolaan Kawasan Khusus	Tersedianya Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Dokumen
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0008	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL Pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen
1	03	13	5.02	0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermowates	Dokumen
1	03	13	5.02	0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen
1	03	13	5.02	0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen
1	03	13	5.02	0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	orang
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan
1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi
1	04	03	1.01	0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.01	0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Kelompok Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Hektar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	1.02	0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	Hektar
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi
1	04	05	1.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Dokumen
1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Unit
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	1.02	0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit
1	05	02	1.02	0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.02	0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen
1	05	02	1.02	0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan
1	05	02	1.02	0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan
1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan
1	05	02	1.03	0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
1	05	02	1.03	0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
1	05	02	1.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.03	0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan
1	05	02	3.05		Pembentukan Satgas Daerah di Wilayah Provinsi			
1	05	02	3.05	0001	Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	3.05	0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	3.05	0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	3.05	0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	4.05		Pembentukan Satgas Daerah di Wilayah Provinsi			
1	05	02	4.05	0001	Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	4.05	0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	4.05	0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	4.05	0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan
1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan
1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Dokumen
1	05	02	7.04	0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang
1	05	03	1.03	0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
1	05	03	1.03	0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen
1	05	03	1.04	0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan
1	05	03	1.04	0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang
1	05	03	1.04	0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen
1	05	03	1.04	0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	kabupaten/ kota
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang
1	05	04	1.01	0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Dokumen
1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	1.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Terlaksananya pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	laporan
1	05	04	1.01	0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	1.01	0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	laporan
1	05	04	1.01	0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Kabupaten/ Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1	05	04	1.02	0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Terlaksananya pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga
1	06	02	3.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	06	02	3.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan	Dokumen
1	06	02	3.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	3.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	3.02	0006	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang
1	06	02	3.02	0007	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga
1	06	02	3.02	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbinban Teknis	Orang
1	06	02	3.03		Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
1	06	02	3.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Menetapkan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Ditetapkan	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	3.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT			
1	06	02	3.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen
1	06	02	3.05		Pembinaan dan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota			
1	06	02	3.05	0001	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Penaggulangan Kemiskinan	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Standar	Layanan
1	06	02	4.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan	Dokumen
1	06	02	4.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	4.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga
1	06	02	4.02	0006	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang
1	06	02	4.02	0007	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.02	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbinban Teknis	Orang
1	06	02	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT			
1	06	02	4.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen
1	06	02	4.05		Pembinaan dan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota			
1	06	02	4.05	0001	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Penaggulangan Kemiskinan	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Standar	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang
1	06	03	3.06		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			
1	06	03	3.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03	4.06		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			
1	06	03	4.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlsntar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen
1	06	04	3.06		Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota			
1	06	04	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga
1	06	04	3.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	3.07		Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.			
1	06	04	3.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang
1	06	04	3.08		Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	3.08	0001	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Lembaga
1	06	04	3.09		Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.			
1	06	04	3.09	0001	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Kab/Kota
1	06	04	4.06		Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga
1	06	04	4.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang
1	06	04	4.07		Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.			
1	06	04	4.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	3.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			
1	06	05	3.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	3.04		Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	06	05	3.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	3.05		Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat			
1	06	05	3.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	3.06		Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.			
1	06	05	3.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen
1	06	05	4.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			
1	06	05	4.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	4.04		Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	4.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	4.05		Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat			
1	06	05	4.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen
1	06	05	4.06		Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	4.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	3.02		Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat ditingkat Provinsi			
1	06	06	3.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Penanganan Bencana	Orang
1	06	06	3.02	0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	3.03		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi			
1	06	06	3.03	0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	06	4.02		Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat ditingkat Provinsi			
1	06	06	4.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Penanganan Bencana	Orang
1	06	06	4.02	0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang
1	06	06	4.03		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	4.03	0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit
2	07	03	1.01	0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen
2	07	03	3.03		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	3.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK
2	07	03	4.03		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2	07	03	4.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang
2	07	04	1.04	0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang
2	07	04	3.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	3.01	0005	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	3.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang
2	07	04	3.01	0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang
2	07	04	3.01	0008	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen
2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG bagi perangkat daerah, desa, lembaga masyarakat, profesi, dunia usaha, dan media Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang
2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi dalam pemenuhan standar layanan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lembaga
2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Orang
2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Unit
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	03	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	04	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	04	1.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	04	1.02	0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	1.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan layanan komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	perangkat daerah
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terbangunnya kerjasama antar Lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan
2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	Orang
2	08	07	1.01	0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	Kegiatan
2	08	07	1.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang
2	08	07	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Layanan
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.03	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan
2	08	07	1.03	0005	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.03	0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit
2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan
2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan
2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan
2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
2	09	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	3.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	3.01	0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Tersedianya kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	03	3.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	3.02	0003	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	Terlaksananya Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	Kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	3.02	0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	Tersedianya Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	03	3.02	0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Tersususunnya kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Disusun	Dokumen
2	09	03	3.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	3.03	0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	Tersedianya kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	03	4.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	4.01	0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Tersedianya kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	03	4.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	4.02	0003	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	Terlaksananya Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	Kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	03	4.02	0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	Tersedianya Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	4.02	0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Tersususunnya kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Disusun	Dokumen
2	09	03	4.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
2	09	03	4.03	0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	Tersedianya kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	09	04	1.02	0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	3.02		Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	3.02	0001	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	09	05	4.02		Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	05	4.02	0001	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan
2	10	03	3.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	3.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua			
2	10	03	3.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	4.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	4.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua Barat			
2	10	03	4.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	7.02		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.03		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.03	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	04	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	04	1.01	0004	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	05	1.01	0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	1.01	0005	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara
2	10	06	1.01	0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan
2	10	06	1.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara
2	10	06	1.01	0006	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	1.01	0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen
2	10	07	3.02		Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	07	3.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	3.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.02	0003	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	3.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan dan Tanah serta Sumber Daya Alam yang Terkandung di dalamnya			
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	3.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	3.05		Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	3.06		Pengembalian Status Tanah Ulayat atau Tanah Masyarakat Hukum Adat apabila Jangka Waktu Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan Telah Berakhir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.06	0001	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen
2	10	07	3.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan			
2	10	07	3.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen
2	10	07	3.08		Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat Menyediakan dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Tanah-Tanah Adat yang digunakan untuk Keperluan Umum			
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.09		Penyelesaian Tanah Adat dalam Kawasan Hutan dan Bekas Tanah Hak Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Berita Acara
2	10	07	3.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Adat Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.10	0002	Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.11		Inventarisasi dan Identifikasi, Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran Tanah Adat/Ulayat di Provinsi			
2	10	07	3.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua	Data ttanah adat/ulayat di Provinsi Papua Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan
2	10	07	3.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	07	4.02		Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	07	4.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara
2	10	07	4.02	0003	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	4.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan Tanah serta Sumber Daya Alam yang Terkandung di dalamnya			
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	4.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	4.05		Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.06		Pengembalian Status Tanah Ulayat atau Tanah Masyarakat Hukum Adat apabila Jangka Waktu Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan Telah Berakhir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.06	0003	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen
2	10	07	4.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan			
2	10	07	4.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen
2	10	07	4.08		Kerjasama dengan Pemerintah Pusat Menyediakan dan Penyelesaian Masalah yang terkait Tanah-Tanah Adat yang digunakan untuk Keperluan Umum			
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.09		Penyelesaian Tanah Adat dalam Kawasan Hutan dan Bekas Tanah Hak Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	4.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	4.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Berita Acara
2	10	07	4.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat dan tanag kosong lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	4.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.11		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provinsi			
2	10	07	4.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat	Data tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan
2	10	07	4.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	08	1.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan
2	10	08	1.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananyan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen
2	10	08	1.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	10	10	1.01	0003	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	1.01	0004	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Dokumen
2	10	10	1.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Provinsi (Konsolidasi Tanah skala besar)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerinta Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	1.01	0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Dokumen
2	10	10	3.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	3.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	4.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	4.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia	Dokumen
2	10	10	7.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	7.01	0004	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	7.02	0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	0003	Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen penanganan permasalahan hukum pertanahan	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah - Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat			
2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Terlaksananya Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	13	7.01	0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen
2	10	13	7.01	0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi			
2	10	14	7.01	0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di wilayah Pesisir	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15	7.01	0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0003	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0005	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu dan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0003	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	17	7.01	0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan
2	10	17	7.01	0003	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	17	7.01	0004	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen
2	11	02	1.01	0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Dokumen
2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	11	02	1.01	0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	1.02	0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen
2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen
2	11	02	1.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen
2	11	02	3.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2	11	02	3.01	0003	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	3.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2	11	02	3.02	0001	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen
2	11	02	3.03		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	3.03	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	02	4.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2	11	02	4.01	0003	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	4.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2	11	02	4.02	0001	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen
2	11	02	4.03		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	4.03	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	1.01	0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	1.01	0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	1.01	0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	laporan
2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.01	0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen
2	11	03	1.01	0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen
2	11	03	1.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.03	0007	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0008	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha
2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.03	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan
2	11	03	1.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha
2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0013	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha
2	11	03	3.04		Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota			
2	11	03	3.04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	4.04		Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota			
2	11	03	4.04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Laporan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
2	11	04	1.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit
2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	3.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	3.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	3.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	04	4.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	4.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	4.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen
2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	1.01	0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang
2	11	06	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	11	06	3.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	06	3.02		Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	3.02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	11	06	3.02	0002	Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Jumlah laporan Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Laporan
2	11	06	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	4.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	06	4.02		Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	4.02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	1.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	1.01	0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara
2	11	10	1.01	0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	11	1.01	0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen
2	11	11	1.01	0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Dokumen
2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Sampah Pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen
2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	3.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	3.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	02	3.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	4.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	4.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	02	4.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen
2	12	03	1.01	0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen
2	12	03	1.01	0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	3.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
2	12	03	3.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	03	3.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	4.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
2	12	03	4.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	03	4.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	1.01	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.01	0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen
2	12	04	1.02	0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen
2	12	04	1.02	0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang
2	12	04	3.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	3.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	3.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	4.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	4.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	04	4.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan			
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen
2	12	05	3.01		Penyediaan Profil Kependudukan			
2	12	05	3.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	05	3.02		Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi			
2	12	05	3.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas
2	12	05	4.01		Penyediaan Profil Kependudukan			
2	12	05	4.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	05	4.02		Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi			
2	12	05	4.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			
2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	02	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Unit
2	13	02	3.02		Penataan Desa Adat			
2	13	02	3.02	0001	Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen
2	13	02	4.02		Penataan Desa Adat			
2	13	02	4.02	0005	Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	03	3.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	3.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	3.01	0005	Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	03	4.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	4.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	03	4.01	0005	Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen
2	13	04	1.01	0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	04	1.01	0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Desa
2	13	04	1.01	0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan
2	13	04	1.01	0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	3.01	0023	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	04	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	4.01	0023	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	3.01	0013	Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05	3.01	0014	Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0015	Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Instansi
2	13	05	3.01	0016	Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	3.01	0017	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0018	Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	05	3.01	0019	Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Laporan
2	13	05	4.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0013	Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05	4.01	0014	Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	05	4.01	0015	Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Instansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0016	Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	4.01	0017	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	05	4.01	0018	Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0019	Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Laporan
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			
2	13	06	3.01		Pengembangan Data/Informasi			
2	13	06	3.01	0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Orang
2	13	06	3.01	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Dokumen
2	13	06	3.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.02	0001	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan
2	13	06	3.02	0002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	06	3.02	0003	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Dokumen
2	13	06	3.03		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung			
2	13	06	3.03	0001	Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	06	3.04		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.04	0001	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan
2	13	06	3.05		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
2	13	06	3.05	0001	Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Terlaksananya Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan
2	13	06	3.06		Pemberdayaan Orang Asli Papua di wilayah adat			
2	13	06	3.06	0001	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.01		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	07	4.01	0001	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung	Terbangunnya Sanggar PKK di Kampung	Jumlah Sanggar PKK di Kampung	Unit
2	13	07	4.01	0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Orang
2	13	07	4.02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung			
2	13	07	4.02	0001	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Laporan
2	13	07	4.02	0002	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan
2	13	07	4.03		Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung			
2	13	07	4.03	0001	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.03	0002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Orang
2	13	07	4.03	0003	Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan
2	13	07	4.03	0004	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenagan Kampung Adat	Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Orang
2	13	07	4.04		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung			
2	13	07	4.04	0001	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.04	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Orang
2	13	07	4.04	0003	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Orang
2	13	07	4.04	0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi	Unit
2	13	07	4.04	0005	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Tersedianya Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Jumlah Orang yang memperoleh Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Orang
2	13	07	4.04	0006	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Unit
2	13	07	4.04	0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.04	0008	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya Pembangunan dan Tersedianya Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Jumlah Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung yang Terbangun dan Tersedia	Unit
2	13	07	4.05		Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD			
2	13	07	4.05	0001	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Dokumen
2	13	07	4.05	0002	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Jumlah Dokumen Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen
2	13	07	4.06		Pengembangan Ekonomi Kampung			
2	13	07	4.06	0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.06	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Orang
2	13	07	4.06	0003	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Terselenggaranya Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Orang
2	13	07	4.06	0004	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Unit
2	13	07	4.07		Pemberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	07	4.07	0001	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Dokumen
2	13	07	4.08		Pengembangan Data/Informasi			
2	13	07	4.08	0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.08	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK	Terlaksananya Pengolahan, Penginputan danPublikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputandan Publikasi Data DPMK	Dokumen
2	13	08			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA			
2	13	08	3.01		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua			
2	13	08	3.01	0001	Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan	Unit
2	13	08	3.01	0003	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0004	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0005	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.01	0007	FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Terlaksananya FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Dokumen
2	13	08	3.01	0008	Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0009	Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Orang dari Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang mengikuti Bimtek dan Supervisi	Orang
2	13	08	3.01	0010	Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Dokumen
2	13	08	3.01	0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	Orang
2	13	08	3.01	0012	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Terlaksananya Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Dokumen
2	13	08	3.02		Pemberdayaan Orang Asli Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.02	0001	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0002	Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0003	Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0004	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.02	0005	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Dokumen
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan
2	14	02	1.01	0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen
2	14	02	1.01	0005	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0006	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Dokumen
2	14	02	1.01	0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0009	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	14	02	1.01	0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	14	02	1.01	0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang Efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi	Kabupaten/Kota
2	14	02	1.01	0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	tersedianya fasilitasi penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Kab/Kota
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.02	0001	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.02	0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen
2	14	02	1.02	0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.02	0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.02	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Organiasasi
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen
2	14	02	3.03		Penyelarasan Kebijakan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua			
2	14	02	3.03	0001	Penyusunan Kebijakan Kependudukan OAP	Tersusunnya Kebijakan Kependudukan OAP	Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	1.01	0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan
2	14	03	1.01	0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	1.01	0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	1.02	0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KeMasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen
2	14	03	1.02	0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.02	0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	1.01	0001	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0002	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Terlaksananya Pengembangan Unit Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Unit
2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi
2	14	04	1.01	0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Jumlah Dokumen Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Dokumen
2	14	04	1.01	0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Tersedianya Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga
2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen
2	14	04	1.01	0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Terlaksananya Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok
2	14	04	1.01	0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok
2	14	04	1.01	0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0023	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Daerah
2	14	04	1.01	0024	Penyediaan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	1.01	0025	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.02	0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dokumen
2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan
2	14	04	1.02	0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota
2	14	04	1.02	0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi
2	14	04	3.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	3.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	3.01	0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Laporan
2	14	04	4.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	4.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	kelompok
2	14	04	4.01	0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Laporan
2	14	04	4.01	0018	Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
2	15	02	1.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Unit
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Unit
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit
2	15	02	1.05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan
2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	02	1.06	0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
2	15	02	1.07	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
2	15	02	1.07	0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen
2	15	02	1.07	0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit
2	15	02	1.07	0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan / Dokumen
2	15	02	1.07	0010	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.07	0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi
2	15	02	1.07	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit
2	15	02	1.07	0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen
2	15	02	1.07	0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10	0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.12	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12	0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	02	3.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
2	15	02	3.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Laporan
2	15	02	3.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	02	4.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
2	15	02	4.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Laporan
2	15	02	4.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	6.04		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A			
2	15	02	6.04	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Dokumen
2	15	02	6.04	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	6.04	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang diawasi	Laporan
2	15	02	6.04	0007	Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A	Terselenggaranya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe A	Jumlah terminal yang menyelenggaran sistem informasi manajemen terminal tipe A	Unit
2	15	02	6.04	0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe A yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
2	15	02	6.04	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A yang terpenuhi.	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			
2	15	03	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			
2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	03	1.05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.07	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	1.07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen
2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit
2	15	03	1.10	0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	03	1.10	0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	3.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Laporan
2	15	03	3.10		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.10	0006	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	3.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			
2	15	03	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	03	4.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	4.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Laporan
2	15	03	4.10		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D			
2	15	03	4.10	0007	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	4.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	3.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	15	04	3.01	0003	Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Rute
2	15	04	3.01	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.01	0006	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	3.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.02		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	3.02	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	3.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	3.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	3.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	3.03	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	3.03	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	3.04		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan			
2	15	04	3.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan	orang
2	15	04	3.05		Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.05	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	3.05	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen
2	15	04	3.06		Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan			
2	15	04	3.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun	Dokumen
2	15	04	3.08		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.08	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan	Unit
2	15	04	3.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	04	3.10		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	04	3.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	15	04	4.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.01	0003	Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Rute
2	15	04	4.01	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	4.01	0006	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	4.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.02		Pembangunan Bandar Udara			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.02	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	4.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	4.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Dokumen
2	15	04	4.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	4.03	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.03	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	4.04		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan	orang
2	15	04	4.05		Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan			
2	15	04	4.05	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	4.05	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.06		Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan			
2	15	04	4.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun	Dokumen
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			
2	15	05	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	05	1.04	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsiyang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.07	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	4.09		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi			
2	15	05	4.09	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan	Unit
2	15	05	4.09	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	05	4.10		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	05	4.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi
2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	unit
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen
2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen usulan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen
2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah
2	16	03	3.01		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	3.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah provinsi	Tersedianya *start-up* digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah *start-up* digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	3.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase
2	16	03	3.01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	4.01		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	4.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	4.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase
2	16	03	4.01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat
2	17	06	1.01	0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	07	1.01	0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	07	1.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	3.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.03		Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	3.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.03		Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	Orang
2	17	08	1.01	0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	3.02		Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha			
2	17	08	3.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	4.02		Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha			
2	17	08	4.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM
2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			
2	17	09	3.01		Pemberian Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi			
2	17	09	3.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	09	3.02		Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi			
2	17	09	3.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	17	09	4.01		Pemberian Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi			
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi
2	17	09	4.02		Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi			
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	1.01	0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen
2	18	02	3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
2	18	02	3.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi			
2	18	02	3.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Badan Usaha
2	18	02	3.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	3.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	02	4.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
2	18	02	4.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	4.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Badan Usaha
2	18	02	4.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	4.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	4.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.01	0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	Kegiatan usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
2	18	06	3.02		Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06	3.02	0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk
2	18	06	4.02		Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06	4.02	0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk
2	18	07			PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL			
2	18	07	3.01		Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi			
2	18	07	3.01	0001	Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun	Dokumen
2	18	07	3.02		Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	3.02	0001	Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	18	07	3.02	0002	Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	07	3.03		Koordinasi Kerja Sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	3.03	0001	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
2	18	07	4.01		Penyiapan Materi Kerja Sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi			
2	18	07	4.01	0001	Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun	Dokumen
2	18	07	4.02		Dukungan Kerja Sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	4.02	0001	Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	18	07	4.02	0002	Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	07	4.03		Koordinasi Kerja Sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	4.03	0001	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen
2	19	03	3.05		Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	3.05	0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga
2	19	03	4.05		Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	03	4.05	0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	1.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit
2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan
2	19	04	1.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	1.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	Unit
2	19	04	1.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organiasasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	02	3.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	3.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	3.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	3.01	0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Laporan
2	22	02	4.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	4.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01	0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Laporan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terbitnya Perizinan Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan
2	22	05	3.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	3.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Cagar Budaya
2	22	05	3.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	3.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	3.02	0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian cagar budaya yang berada diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Laporan
2	22	05	3.02	0007	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar bBudaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	3.03	0003	Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi	Terbitnya izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi	Jumlah izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi yang diterbitkan	Dokumen
2	22	05	3.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	3.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	05	4.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	4.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.01	0006	Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau Lebih	Cagar Budaya
2	22	05	4.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	4.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	4.02	0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia	Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Laporan
2	22	05	4.02	0007	Penyelenggaraan kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	4.03	0003	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	05	4.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	4.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Telaksananya Penetapan sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			
2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.01	0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga
2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	0005	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Jumlah Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Buku
2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	0001	Pelatihan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang
2	22	07	7.02	0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.02	0003	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan
2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	0001	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang
2	22	07	7.03	0003	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen
2	22	07	7.03	0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang terdata dan Terdokumentasi	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.03	0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit
2	22	08	5.02		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
2	22	08	5.02	0001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten yang Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02	0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	22	08	5.02	0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Tersedianya Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Unit
2	22	08	5.03		Penguatan Museum Sonobudoyo			
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Tersedianya Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit
2	22	08	5.03	0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Terlaksananya Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.04	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek
2	22	08	5.04	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.05		Pengelolaan Taman Budaya			
2	22	08	5.05	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.06	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek
2	22	08	5.06	0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.06	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen
2	22	08	5.07	0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan
2	22	08	5.07	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
2	22	08	5.08	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.08	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.08	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.08	0005	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
2	22	08	5.09	0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa
2	22	08	5.09	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.09	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.09	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.09	0006	Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.09	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen
2	22	08	5.09	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.09	0010	Selendang Sutera	Tersedianya Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan
2	22	08	5.09	0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0012	Gelar Seni Budaya Daerah	Terselenggaranya Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan
2	22	08	5.09	0013	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Jumlah Objek Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta yang Dibina	Objek
2	22	08	5.09	0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Terlaksananya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan
2	22	08	5.09	0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.09	0016	Pembinaan Jagawarga	Terlaksananya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan
2	22	08	5.09	0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Terlaksananya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga
2	22	08	5.09	0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.09	0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen
2	22	08	5.09	0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Terlaksananya Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan
2	22	08	5.09	0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen
2	22	08	5.10		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.10	0001	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.10	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.10	0003	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang
2	22	08	5.10	0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Terselenggaranya Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			
2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	Desa
2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Dokumen
2	22	09	8.01	0003	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	Desa
2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			
2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa
2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	09	8.02	0003	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama	Lembaga
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat			
2	22	09	8.03	0001	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan	Laporan
2	22	09	8.03	0002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pawongan	Laporan
2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Laporan
2	22	09	8.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia			
2	22	09	8.04	0001	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina	Orang
2	22	09	8.04	0002	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	Orang
2	22	09	8.04	0003	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina	Orang
2	22	10			PROGRAM PERFILMAN NASIONAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10	3.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Provinsi			
2	22	10	3.01	0001	Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi	Jumlah Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi yang dilaksanakan	Orang
2	22	10	4.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Provinsi			
2	22	10	4.01	0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi	Jumlah Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi yang Dilaksanakan	Orang
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen
2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	3.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	3.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	02	4.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	4.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar
2	23	03	3.04		Penetapan Kebijakan Pelestarian Koleksi Provinsi			
2	23	03	3.04	0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi	Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua	Kebijakan
2	23	03	3.04	0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua	Orang
2	23	03	4.04		Penetapan Kebijakan Pelestarian Koleksi Provinsi			
2	23	03	4.04	0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi	Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	4.04	0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua	Orang
2	23	04			PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN			
2	23	04	3.01		Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi			
2	23	04	3.01	0001	Peningkatan Kapasitas Assessor	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor	Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya	orang
2	23	04	3.01	0002	Sosialisasi pelaksanaan akreditasi	Terselenggaranya sosialisasi akreditasi perpustakaan tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan yang mengikuti sosialisasi akreditasi	Perpustakaan
2	23	04	3.01	0003	Pelaksanaan akreditasi perpustakaan	Terlaksananya akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi	Jumlah perpustakaan yang diakreditasi	perpustakaan
2	23	04	4.01		Peningkatan Pustakawan Tersertifikasi			
2	23	04	4.01	0001	Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan	Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	04	4.01	0002	Sosialisasi sertifikasi pustakawan	Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi pustakawan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sertifikasi pustakawan	Orang
2	23	04	4.01	0003	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan	Terselenggaranya sertifikasi pustakawan	jumlah pustakawan yang disertifikasi	orang
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	Arsip
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	Arsip
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	Orang
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi
2	24	02	1.01	0009	Penyusunan Database Arsiparis	Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen
2	24	02	1.01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit
2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	Laporan
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Lembaga
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip
2	24	02	1.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang
2	24	02	1.02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Arsip
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan
2	24	02	3.04		Pembinaan Kearsipan Terhadap Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Laporan
2	24	02	3.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga
2	24	02	3.06		Pengawasan Kearsipan di Provinsi			
2	24	02	3.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Instansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi	Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	3.06	0003	Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.06		Pengawasan Kearsipan di Provinsi			
2	24	02	4.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Instansi
2	24	02	4.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi	Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.06	0003	Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
2	24	03	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi			
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar
2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip
2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	04	1.01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP
2	24	04	1.01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
2	24	05			PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI			
2	24	05	3.01		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kearsipan di Wilayah Provinsi			
2	24	05	3.01	0001	Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi	Terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	05	3.03		Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi			
2	24	05	3.03	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat
2	24	05	3.05		Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan di Wilayah Provinsi			
2	24	05	3.05	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertfikasi	orang
2	24	05	4.04		Pemberian Akreditasi Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			
2	24	05	4.04	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	05	4.06		Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan di Wilayah Provinsi			
2	24	05	4.06	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertfikasi	orang
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen
3	25	02	1.01	0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia	Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Kegiatan
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha
3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok
3	25	02	1.01	0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton
3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen
3	25	02	1.01	0014	Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergaraman	Ditetapkannya rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan	Dokumen
3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok
3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.03	0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Unit Usaha
3	25	02	1.03	0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit
3	25	02	3.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	3.02	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
3	25	02	3.02	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.02	0008	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dokumen
3	25	02	3.02	0009	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen
3	25	02	3.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3	25	02	3.03	0005	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.04		Penegakan Hukum Terhadap Peraturan yang Dikeluarkan Atas Wilayah Laut			
3	25	02	3.04	0001	Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Dokumen
3	25	02	3.05		Pencadangan Kawasan Konservasi			
3	25	02	3.05	0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan	Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Ha
3	25	02	3.06		Pelibatan Masyarakat Adat Setempat yang Hidup di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.06	0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	3.07		Perlindungan dan Pengembangan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan			
3	25	02	3.07	0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.08		Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut sesuai dengan Karakteristik dan Budaya Asli Papua berdasarkan Kebijakan yang Ditetapkan			
3	25	02	3.08	0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan	Perkada
3	25	02	4.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	4.02	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.02	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
3	25	02	4.02	0008	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dokumen
3	25	02	4.02	0009	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	dokumen
3	25	02	4.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.03	0005	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	4.04		Penegakan Hukum Terhadap Peraturan yang Dikeluarkan Atas Wilayah Laut			
3	25	02	4.04	0001	penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Dokumen
3	25	02	4.05		Pencadangan Kawasan Konservasi			
3	25	02	4.05	0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan	Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.06		Melibatkan Masyarakat Adat Setempat yang Hidup di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut			
3	25	02	4.06	0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	4.07		Perlindungan dan Pengembangan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.07	0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Komunitas
3	25	02	4.08		Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut sesuai dengan Karakteristik dan Budaya Asli Papua berdasarkan Kebijakan yang Ditetapkan			
3	25	02	4.08	0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan	Perkada
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.01	0004	Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	rekomendasi
3	25	03	1.01	0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit
3	25	03	1.01	0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Dokumen
3	25	03	1.01	0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.01	0008	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Diterbitkannya surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon	Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.01	0009	Penerbitan rekomendasi surat tanda keterangan andon	Diterbitkannya rekomendasi surat tanda keterangan andon	Jumlah rekomendasi surat tanda keterangan andon yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen
3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.08	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.08	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	3.11		Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			
3	25	03	3.11	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.11	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	25	03	3.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.13		Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	25	03	3.13	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.13	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	03	3.14		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.14	0001	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan.	rekomendasi
3	25	03	3.15		Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT			
3	25	03	3.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.	Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.16		Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan			
3	25	03	3.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan	Unit Usaha
3	25	03	4.11		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.11	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	25	03	4.11	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	25	03	4.12		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.13		Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	25	03	4.13	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.13	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	03	4.14		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.14	0001	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan.	rekomendasi
3	25	03	4.15		Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT			
3	25	03	4.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.	Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.16		Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan			
3	25	03	4.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan	Unit Usaha
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen
3	25	04	1.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.02	0003	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.04	0003	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	rekomendasi
3	25	04	1.04	0004	Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala Mikro dan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	1.05	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Unit
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.01	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat
3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	3.03		Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	3.03	0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi	Kegiatan
3	25	05	3.04		Pemberian Sanksi Hukum bagi Pelaku yang Melakukan Kegiatan Penangkapan Secara Ilegal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
3	25	05	3.04	0001	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	3.04	0002	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	3.04	0003	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	4.03		Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
3	25	05	4.03	0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi	Kegiatan
3	25	05	4.04		Pemberian Sanksi Hukum bagi Pelaku yang Melakukan Kegiatan Penangkapan Secara Ilegal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	4.04	0001	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	4.04	0002	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	4.04	0003	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	perkara
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen
3	25	06	1.01	0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi
3	25	06	1.01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.03	0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha
3	25	06	1.03	0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton
3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.04		Pembinaan Teknis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan untuk Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri			
3	25	06	3.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha
3	25	06	3.05		Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	3.06		Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan untuk Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar			
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/ tahun
3	25	06	3.07		Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit
3	25	06	3.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi
3	25	06	3.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit
3	25	06	4.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha
3	25	06	4.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			
3	25	06	4.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/ tahun
3	25	06	4.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit
3	25	06	4.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi
3	25	06	4.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen
3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.02	0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.03	0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha
3	26	02	1.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.04	0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.04	0012	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha
3	26	02	1.04	0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan
3	26	02	3.05		Penetapan Rencana Induk Pariwisata di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	3.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	26	02	4.05		Penetapan Rencana Induk Pariwisata di Wilayah Provinsi			
3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
3	26	03	3.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	3.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	4.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	4.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	4.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen
3	26	04	1.02	0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02	0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga
3	26	04	1.02	0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Dokumen
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen
3	26	04	1.02	0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	1.01	0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	1.01	0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Terciptanya produk kreatif memalui kegiatan pemdampingan	Jumlah produk kreatif	Produk
3	26	05	1.01	0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang
3	26	05	1.01	0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi *Asesor/Recognition Current Competencies* (RCC) Bidang Pariwisata	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi *Asesor/Recognition Current Competencies* (RCC)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi *Asesor/Recognition Current Competencies* (RCC)	Orang
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah terkait pengembangan kepariwisataan	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Orang
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.02	0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0004	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	3.03		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	3.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	26	05	4.03		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	4.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.01	0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan
3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan
3	27	02	1.01	0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan
3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
3	27	02	1.02	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
3	27	02	1.02	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.02	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
3	27	02	1.02	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
3	27	02	1.02	0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton
3	27	02	1.02	0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan
3	27	02	1.03	0005	Penilaian rumpun SDG Hewan	Terlaksananya penilaian rumpun SDG Hewan	Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai	Rumpun
3	27	02	1.03	0006	Penilaian galur SDG Hewan	Terlaksananya penilaian galur SDG Hewan	Jumlah galur SDG hewan yang dinilai	Galur
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	1.06	0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton
3	27	02	1.07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha
3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Terbangun dan terpeliharanya laboratorium benih atau balai benih ternak	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan
3	27	03	1.02	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayaninya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan
3	27	04	1.01	0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	27	04	1.01	0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus
3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan
3	27	04	1.02	0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha
3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha
3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha
3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.03	0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen
3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
3	27	05	1.01	0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
3	27	06	1.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Terawasinya Pelaksanaan Izin Laboratorium	Jumlah Izin Laboratorium yang Diawasi	Laporan
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			
3	27	06	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit
3	27	07	3.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	3.02	0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Laporan
3	27	07	4.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	4.02	0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Laporan
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN			
3	28	02	3.01		Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Dokumen
3	28	02	3.02		Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua			
3	28	02	3.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Dokumen
3	28	02	3.03		Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH			
3	28	02	3.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen
3	28	02	3.04		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang disusun	Dokumen
3	28	02	3.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	02	3.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.04	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Jumlah Organisasi KPH dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung yang dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.04	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi KPH	Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.05		Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi			
3	28	02	3.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen
3	28	02	3.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Dokumen
3	28	02	4.01		Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Dokumen
3	28	02	4.02		Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat			
3	28	02	4.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Dokumen
3	28	02	4.03		Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH			
3	28	02	4.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen
3	28	02	4.04		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang disusun	Dokumen
3	28	02	4.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	02	4.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.04	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Jumlah Organisasi KPH dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung yang dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.04	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.05		Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi			
3	28	02	4.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen
3	28	02	4.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Dokumen
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen
3	28	03	1.01	0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan	Dokumen
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	Dokumen
3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit
3	28	03	1.01	0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penatagunaan kawasan hutan	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan	Dokumen
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.02	0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan	Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan	Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	Dokumen
3	28	03	1.02	0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	Tersusunnya Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	Jumlah Peta	Dokumen
3	28	03	1.02	0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	Dokumen
3	28	03	1.02	0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	Dokumen
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen
3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen
3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	03	1.03	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	Laporan
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit
3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Operasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	Operasi
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Managemen
3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit Managemen
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.06	0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	Unit Managemen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Managemen
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi			
3	28	03	1.08	0003	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK	Jumlah Laporan kegiatan pengawasan KHDTK	Dokumen
3	28	03	1.08	0004	Perencanaan pengelolaan KHDTK	Terlaksananya fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK yang difasilitasi	Dokumen
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan			
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang
3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	Kali
3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Terlaksananya pelayanan periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha
3	28	03	3.10		Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain			
3	28	03	3.10	0001	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Unit
3	28	03	3.10	0002	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	3.11		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Non - Komersial			
3	28	03	3.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit
3	28	03	3.12		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemegang Persetujuan Kawasan Hutan			
3	28	03	3.12	0001	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Dokumen
3	28	03	4.10		Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain			
3	28	03	4.10	0001	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	4.10	0002	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Dokumen
3	28	03	4.11		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Non - Komersial			
3	28	03	4.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit
3	28	03	4.12		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemegang Persetujuan Kawasan Hutan			
3	28	03	4.12	0001	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Dokumen
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			
3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
3	28	04	1.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen
3	28	04	1.01	0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha
3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha
3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Pelaksanan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	Dokumen
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen
3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
3	28	04	1.03	0007	Pengelolaan koridor hidupan liar	Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan koridor hidupan liar	Luas koridor hidupan liar yang dikelola	Ha
3	28	04	1.03	0008	Penetapan koridor hidupan liar	Terlaksananya penetapan koridor hidupan liar satwa	dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati mulitipihak	Dokumen
3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
3	28	05	3.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	3.01	0004	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya persetujuan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
3	28	05	3.01	0005	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya peningkatan kualitas KUPS	jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit
3	28	05	4.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	4.01	0004	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya persetujuan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
3	28	05	4.01	0005	pengembangan Usaha Perhutanan sosial	Terlaksananya peningkatan kualitas KUPS	jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen
3	28	08			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT			
3	28	08	3.01		Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	28	08	3.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.02	0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	Lembaga
3	28	08	3.03		Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan			
3	28	08	3.03	0001	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.04		Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat			
3	28	08	3.04	0001	Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Laporan
3	28	08	3.04	0002	Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Laporan
3	28	08	3.04	0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan	Lembaga MHA
3	28	08	3.04	0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan	Lembaga MHA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.01		Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	28	08	4.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	28	08	4.02	0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.03		Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan			
3	28	08	4.03	0001	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	28	08	4.04		Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat			
3	28	08	4.04	0001	Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.04	0002	Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Laporan
3	28	08	4.04	0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan	Lembaga MHA
3	28	08	4.04	0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan	Lembaga MHA
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	3.04		Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi			
3	29	02	3.04	0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.05		Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	3.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	3.06		Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			
3	29	02	3.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan	Dokumen
3	29	02	3.06	0002	Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.07		Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			
3	29	02	3.07	0001	Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Laporan
3	29	02	3.09		Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)			
3	29	02	3.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity* pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Jumlah dokumen keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*) yang telah terinventarisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.10		Penyediaan Data Geologi untuk Menyusun Peringatan Dini Potensi Gerakan Tanah			
3	29	02	3.10	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.11		Evaluasi Efektivitas Peringatan Dini Gerakan Tanah Lokal pada Lokasi Spesifik Rawan Bencana			
3	29	02	3.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	02	3.12		Penyediaan Data Geologi untuk Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi			
3	29	02	3.12	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.13		Penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana Detail (skala>1:25.000)			
3	29	02	3.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan	Peta
3	29	02	4.04		Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi			
3	29	02	4.04	0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	4.05		Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	4.06		Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			
3	29	02	4.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan	Dokumen
3	29	02	4.06	0002	Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.08		Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.08	0001	Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Laporan
3	29	02	4.09		Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)			
3	29	02	4.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity* pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Jumlah dokumen keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	4.10		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.10	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.11		Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana			
3	29	02	4.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	02	4.12		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi			
3	29	02	4.12	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.13		Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan	Peta
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Terlaksananya Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	Laporan
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan
3	29	03	1.04	0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Laporan
3	29	03	1.04	0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dokumen
3	29	03	1.04	0008	Pelaksanaan dan Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Terlaksananya dan terlaporkannya hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Laporan
3	29	03	1.04	0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Tersedianya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen
3	29	03	1.04	0011	Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dokumen
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.13	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.13	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			
3	29	03	1.14	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen
3	29	03	1.14	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan
3	29	03	1.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen
3	29	03	1.14	0004	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Tersedianya Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.15		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.15	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.15	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.16		Penetapan Harga Patokan Batuan			
3	29	03	1.16	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.16	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.17	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen
3	29	03	1.17	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.17	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.17	0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.18		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.18	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.18	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.18	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.18	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.19	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.19	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.19	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.19	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.20		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.20	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.20	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03	1.20	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.20	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen
3	29	03	1.21		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.21	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen
3	29	03	1.21	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.21	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.21	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.22		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.22	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.22	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.22	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.22	0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.23		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.23	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.23	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.23	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Dokumen
3	29	03	1.23	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan			
3	29	03	1.24	0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan
3	29	03	1.24	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Dokumen
3	29	03	1.24	0003	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Terlaksananya bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	1.24	0004	Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tersedia norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dokumen
3	29	03	1.24	0005	Perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dokumen
3	29	03	1.24	0006	Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.24	0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Terlaksananya pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Laporan
3	29	03	1.25		Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi			
3	29	03	1.25	0001	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.25	0002	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.25	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0006	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0007	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0008	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0009	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0010	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, MineralBukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.04	0006	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.04	0007	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan
3	29	03	3.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			
3	29	03	3.14	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data danInformasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan
3	29	03	3.14	0002	Penentuan dan Penetapan Harga PatokanMineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Dokumen
3	29	03	3.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	3.17	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	3.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan			
3	29	03	3.19	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	3.25		Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0001	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.25	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.25	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0004	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Dokumen
3	29	03	3.25	0005	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi	Dokumen
3	29	03	3.25	0006	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan	Dokumen
3	29	03	3.25	0007	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0008	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan	Dokumen
3	29	03	3.25	0009	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Dokumen
3	29	03	3.25	0010	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Dokumen
3	29	03	3.25	0011	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0012	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan	Dokumen
3	29	03	3.26		Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	3.26	0001	Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Dokumen
3	29	03	3.26	0002	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	3.26	0003	Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.27		Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	3.27	0001	Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.27	0002	Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	3.27	0003	Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	3.28		Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	03	3.29		Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan			
3	29	03	3.29	0001	Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	3.29	0002	Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	3.29	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.30		Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
3	29	03	3.30	0001	Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen
3	29	03	4.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	4.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	4.03	0006	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.03	0007	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	4.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			
3	29	03	4.14	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data danInformasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.14	0002	Penentuan dan Penetapan Harga PatokanMineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Dokumen
3	29	03	4.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan
3	29	03	4.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	4.17	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan danPenjualan untuk Komoditas Batuan			
3	29	03	4.19	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	4.25		Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan			
3	29	03	4.25	0001	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	4.25	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Laporan
3	29	03	4.25	0004	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0005	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi	Dokumen
3	29	03	4.25	0006	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan	Dokumen
3	29	03	4.25	0007	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.25	0008	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0009	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.25	0010	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Dokumen
3	29	03	4.25	0011	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.25	0012	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.26		Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	4.26	0001	Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.26	0002	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	4.26	0003	Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Laporan
3	29	03	4.27		Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	4.27	0001	Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.27	0002	Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	4.27	0003	Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	4.28		Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	03	4.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	03	4.29		Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.29	0001	Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	4.29	0002	Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	4.29	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Laporan
3	29	03	4.30		Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.30	0001	Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen
3	29	04			PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI			
3	29	04	3.01		Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi			
3	29	04	3.01	0001	Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.01	0002	Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.02		Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi			
3	29	04	3.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.03		Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah			
3	29	04	3.03	0001	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Dokumen
3	29	04	3.04		Koordinasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Dari OAP			
3	29	04	3.04	0001	Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.05		Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan			
3	29	04	3.05	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	04	3.06		Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.06	0001	Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Laporan
3	29	04	3.07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	3.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	3.08		Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Gubernur Papua merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.08	0001	Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Jumlah Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Laporan
3	29	04	3.08	0002	Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	3.09		Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.09	0001	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.10		Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua			
3	29	04	3.10	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Yang Disediakan	Dokumen
3	29	04	3.11		Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua			
3	29	04	3.11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.12		Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua			
3	29	04	3.12	0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya	Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua	Laporan
3	29	04	3.13		Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	04	3.13	0001	Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	29	04	3.14		Penetapan dan Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	3.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	3.15		Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.15	0001	Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Junlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	29	04	3.16		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
3	29	04	3.16	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan			
3	29	04	3.17	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.01		Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.01	0001	Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia	Laporan
3	29	04	4.02		Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi			
3	29	04	4.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.03		Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah			
3	29	04	4.03	0001	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Dokumen
3	29	04	4.04		Koordinasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Dari OAP			
3	29	04	4.04	0001	Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.06		Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat			
3	29	04	4.06	0001	Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Laporan
3	29	04	4.07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	4.08		Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Gubernur Papua Barat merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.08	0001	Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Jumlah Kebijakan Terkait Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Laporan
3	29	04	4.08	0002	Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.09		Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi			
3	29	04	4.09	0001	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	4.10		Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat			
3	29	04	4.10	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat Yang Disediakan	Dokumen
3	29	04	4.11		Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat			
3	29	04	4.11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.12		Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat			
3	29	04	4.12	0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya	Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	4.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua	Laporan
3	29	04	4.13		Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	04	4.13	0001	Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	29	04	4.14		Penetapan dan Pembangunan Posko BBM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	4.15		Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	4.15	0001	Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Junlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	29	04	4.16		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.16	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.17	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.03	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terlaksananya penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	1.03	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen
3	29	05	1.03	0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terbinanya Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan
3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	terkumpulnya data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen
3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan
3	29	05	1.05	0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Terlaksananya kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Laporan
3	29	05	1.05	0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.05	0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Laporan
3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Terkumpulnya data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen
3	29	05	1.05	0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	Dokumen
3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan
3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.06	0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	Unit
3	29	05	1.06	0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.06	0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	Unit
3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan
3	29	05	1.06	0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst)	Laporan
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	laporan
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	1.07	0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan
3	29	05	1.07	0004	Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBTJumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	laporan
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit
3	29	05	1.07	0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur aneka EBT	orang
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	unit
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
3	29	05	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terkumpulnya data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.08	0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.08	0003	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Tersusunnya laporan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.08	0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Terlaksananya evaluasi kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	Laporan
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit
3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Tersusunnya rencana kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			
3	29	05	1.10	0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan
3	29	05	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.10	0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan
3	29	05	3.05		Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.05	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	3.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen
3	29	05	3.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	3.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	3.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.06		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota			
3	29	05	3.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.06	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.07		Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	3.07	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	3.08		Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota			
3	29	05	3.08	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	3.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	3.09		Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi			
3	29	05	3.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.09	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.10		Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.10	0001	Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.	Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	3.11		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi			
3	29	05	3.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	3.12		Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	29	05	3.13		Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)			
3	29	05	3.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.05		Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan			
3	29	05	4.05	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	4.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	4.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	4.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	4.06		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota			
3	29	05	4.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.06	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.07		Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota			
3	29	05	4.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.07	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	4.08		Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota			
3	29	05	4.08	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen
3	29	05	4.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	4.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	4.08	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.09		Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi			
3	29	05	4.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.09	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.10		Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			
3	29	05	4.10	0001	Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.	Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	4.11		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	4.12		Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah			
3	29	05	4.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	29	05	4.13		Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Dokumen
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	Dokumen
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.04	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.04	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.04	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.05	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen
3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan
3	29	06	3.07		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	3.07	0001	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
3	29	06	3.07	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	3.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	4.07		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	4.07	0001	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
3	29	06	4.07	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	4.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.02	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen
3	30	02	1.02	0005	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemberian surat rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
3	30	02	1.02	0006	Fasilitasi Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0007	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
3	30	02	1.02	0008	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen
3	30	02	1.03	0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen
3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0004	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya Adalah Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya dengan alat ukur Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0005	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya	Tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	laporan
3	30	02	1.03	0006	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemberian surat rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	3.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			
3	30	02	3.01	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	3.05		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	3.05	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	4.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			
3	30	02	4.01	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	4.05		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	4.05	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	1.01	0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan
3	30	03	3.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	3.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit
3	30	03	4.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	4.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			
3	30	04	1.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan
3	30	04	1.03	0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Tersedianya laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	3.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	3.01	0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit
3	30	04	3.01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Terselenggaranya Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Kegiatan
3	30	04	4.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	4.01	0004	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	4.01	0005	Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Terselenggaranya Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Kegiatan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan
3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan
3	30	07	1.03	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan
3	31	02	1.01	0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	1.01	0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen
3	31	02	3.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen
3	31	02	3.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit
3	31	02	4.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen
3	31	02	4.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
3	32	03	1.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi
3	32	03	1.01	0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0010	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	1.01	0011	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	1.01	0012	Penampungan Provinsi	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK
3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
3	32	03	1.01	0014	Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	KK
3	32	03	1.01	0015	Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0016	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK
3	32	03	1.01	0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	Paket
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah			
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan
4	01	03	1.02	0004	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	09			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.01		Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri			
4	01	09	3.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Laporan
4	01	09	3.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	09	3.02		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	09	3.02	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen
4	01	09	3.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	09	3.03		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.03	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.03	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	09	3.03	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0005	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi /Akademi	Unit
4	01	09	3.03	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	0010	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.03	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Unit
4	01	09	3.03	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.03	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	0016	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	09	3.03	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.04		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.04	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.04	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	09	3.04	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	09	3.04	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	09	3.04	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang
4	01	09	3.04	0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	09	3.04	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan			
4	01	10	5.01	0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	0002	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Dokumen
4	01	10	5.01	0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	10	5.01	0005	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Kelembagaan Asli	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.01	0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	10	5.01	0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen
4	01	10	5.01	0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen
4	01	10	5.01	0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	10	5.01	0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Terbinanya Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen
4	01	10	5.02	0002	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan	Orang
4	01	10	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Terselenggaranya Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang
4	01	10	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara			
4	01	10	5.03	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.03	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan
4	01	10	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	10	5.04	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen
4	01	10	5.04	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	10	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.05	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen
4	01	10	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	10	5.05	0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
4	01	10	5.05	0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	10	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	10	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan
4	01	10	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
4	01	10	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	Unit
4	01	10	5.08		Peningkatan Pelayanan Parampara Praja			
4	01	10	5.08	0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersedianya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi
4	01	10	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
4	01	10	5.09	0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terbinanya Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
4	01	11	5.01		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
4	01	11	5.01	0001	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Dokumen
4	01	11	5.01	0002	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	11	5.01	0003	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	11	5.01	0004	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Tersosialisanya Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	12			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT			
4	01	12	4.01		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	12	4.01	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen
4	01	12	4.01	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	12	4.02		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.02	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.02	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	12	4.02	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0005	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/ Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Unit
4	01	12	4.02	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	12	4.02	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	0010	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.02	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Unit
4	01	12	4.02	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.02	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	12	4.02	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	0016	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	12	4.02	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.03		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.03	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.03	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	12	4.03	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	12	4.03	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	12	4.03	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang
4	01	12	4.03	0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	12	4.03	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen
4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
4	02	03			PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			
4	02	03	3.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
4	02	03	3.01	0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	03	3.01	0002	Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja	Tersusunnya LKPJ dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen
4	02	03	3.01	0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	03	3.01	0004	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen
4	02	05			PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT			
4	02	05	4.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah			
4	02	05	4.01	0006	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	05	4.01	0007	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen
4	02	05	4.01	0008	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	01	02	1.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	1.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	1.05	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.05	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan
5	02	02	1.05	0011	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Terkelolanya Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5	02	02	1.06	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD
5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	1.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga
5	03	02	1.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang
5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	1.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang
5	03	02	1.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen
5	04	02	1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
5	04	02	1.03	0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi
5	04	02	1.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan
5	05	02	1.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan
5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Tersedianya Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen
5	05	02	1.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen
5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen
5	05	02	1.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen
5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen
5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	05	02	8.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	8.04	0012	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	8.04	0013	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Dokumen
5	05	02	8.04	0014	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Dokumen
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
5	05	03	1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
5	05	03	1.01	0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.01	0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen
5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah
5	05	03	1.01	0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan
5	05	03	1.01	0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.01	0006	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	1.02		Invensi dan Inovasi			
5	05	03	1.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan
5	05	03	1.02	0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah
5	05	03	1.02	0004	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan
5	05	03	1.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0012	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi
5	05	03	1.02	0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan
5	05	03	1.02	0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0018	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0019	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan
5	05	03	1.02	0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0021	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan
5	05	03	1.02	0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan
5	05	03	1.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen
5	06	02	1.02	0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan
5	06	02	1.03	0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			
7	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN			
7	01	02	6.01		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi			
7	01	02	6.01	0001	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat	Tersusunnya Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Jumlah Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Dokumen
7	01	02	6.01	0002	Pengadaan Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah	Tersedianya Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah	Jumlah Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah	Unit
7	01	02	6.01	0003	Pengadaan Peralatan dan Mebel Kantor Lurah	Tersedianya Peralatan dan Mebel Kantor Lurah	Jumlah Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit
7	01	02	6.01	0004	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi	Terlaksananya Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit
7	01	02	6.01	0005	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi	Terlaksananya Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi	Jumlah Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.01	0006	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Tersusunnya Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen
7	01	02	6.02		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat
7	01	02	6.02	0002	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen
7	01	02	6.02	0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan
7	01	02	6.02	0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.02	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	0009	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.03		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.03	0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Tersedianya Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.03	0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus	Liter
7	01	02	6.03	0003	Pemeliharaan KDO Kecamatan	Terpeliharanya KDO Kecamatan	Jumlah KDO Kecamatan yang Dipelihara	Unit
7	01	02	6.03	0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Dokumen
7	01	02	6.04		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten			
7	01	02	6.04	0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan
7	01	02	6.04	0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan
7	01	02	6.04	0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.04	0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan
7	01	02	6.05		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.05	0001	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan
7	01	02	6.05	0002	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen
7	01	02	6.05	0003	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.05	0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	Unit
7	02				KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02	6.01		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi			
7	02	02	6.01	0001	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang Diisi	Unit
7	02	02	6.02		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi			
7	02	02	6.02	0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Tersedianya Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Perizinan KDO/KDO Khusus	Dokumen
7	02	02	6.02	0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang Disediakan BBM	Unit
7	02	02	6.02	0003	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Terpeliharanya KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Jumlah KDO/KDO Khusus Kota Administrasi yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi			
7	02	02	6.03	0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga
7	02	02	6.03	0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan
7	02	02	6.03	0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan
7	02	02	6.03	0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Terselenggaranya Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen
7	02	02	6.03	0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0017	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi yang Disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0019	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0023	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0029	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0030	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0031	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0032	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0033	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0034	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0035	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan
7	02	02	6.03	0041	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Administrasi	Terlaksananya Character Building Pegawai Kota Administrasi	Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti Character Building yang Dilaksanakan	Orang
7	02	02	6.03	0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0043	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03				KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	02			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN			
7	03	02	6.01		Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan			
7	03	02	6.01	0001	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Dokumen
7	03	02	6.01	0002	Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Terlaksananya Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Jumlah Laporan Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Laporan
7	03	02	6.01	0003	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.01	0004	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten	Jumlah Dokumen Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten yang Disusun dan Dievaluasi	Dokumen
7	03	02	6.01	0005	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten yang Ditingkatkan	Dokumen
7	03	02	6.01	0006	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.01	0007	Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Meningkatnya Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Orang
7	03	02	6.01	0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.01	0009	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.01	0010	Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Dokumen
7	03	02	6.01	0011	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Terpantaunya Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.02		Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian			
7	03	02	6.02	0001	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Orang
7	03	02	6.02	0002	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Dokumen
7	03	02	6.02	0003	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.02	0004	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.02	0005	Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Dokumen
7	03	02	6.02	0006	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti Character Building	Orang
7	03	02	6.02	0007	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.02	0008	PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terlaksananya PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.02	0009	Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.02	0010	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
7	03	02	6.02	0011	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen
7	03	02	6.03		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan			
7	03	02	6.03	0001	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Dokumen
7	03	02	6.03	0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	0003	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	0004	Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Terbinanya Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Dokumen Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Dokumen
7	03	02	6.03	0005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	0006	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Tersusunnya Dokumen Rencana Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Jumlah Dokumen Rencana Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Dokumen
7	03	02	6.03	0007	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	0009	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	0010	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	0012	Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.03	0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	0014	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	0015	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dokumen
7	03	02	6.03	0016	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Dokumen
7	03	02	6.03	0017	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.03	0018	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Dokumen
7	03	02	6.03	0019	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Tersedianya Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Jumlah Laporan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Laporan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen
8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
8	01	04	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen
9					UNSUR KEKHUSUSAN			
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			
9	01	02	7.01	0001	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru''yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Mental Spiritualnya yang Dibina	Orang
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran			
9	01	02	7.02	0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Orang
9	01	02	7.02	0002	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	0003	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.02	0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan	Orang
9	01	02	7.02	0006	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terberangkatkannya Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			
9	01	02	7.03	0001	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Dibina	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat kualitasnya	Orang
9	01	02	7.04	0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.04	0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong
9	01	02	7.04	0008	Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum''at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan
9	01	02	7.04	0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0011	Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Unit
9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			
9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan
9	01	02	7.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang
9	01	02	7.06	0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.06	0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh			
9	01	02	7.07	0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Orang
9	01	02	7.07	0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	0005	Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Didatangkannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Jumlah Imam dari Luar Negeri saat Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan	Orang
9	01	02	7.07	0006	Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Laporan
9	01	02	7.07	0007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara rutin/berkala	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	02	7.07	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Direhab Sedang/Berat	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terbinaanya Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Dokumen
9	01	03	7.01	0003	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0004	Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0006	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen
9	01	03	7.01	0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	0008	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	0009	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen
9	01	03	7.01	0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Orang
9	01	03	7.01	0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0012	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0013	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Kajian Pedoman Keagamaan yang Dihasilkan	Laporan
9	01	03	7.01	0014	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0015	Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Jumlah Kader Ulama (Otsus) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0016	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.02	0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	0003	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			
9	01	03	7.03	0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0002	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0003	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0004	Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasistas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
9	01	03	7.03	0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03	0006	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL ACEH			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	0002	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Dokumen
9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang
9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang
9	01	04	7.03	0009	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan
9	01	05			PROGRAM REINTEGRASI ACEH			
9	01	05	7.01		Konsolidasi Perdamaian Aceh			
9	01	05	7.01	0001	Penguatan Reintegrasi	Terlaksananya Penguatan Reintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Reintegrasi	Dokumen
9	01	05	7.02		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik			
9	01	05	7.02	0001	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Terlaksanya Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya	Laporan
9	01	05	7.02	0002	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan
9	01	05	7.03		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	05	7.03	0001	Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial	Orang
9	01	05	7.03	0002	Perlindungan Sosial Korban Konflik	Terlindunginya Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan	Orang
9	01	05	7.04		Pendidikan Damai			
9	01	05	7.04	0001	Peringatan Hari Damai Aceh	Terlaksananya Peringatan Hari Damai Aceh	Jumlah Laporan Peringatan Hari Damai Aceh	Laporan
9	01	05	7.05		Pencegahan dan Mitigasi Konflik			
9	01	05	7.05	0001	Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Diselesaikannya Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Laporan
9	01	06			PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH			
9	01	06	7.01		Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.01	0001	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Tersusunnya Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Jumlah Dokumen Fatwa Hukum Syar''i dan Regulasi tentang Adat Istiadat yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	0002	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Terbinanya Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Jumlah Lembaga Adat dan Imeum Mukim yang Dibina	Lembaga
9	01	06	7.01	0003	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	0004	Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen
9	01	06	7.01	0005	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen
9	01	06	7.01	0006	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Perangkat Wali Nanggroe yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang
9	01	06	7.01	0007	Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Terkelolanya Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Jumla Laporan Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.01	0008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Orang/Bulan
9	01	06	7.02		Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh			
9	01	06	7.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Dokumen
9	01	06	7.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Laporan
9	01	06	7.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Laporan
9	01	06	7.03		Peradaban dan Tamadhun Aceh			
9	01	06	7.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.03	0002	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbinanya Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Dibina	Unit
9	01	06	7.03	0003	Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Terlaksananya Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah Sertifikat Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga Baik Dalam maupun Luar Negeri	Dokumen
9	01	06	7.03	0004	Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Berkembangnya Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Laporan
9	01	06	7.04		Fasilitasi Kerumahtanggaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.04	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.04	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Waliyul Ahdi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wahyu Ahdi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Waliyul Ahdi yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.04	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Perangat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.04	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.05		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.05	0001	Fasilitasi Keprotokolan Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0002	Fasilitasi Keprotokolan Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0003	Fasilitasi Keprotokolan Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0004	Fasilitasi Keprotokolan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0005	Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0006	Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0007	Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0008	Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0009	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0010	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0011	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0012	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0013	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0014	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0015	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0016	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0017	Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0018	Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0019	Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0020	Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	02				KEKHUSUSAN PAPUA			
9	02	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA			
9	02	02	3.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	02	02	3.01	0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	02	02	3.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Tersalurkannya Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	02	02	3.01	0004	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.01	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	02	02	3.01	0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	02	02	3.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	02	02	3.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	02	02	3.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksananaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub	Dokumen
9	02	02	3.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	02	02	3.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Terlaksananya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
9	02	02	3.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama	Dokumen
9	02	02	3.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	02	02	3.02	0013	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga
9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT			
9	03	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT			
9	03	02	4.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	03	02	4.01	0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	03	02	4.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	03	02	4.01	0004	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	03	02	4.01	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	03	02	4.01	0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	03	02	4.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	03	02	4.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	03	02	4.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Dokumen
9	03	02	4.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	03	02	4.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Terususunya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	03	02	4.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Dokumen
9	03	02	4.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Dokumen
9	03	02	4.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	03	02	4.02	0013	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga

Keterangan Kode Kekhususan:
3.01 : Provinsi Papua
4.01 : Provinsi Papua Barat
5.01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.01 : Provinsi DKI Jakarta
7.01 : Provinsi Aceh
8.01 : Provinsi Bali

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X					URUSAN X.XX			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara
X	XX	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen
X	XX	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi
X	XX	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
X	XX	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
X	XX	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
X	XX	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.13		Penataan Organisasi			
X	XX	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen
X	XX	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan
X	XX	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen
X	XX	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen
X	XX	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
X	XX	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
X	XX	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan
X	XX	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang
X	XX	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			
X	XX	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.01	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit
1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.03	0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit
1	01	02	2.04	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.04	0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	3.01	0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Lembaga
1	01	02	3.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	3.02	0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lembaga
1	01	02	3.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	3.03	0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
1	01	02	3.04	0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Lembaga
1	01	02	3.05		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	3.05	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	3.05	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.05	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.05	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.05	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.05	0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	3.05	0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.05	0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.05	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	3.05	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.05	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.05	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.05	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	3.05	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.05	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	3.05	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	3.05	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.05	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	3.05	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.05	0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas	Lembaga
1	01	02	3.06		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	3.06	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	3.06	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.06	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.06	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.06	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	3.06	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	3.06	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.06	0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.06	0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada	Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	3.06	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yangdikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	3.06	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.06	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.06	0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.06	0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga
1	01	02	3.07		Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus bagi OAP			
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada PendidikanSekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.08		Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	01	02	3.08	0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.08	0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.09		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota			
1	01	02	3.09	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	4.01	0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Lembaga
1	01	02	4.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.02	0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lembaga
1	01	02	4.05		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	4.05	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	4.05	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	4.05	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.05	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.05	0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	4.05	0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	4.05	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.05	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	4.05	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.05	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	4.05	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	4.05	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.05	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.05	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.05	0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas	Lembaga
1	01	02	4.06		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	4.06	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	4.06	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	4.06	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.06	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.06	0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	4.06	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	4.06	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.06	0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	4.06	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada	Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	4.06	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yangdikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	4.06	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.06	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.06	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.06	0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga
1	01	02	4.07		Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus bagi OAP			
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada PendidikanSekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08		Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	01	02	4.08	0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08	0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.09		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota			
1	01	02	4.09	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Satuan Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	Buku
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	3.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	3.01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	3.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	3.02	0005	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	3.03		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	03	3.03	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.03	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.03	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.03	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	3.04		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	03	3.04	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.04	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.04	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Buku
1	01	03	3.04	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	4.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	4.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			
1	01	03	4.02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	4.03		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	03	4.03	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.03	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.03	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Buku
1	01	03	4.03	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	4.04		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	03	4.04	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.04	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.04	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.04	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.02		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	04	3.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen
1	01	04	3.02	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penataan PendistribusianPendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanSatuan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan
1	01	04	3.03		Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	04	4.02		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	04	4.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen
1	01	04	4.02	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penataan PendistribusianPendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanSatuan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.03		Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya			
1	01	04	4.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	3.03		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	3.03	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	3.03	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	3.04		Penerbitan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	3.04	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	3.04	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	4.03		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	4.03	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	4.03	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	4.04		Penerbitan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	4.04	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	4.04	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Kamus Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa
1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen
1	01	07	7.01	0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.03	0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen
1	01	08	7.03	0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	08	7.04	0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	3.02	0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes
1	02	02	3.02	0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orangdengan penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1	02	02	3.02	0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen
1	02	02	3.02	0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen
1	02	02	3.02	0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan	Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen
1	02	02	3.02	0062	Penanggulangan penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS	Dokumen
1	02	02	3.02	0064	Penanggulangan penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0065	Penanggulangan penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis	Dokumen
1	02	02	3.02	0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kecacingan	Dokumen
1	02	02	3.02	0067	Penanggulangan penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Dokumen
1	02	02	3.02	0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Dokumen
1	02	02	3.02	0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Dokumen
1	02	02	3.02	0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	4.02	0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes
1	02	02	4.02	0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	4.02	0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orangdengan penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1	02	02	4.02	0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen
1	02	02	4.02	0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan	Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen
1	02	02	4.02	0062	Penanggulangan penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS	Dokumen
1	02	02	4.02	0064	Penanggulangan penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta	Dokumen
1	02	02	4.02	0065	Penanggulangan penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis	Dokumen
1	02	02	4.02	0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kecacingan	Dokumen
1	02	02	4.02	0067	Penanggulangan penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Dokumen
1	02	02	4.02	0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Dokumen
1	02	02	4.02	0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang
1	02	03	3.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	3.03	0002	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	3.03	0003	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya di Daerah Terpencil di Kabupaten/Kota			
1	02	03	3.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	3.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi Tenaga Kesehatan, Khususnya di Daerah Terpencil dan/atau Rawan Konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	03	4.03		Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	4.03	0002	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	4.03	0003	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota			
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen
1	02	05	2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	Unit
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN			
1	02	07	3.01		Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	3.01	0001	Pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit
1	02	07	3.02		Dukungan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Kabupaten/Kota			
1	02	07	3.02	0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	4.01		Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	07	4.01	0001	Pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	02	07	4.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit
1	02	07	4.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	4.02		Dukungan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Kabupaten/Kota			
1	02	07	4.02	0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0019	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Terbangunnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Terehabilitasinya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0067	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	Terlaksananya Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Penampung Air Alami
1	03	02	2.01	0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Penampung Air Alami
1	03	02	2.01	0069	Revitalisasi Situ	Terlaksananya Revitalisasi Situ	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	SITU
1	03	02	2.01	0070	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Beroperasi dan Terpeliharanya Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	SITU
1	03	02	2.01	0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	03	02	2.01	0076	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Beroperasi dan Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga
1	03	02	2.01	0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Beroperasi dan Terpeliharanya Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	Danau
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0084	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Beroperasi dan Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau
1	03	02	2.01	0087	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meningkatnya Seawall dan Terbangunanya Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0090	Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Meningkatnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	2.01	0092	Peningkatan *Breakwater*	Meningkatnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	2.01	0094	Peningkatan *Check* Dam	Meningkatnya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	2.01	0096	Peningkatan Bangunan Sabo	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0099	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan *Breakwater*	Terbangunnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0104	Pembangunan *Check* Dam	Terbangunnya *Check* Dam	Jumlah *Check* Dam yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0106	Rehabilitasi *Breakwater*	Terehabilitasinya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik
1	03	02	2.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	2.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0012	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Titik
1	03	02	2.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	2.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung
1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	2.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga
1	03	02	2.02	0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Kawasan Rawa
1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Irigasi yang mendapatkan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI
1	03	02	2.02	0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	DI
1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	04	2.01	0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Desa
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M
1	03	06	2.01	0017	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya	Penyelenggara
1	03	06	2.01	0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	M
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan
1	03	06	2.01	0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Unit
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	07	2.01	0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
1	03	07	2.01	0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0008	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	2.01	0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	Unit
1	03	07	2.01	0011	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0013	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	2.01	0014	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	2.01	0016	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	2.01	0017	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	2.01	0019	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SR
1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik
1	03	07	2.01	0022	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0023	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	2.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0025	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	2.01	0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	2.01	0027	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0028	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	2.01	0029	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	2.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	2.01	0031	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga
1	03	07	2.01	0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	2.01	0035	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	2.01	0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota			
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dam utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02	0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun	Unit
1	03	07	4.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota			
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen
1	03	07	4.02	0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun	Unit
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
1	03	10	2.01	0035	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	Flyover
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan
1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM
1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	2.01	0045	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terbangunnya Terowongan/Tunnel	Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	Terowongan/Tunnel
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM
1	03	10	2.01	0047	Pembangunan Underpass	Terbangunnya Underpass	Jumlah Underpass yang Dibangun	Underpass
1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan	Jembatan yang mendapatkan Pelebaran	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Jembatan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang
1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Dokumen
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Terpantau dan Terevaluasinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Dokumen
1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen
1	03	11	3.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	4.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	4.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan	Orang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara
1	03	12	3.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.05		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.06		Pengawasan Penataan Ruang			
1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	3.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	3.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	4.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	4.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.05		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
1	03	12	4.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	4.06		Pengawasan Penataan Ruang			
1	03	12	4.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	4.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	4.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	4.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen
1	03	13	5.02	0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen
1	03	13	5.02	0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen
1	03	13	5.02	0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen
1	03	13	5.02	0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen
1	03	13	5.02	0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.03	0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit
1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
1	04	02	2.06	0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan
1	04	02	2.06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	Dokumen
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat
1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha
1	04	03	2.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit
1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang
1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	3.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	3.01	0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah
1	04	05	4.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	4.01	0009	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dokumen
1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Orang
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit
1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan
1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan
1	05	02	3.05		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota			
1	05	02	3.05	0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	3.05	0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	4.05		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota			
1	05	02	4.05	0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	4.05	0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			
1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Doumen
1	05	02	7.04	0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan
1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	laporan
1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	04	2.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	2.01	0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran			
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat
1	06	02	3.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota			
1	06	02	3.03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga
1	06	02	3.03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	3.03	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang
1	06	02	3.04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial			
1	06	02	3.04	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang
1	06	02	3.05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah			
1	06	02	3.05	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga
1	06	02	4.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota			
1	06	02	4.03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan
1	06	02	4.03	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang
1	06	02	4.04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial			
1	06	02	4.04	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang
1	06	02	4.05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah			
1	06	02	4.05	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	03	3.02		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			
1	06	03	3.02	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	03	4.02		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03	4.02	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	3.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	3.03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen
1	06	05	4.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			
1	06	05	4.03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	3.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	06	06	3.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang
1	06	06	4.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	4.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
2	07	04	3.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	3.01	0008	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan
2	07	04	3.01	0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	3.01	0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	04	3.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	3.05	0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD
2	07	04	4.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	4.01	0008	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	4.01	0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang
2	07	04	4.01	0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	04	4.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	4.05	0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Kebijakan
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembaga masy, profesi, dunia usaha, dan media	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga
2	08	02	2.02	0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota dalam pemenuhan standar layanan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Leadership/Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota	Orang
2	08	02	2.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	Unit
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Dokumen
2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen
2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang
2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	03	3.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	03	3.02	0005	Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota	Tersedianya kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	3.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
2	09	03	3.03	0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	Tersedianya Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah Yang Disusun	Peraturan Daerah
2	09	03	4.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
2	09	03	4.03	0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	Tersedianya Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah Yang Disusun	Peraturan Daerah
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	3.02		Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	3.02	0001	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	09	05	4.02		Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro			
2	09	05	4.02	0001	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	3.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	3.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	3.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			
2	10	03	3.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	03	4.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	4.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	4.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	03	7.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.02		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	05	2.01	0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan
2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	2.01	0006	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan
2	10	05	2.01	0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	06	2.01	0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	06	2.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	06	3.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	3.01	0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	4.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	4.01	0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Dokumen
2	10	07	3.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.01	0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	3.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	3.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	3.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.04	0001	Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	3.05		Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	3.06		Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.06	0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat
2	10	07	3.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	07	3.08		Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen
2	10	07	3.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	3.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan
2	10	07	3.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	3.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan
2	10	07	3.10	0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.12		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.12	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan
2	10	07	3.12	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	07	4.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.01	0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen
2	10	07	4.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	4.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan
2	10	07	4.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	4.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	4.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.04	0001	Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	4.05		Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.06		Pemberian Tanda Bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.06	0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat
2	10	07	4.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			
2	10	07	4.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.08		Kerja Sama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.			
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen
2	10	07	4.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	4.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	4.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	4.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan
2	10	07	4.10	0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	4.12		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota			
2	10	07	4.12	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.12	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah			
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	2.01	0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	Dokumen
2	10	10	3.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	3.01	0004	Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	10	4.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	4.01	0004	Perencanaan penggunaan tanah Land Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			
2	10	10	7.02	0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	0003	Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong			
2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen
2	10	13	7.01	0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	13	7.01	0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten			
2	10	14	7.01	0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	Dokumen
2	10	15	7.01	0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0003	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0002	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	17	7.01	0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan
2	10	17	7.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	17	7.01	0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen
2	11	02	2.01	0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen
2	11	02	3.02		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	3.02	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	02	4.02		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	4.02	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit
2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0006	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	M2

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
2	11	04	3.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	3.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	3.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	4.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	4.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	4.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan
2	11	05	2.01	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	05	2.01	0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen
2	11	05	2.02	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Usaha
2	11	05	2.02	0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen
2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha
2	11	06	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	3.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	4.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara
2	11	10	2.01	0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Dokumen
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dokumen
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton
2	11	11	2.01	0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Tersedianya dan beroperasinya sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta			
2	11	11	2.02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen
2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.03	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit
2	13	02	3.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	3.01	0007	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	02	3.01	0008	Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan	Dokumen
2	13	02	3.01	0009	pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	3.01	0010	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	3.01	0011	fasilitasi penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung	terfasilitasinya pemerintah kampung/kampung adat dalam penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung	jumlah peraturan kampung/kampung adat tentang kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung/kampung adat yang telah ditetapkan	Dokumen
2	13	02	4.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	4.01	0007	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	02	4.01	0008	Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	4.01	0009	pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	4.01	0010	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	4.01	0011	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	03	3.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	3.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dokumen
2	13	03	3.01	0005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Laporan
2	13	03	3.01	0006	Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	3.01	0007	Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Dokumen
2	13	03	4.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	4.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dokumen
2	13	03	4.01	0005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	4.01	0006	Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Dokumen
2	13	03	4.01	0007	Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	3.01	0019	Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	04	3.01	0020	Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0021	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0022	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat.	Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0023	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	3.01	0024	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0025	Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota;	Terlaksananya Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	04	3.01	0026	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	04	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	4.01	0019	Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	4.01	0020	Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0021	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0022	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat.	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat.	Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0023	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0024	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	4.01	0026	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
2	13	05	3.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0012	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	Dokumen
2	13	05	3.01	0013	Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Dokumen
2	13	05	3.01	0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	3.01	0015	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	4.01	0012	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	Dokumen
2	13	05	4.01	0013	Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Dokumen
2	13	05	4.01	0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0015	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			
2	13	06	3.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
2	13	06	3.01	0001	Peningkatan efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Laporan
2	13	06	3.01	0002	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.01	0003	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	06	3.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	06	3.02	0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/ Bum Perkampungan
2	13	06	3.02	0002	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	06	3.02	0003	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	06	3.03		Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.03	0001	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	06	3.03	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	06	3.03	0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/Bum Perkampungan
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			
2	13	07	4.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
2	13	07	4.01	0001	Peingkatan efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.01	0002	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan
2	13	07	4.01	0003	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	07	4.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	07	4.02	0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/ Bum Perkampungan
2	13	07	4.02	0002	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.02	0003	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	07	4.03		Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	07	4.03	0001	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	07	4.03	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	07	4.03	0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/ Bum Perkampungan
2	13	08			PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN			
2	13	08	3.01		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan
2	13	08	3.01	0002	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen
2	13	08	3.02		Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
2	13	08	3.02	0001	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	08	4.01		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan			
2	13	08	4.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	4.01	0002	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen
2	13	08	4.02		Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
2	13	08	4.02	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan
2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan
2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan
2	14	02	2.01	0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit
2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang
2	14	03	2.03	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab/Kota
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan
2	14	04	3.03		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)			
2	14	04	3.03	0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok
2	14	04	3.03	0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	unit
2	14	04	3.03	0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	4.03		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)			
2	14	04	4.03	0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok
2	14	04	4.03	0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	unit
2	14	04	4.03	0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen
2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan
2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan
2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan
2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	3.18		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	3.18	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	02	4.18		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	4.18	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.09	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.09	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.10	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen
2	15	03	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen
2	15	03	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit
2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit
2	15	03	2.13	0008	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Orang
2	15	03	2.13	0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.15	0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.17	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.17	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan
2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.18	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.18	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.19	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	3.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.12	0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan
2	15	03	3.20		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			
2	15	03	3.20	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	03	4.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	4.12	0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan
2	15	03	4.20		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	4.20	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			
2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen
2	15	04	3.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			
2	15	04	3.02	0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.02	0005	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	3.02	0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.03		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	3.03	0001	Penyediaan lahan Bandar Udara	Tersedianya lahan Bandar Udara	Jumlah lahan Bandar Udarayang tersedia	M2
2	15	04	3.03	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	3.03	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	3.03	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.03	0005	Pembangunan Lapangan Terbang	Terbangunnya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.03	0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang	Terpeliharanya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara	Unit
2	15	04	3.04		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	3.04	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	3.04	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen
2	15	04	3.05		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	3.05	0001	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen
2	15	04	3.05	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.05	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	3.05	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	4.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			
2	15	04	4.02	0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	4.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.02	0005	Pembangunan Lapangan Terbang	Terbangunnya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun	Unit
2	15	04	4.02	0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang	Terpeliharanya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara	Unit
2	15	04	4.02	0007	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.02	0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.03		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	4.03	0001	Penyediaan lahan Bandar Udara	Tersedianya lahan Bandar Udara	Jumlah lahan Bandar Udarayang tersedia	M2
2	15	04	4.03	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	4.03	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	4.03	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.04		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	4.04	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	4.04	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.05		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.05	0001	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen
2	15	04	4.05	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	4.05	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	4.05	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			
2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan
2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.04	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.07	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	3.06		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	15	05	3.06	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan	Unit
2	15	05	3.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	3.07		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	05	3.07	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	15	05	4.06		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	15	05	4.06	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan	Unit
2	15	05	4.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	4.07		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	4.07	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen
2	16	03	2.02		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi
2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen usulan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen
2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen
2	16	03	2.02	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	3.02		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	3.02	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	3.02	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase
2	16	03	3.02	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	16	03	4.02		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	4.02	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	4.02	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase
2	16	03	4.02	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	06	3.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	3.01	0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	3.01	0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat	Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi	Kelompok Pra-Koperasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	4.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	4.01	0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	4.01	0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat	Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi	Kelompok Pra-Koperasi
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	3.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/ Perkada

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.03		Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	3.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha
2	17	07	3.04		Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.04	0001	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Unit Usaha
2	17	07	4.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.03		Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha
2	17	07	4.04		Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.04	0001	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Unit Usaha
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang
2	17	08	2.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			
2	17	09	3.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi			
2	17	09	3.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok
2	17	09	3.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	3.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	17	09	4.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok
2	17	09	4.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	18	02	3.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	18	02	3.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	3.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.			
2	18	02	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	02	4.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
2	18	02	4.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	18	02	4.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	18	02	4.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	4.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	4.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Unit
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kegiatan
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	3.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	3.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan PerkumpulanOlahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	Dokumen
2	19	03	4.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	4.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah Dokumen	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	02	3.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	3.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	3.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapa PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	3.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	4.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	4.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapa PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	4.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan
2	22	05	3.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	3.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	3.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	3.02	0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yangDidaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Cagar Budaya
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	3.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	3.04	0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.04	0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	05	4.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	4.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	22	05	4.01	0006	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan cagar budaya peringkat di Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	4.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	4.02	0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yangDidaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Cagar Budaya
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	4.04		Penetapan Sistem Zonasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.04	0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	05	4.04	0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Telaksananya Penetapan Sistem zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			
2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan
2	22	07	7.01	0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianyan Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga
2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	0001	Penguatan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang
2	22	07	7.02	0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen
2	22	07	7.02	0003	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan
2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	0001	Pembinaan Kapasitas MAA	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.03	0003	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen
2	22	07	7.03	0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi	Kasus
2	22	07	7.03	0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.02	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek
2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.02	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	Objek
2	22	08	5.03		Pengelolaan Taman Budaya			
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.04	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.04	0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.04	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.05	0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen
2	22	08	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan
2	22	08	5.05	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
2	22	08	5.06	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.06	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.06	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.06	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.06	0005	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan
2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen
2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan
2	22	08	5.07	0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.07	0012	Pembinaan Jagawarga	Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang
2	22	08	5.07	0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Meningkatnya Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga
2	22	08	5.07	0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.07	0016	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Laporan
2	22	08	5.07	0017	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan
2	22	08	5.07	0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.08	0001	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.08	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.08	0003	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang
2	22	10			PROGRAM PERFILMAN NASIONAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10	4.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota			
2	22	10	4.01	0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Insan Perfil man Daerah diKabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Orang
2	22	10	4.01	0002	Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua	Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua	Jumlah Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua Yang Dilaksanakan	Lembaga
2	22	10	4.01	0003	Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kegiatan
2	22	10	4.01	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Film
2	22	10	4.01	0005	Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Jumlah Bantuan Subsidi Dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia Yang Dilaksanakan	Film

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10	4.01	0006	Penerbitan Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Tersedianya Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Jumlah Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	10	4.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Film
2	22	10	4.01	0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman yang Disediakan	Unit
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar
2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus
2	23	02	3.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	3.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	02	4.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	4.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga
2	24	02	2.01	0006	Penyusunan Database Arsiparis	Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen
2	24	02	2.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang
2	24	02	2.01	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Lembaga
2	24	02	2.01	0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	Laporan
2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip
2	24	02	2.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Naskah
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip
2	24	02	2.02	0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Dokumen
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	02	3.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			
2	24	02	3.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Lembaga
2	24	02	3.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.06		Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
2	24	02	3.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Instansi
2	24	02	3.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			
2	24	02	4.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	4.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga
2	24	02	4.06		Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
2	24	02	4.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Instansi
2	24	02	4.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP
2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	Dokumen
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.05	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	3.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	unit
3	25	03	3.07		Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			
3	25	03	3.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	3.07	0002	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.08		Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3	25	03	3.08	0001	Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.09		Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3	25	03	3.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.09	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	3.10		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	3.10	0002	Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.07		Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	4.07	0002	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Dokumen
3	25	03	4.08		Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.08	0001	Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.09		Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.09	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.10		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3	25	03	4.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.10	0002	Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Rekomendasi
3	25	04	2.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	rekomendasi
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi
3	25	04	2.03	0003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen
3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen
3	25	04	2.04	0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0008	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Unit
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang
3	25	05	2.01	0010	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	05	2.01	0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	2.01	0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha
3	25	05	3.02		Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota			
3	25	05	3.02	0001	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	05	4.02		Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota			
3	25	05	4.02	0001	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Dokumen
3	25	06	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomendasi
3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha
3	25	06	3.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.04	0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha
3	25	06	3.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.05	0001	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	3.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kap/tahun
3	25	06	3.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	Unit
3	25	06	3.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Unit
3	25	06	4.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.04	0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha
3	25	06	4.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.05	0001	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	4.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kap/tahun
3	25	06	4.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	Unit
3	25	06	4.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Unit
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Dokumen
3	26	02	2.03	0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Dokumen
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha
3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.04	0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha
3	26	02	3.05		Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota			
3	26	02	3.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	4.05		Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota			
3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi
3	26	03	3.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	3.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	03	4.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	03	4.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	4.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Pelaku Usaha
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga
3	26	04	2.02	0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Terlaksananya bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan
3	26	04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen
3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi
3	26	04	2.02	0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kebijakan
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan
3	26	05	2.02	0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga
3	26	05	2.02	0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	3.02		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	3.02	0004	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	26	05	4.02		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	4.02	0004	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton
3	27	02	2.01	0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek
3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan
3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan
3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan
3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan
3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	laporan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04	0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan
3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit
3	27	03	2.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	Unit
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.02	0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	Unit
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			
3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha
3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen
3	27	07	3.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	3.01	0007	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Laporan
3	27	07	4.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	4.01	0007	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Laporan
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
3	28	04	2.01	0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Ha
3	28	04	2.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Hektar
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
3	28	04	2.01	0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
3	28	08			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT			
3	28	08	3.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			
3	28	08	3.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	TerlaksananyaPenetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			
3	28	08	3.02	0001	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Lembaga
3	28	08	4.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	TerlaksananyaPenetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI			
3	29	02	3.01		Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)			
3	29	02	3.01	0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Jumlah dokumen keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	3.02		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.02	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.03		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi			
3	29	02	3.03	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.01		Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)			
3	29	02	4.01	0001	Inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*)	Jumlah dokumen keragaman geologi (*geodiversity*), dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	4.02		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.02	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.03		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi			
3	29	02	4.03	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	29	05	2.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	2.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	29	05	3.02		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi			
3	29	05	3.02	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.02	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen
3	29	05	3.02	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	3.02	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	3.02	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	3.03		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	3.03	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.03	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.03	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.03	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.04		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	3.04	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	3.04	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.05		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	3.05	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen
3	29	05	3.05	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	3.05	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	3.05	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.06	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.06	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.06	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.07		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			
3	29	05	3.07	0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	3.08		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
3	29	05	3.08	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	3.09		Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.09	0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	29	05	4.02		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi			
3	29	05	4.02	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	4.02	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.02	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	4.02	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	4.02	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	4.03		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	4.03	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.03	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.03	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.03	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.04		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	4.04	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	4.04	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	4.05		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.05	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen
3	29	05	4.05	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	4.05	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	4.05	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	4.06		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
3	29	05	4.06	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.06	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.06	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.06	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.06	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.06	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.07		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.07	0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	4.08		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
3	29	05	4.08	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	4.09		Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah			
3	29	05	4.09	0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.03	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.03	0003	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen
3	30	02	2.03	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	dokumen
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.04	0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen
3	30	02	2.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen
3	30	02	2.04	0003	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.04	0004	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	dokumen
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.05	0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan
3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
3	30	02	3.08		Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP			
3	30	02	3.08	0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Tersedianya Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Unit
3	30	02	3.09		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	3.09	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	02	4.08		Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP			
3	30	02	4.08	0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Tersedianya Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Unit
3	30	02	4.09		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	4.09	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit
3	30	03	2.01	0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan
3	30	03	2.01	0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	laporan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
3	30	03	3.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	3.01	0003	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan	Unit
3	30	03	4.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	4.01	0003	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan	Unit
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01	0007	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen
3	31	02	2.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan
3	31	02	2.01	0010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	3.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	Unit
3	31	02	3.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	3.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	4.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	4.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Dokumen
3	31	02	4.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	2.01		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			
3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen
3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi
3	32	02	2.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	2.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen
3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi
3	32	03	2.01	0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang
3	32	03	2.01	0011	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	2.01	0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	KK
3	32	03	2.01	0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	2.01	0015	Penampungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	KK
3	32	03	2.01	0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
3	32	03	2.01	0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Terlaksananya Penyuluhan Transmigran Sebelum Berangkat (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Orang
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK
3	32	03	2.01	0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen
4	01	02	2.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	02	2.01	0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			
4	01	04	5.01	0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.01	0002	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	04	5.01	0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga
4	01	04	5.01	0004	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	04	5.01	0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.01	0006	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen
4	01	04	5.01	0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Dokumen
4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	04	5.02	0002	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan
4	01	04	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan			
4	01	04	5.03	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.03	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Laporan
4	01	04	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	04	5.04	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.04	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	04	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.05	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	04	5.05	0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.05	0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan
4	01	04	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	Unit
4	01	04	5.08		Peningkatan Pelayanan Paramparapraja			
4	01	04	5.08	0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersusunnya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun	Rekomendasi
4	01	04	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
4	01	04	5.09	0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Lembaga
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.04	0011	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Terkelolanya Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Laporan
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan
5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga
5	03	02	2.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang
5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang
5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang
5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
5	04	02	2.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan
5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
5	04	02	2.03	0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	2.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	2.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	2.03	0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi
5	04	02	2.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan
5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	2.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan
5	05	02	2.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen
5	05	02	2.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen
5	05	02	2.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen
5	05	02	2.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen
5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah
5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi			
5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan
5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan
5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan
5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan
5	05	03	2.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi
5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan
5	05	03	2.02	0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan
5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah
5	05	03	2.02	0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	2.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisas Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.02	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen
5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	2.02	0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim			
7	01	03	7.04	0001	Penyelenggaraan Mukim	Terselenggaranya Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen
7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
7	01	03	7.04	0003	Peresmian Mukim	Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim	Dokumen
7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Imeum Mukim	Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	Laporan
7	01	03	7.04	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mukim	Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	7.03	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	7.03	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04	7.04	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan
8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
9					UNSUR KEKHUSUSAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			
9	01	02	7.01	0001	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru''yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru''yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru''yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			
9	01	02	7.02	0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Lembaga
9	01	02	7.02	0002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang
9	01	02	7.02	0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center	Orang
9	01	02	7.02	0006	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.03	0001	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya	Orang
9	01	02	7.04	0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Mesjid	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.04	0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0008	Pengiriman Khatib Jum''at Ke Gampong	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum''at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum''at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan
9	01	02	7.04	0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan
9	01	02	7.04	0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Dokumen
9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan
9	01	02	7.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.05	0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.05	0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Orang
9	01	02	7.05	0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0008	Pembinaan Qari Qariah	Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah	Orang
9	01	02	7.05	0009	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	Orang
9	01	02	7.05	0010	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan	Beasiswa
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang
9	01	02	7.06	0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang
9	01	02	7.06	0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah			
9	01	02	7.07	0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga
9	01	02	7.07	0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	0003	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0004	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0006	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	0008	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang Dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	0009	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Diterbitkannya Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen
9	01	03	7.01	0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Laporan
9	01	03	7.01	0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Laporan
9	01	03	7.01	0012	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0013	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0014	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0015	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang
9	01	03	7.02	0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	0003	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			
9	01	03	7.03	0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0002	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0003	Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0004	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03	0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang
9	01	03	7.03	0006	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	0002	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang
9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang
9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	0009	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan
9	01	04	7.03	0010	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Jumlah Guru SMA dan Sederajat yang Mendapatkan ZIS	Orang

Keterangan Kode Kekhususan:
3.01 : Provinsi Papua
4.01 : Provinsi Papua Barat
5.01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.01 : Provinsi DKI Jakarta
7.01 : Provinsi Aceh
8.01 : Provinsi Bali

D. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI - PROVINSI

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01						PELAYANAN UMUM
01	01					Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	01	X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
01	01	4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
01	01	4	01			Sekretariat Daerah
01	01	4	01	02		Program Penataan Organisasi
01	01	4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
01	01	4	01	04		Program Kesejahteraan Rakyat
01	01	4	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan
01	01	4	01	07		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
01	01	4	01	08		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
01	01	4	01	09		Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua
01	01	4	01	10		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	4	01	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
01	01	4	01	12		Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat
01	01	4	02			Sekretariat DPRD
01	01	4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
01	01	4	02	03		Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
01	01	4	02	05		Program Sekretariat DPRD Papua Barat
01	01	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	01	5	02			Keuangan
01	01	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
01	01	5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
01	01	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
01	01	8				Unsur Pemerintahan Umum
01	01	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik
01	01	8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
01	01	8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
01	01	8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
01	01	8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
01	01	8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
01	03					Pelayanan Umum
01	03	2				Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	03	2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk
01	03	2	12	03		Program Pencatatan Sipil
01	03	2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
01	03	2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
01	03	2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
01	03	2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01	03	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	03	5	01			Perencanaan
01	03	5	01	02		Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
01	03	5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
01	03	5	03			Kepegawaian
01	03	5	03	02		Program Kepegawaian Daerah
01	04					Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01	04	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	04	5	05			Penelitian dan Pengembangan
01	04	5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
01	04	5	05	03		Program Riset dan Inovasi Daerah
01	06					Pembangunan Daerah
01	06	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	06	2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01	06	2	13	02		Program Penataan Desa
01	06	2	13	03		Program Peningkatan Kerja Sama Desa
01	06	2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa
01	06	2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
01	06	2	13	06		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua
01	06	2	13	07		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat
01	06	2	13	08		Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua
01	06	7				Unsur Kewilayahan
01	06	7	01			Kecamatan Administrasi
01	06	7	01	02		Program Pengelolaan Kecamatan
01	06	7	02			Kota Administrasi
01	06	7	02	02		Program Pengelolaan Kota Administrasi
01	06	7	03			Kabupaten Administrasi
01	06	7	03	02		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan
01	90					Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
01	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	90	2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
01	90	2	24	02		Program Pengelolaan Arsip
01	90	2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
01	90	2	24	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip
01	90	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	90	5	04			Pendidikan dan Pelatihan
01	90	5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
01	90	5	06			Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	07			Pengelolaan Penghubung
01	90	5	07	02		Program Pelayanan Penghubung
01	90	6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01	90	6	01			Inspektorat Daerah
01	90	6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan
01	90	6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
01	90	9				Unsur Kekhususan
01	90	9	01			Kekhususan Aceh
01	90	9	01	02		Program Syariat Islam Aceh
01	90	9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
01	90	9	01	04		Program Baitul Mal Aceh
01	90	9	01	05		Program Reintegrasi Aceh
01	90	9	01	06		Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
01	90	9	02			Kekhususan Papua
01	90	9	02	02		Program Utama Dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua
01	90	9	03			Kekhususan Papua Barat
01	90	9	03	02		Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat
03						KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	02					Penanggulangan Bencana
03	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	02	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	02	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana
03	02	1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
03	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
03	02	1	06	06		Program Penanganan Bencana
03	03					Pembinaan Hukum
03	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	03	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	03	1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
03	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	03	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
03	03	2	17	09		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
03	03	4				Urusan Pendukung Unsur Pemerintahan
03	03	4	01			Sekretariat Daerah
03	03	4	01	05		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
04						EKONOMI
04	01					Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
04	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	01	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
04	01	2	17	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
04	01	2	17	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
04	01	2	17	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
04	01	2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
04	01	2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
04	01	2	17	08		Program Pengembangan UMKM

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	01	3				Urusan Pilihan
04	01	3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
04	01	3	30	02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
04	01	3	30	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
04	01	3	30	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
04	01	3	30	05		Program Pengembangan Ekspor
04	01	3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
04	01	3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
04	02					Tenaga Kerja
04	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	02	2	07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
04	02	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja
04	02	2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja
04	02	2	07	05		Program Hubungan Industrial
04	02	2	07	06		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
04	03					Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04	03	3				Urusan Pilihan
04	03	3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	02		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
04	03	3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
04	03	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
04	03	3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
04	03	3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
04	03	3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
04	03	3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
04	03	3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
04	03	3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
04	03	3	27	06		Program Perizinan Usaha Pertanian
04	03	3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian
04	03	3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
04	03	3	28	02		Program Perencanaan Hutan
04	03	3	28	03		Program Pengelolaan Hutan
04	03	3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
04	03	3	28	08		Program Pengelolaan Hutan Adat
04	04					Pengairan
04	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	04	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	04	1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
04	04	1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
04	05					Bahan Bakar dan Energi
04	05	3				Urusan Pilihan
04	05	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	05	3	29	04		Program Minyak dan Gas Bumi
04	05	3	29	05		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
04	05	3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
04	06					Pertambangan
04	06	3				Urusan Pilihan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	06	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	06	3	29	02		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
04	06	3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
04	07					Industri dan Konstruksi
04	07	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	07	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	07	1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung
04	07	1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
04	07	1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
04	07	3				Urusan Pilihan
04	07	3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
04	07	3	31	02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
04	07	3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
04	07	3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
04	08					Transportasi
04	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	08	1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan
04	08	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
04	08	2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
04	08	2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran
04	08	2	15	04		Program Pengelolaan Penerbangan
04	08	2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian
04	09					Telekomunikasi dan Informatika
04	09	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	09	2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
04	09	2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
04	09	2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
04	09	2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
04	09	2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
04	90					Ekonomi lainnya
04	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	90	2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
04	90	2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
04	90	2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
04	90	2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan
04	90	2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan
04	90	2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
04	90	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
04	90	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal
04	90	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal
04	90	2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
04	90	2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
04	90	2	18	07		Program Kerja Sama Penanaman Modal
05						PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05	01					Manajemen Limbah
05	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
05	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	01	1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
05	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	01	2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
05	01	2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan
05	2					Manajemen Air Limbah
05	2	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	2	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	2	1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
05	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	02	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	02	2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
05	03					Penanggulangan Polusi
05	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	03	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	03	2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
05	03	2	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
05	03	2	11	07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
05	04					Konservasi Sumber Daya Alam
05	04	3				Urusan Pilihan
05	04	3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
05	04	3	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
05	04	3	28	06		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
05	05					Tata Ruang dan Pertanahan
05	05	1				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	05	1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
05	05	1	03	13		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
05	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
05	05	2	10	03		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
05	05	2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
05	05	2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
05	05	2	10	06		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
05	05	2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat
05	05	2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong
05	05	2	10	10		Program Penatagunaan Tanah
05	05	2	10	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
05	05	2	10	12		Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah
05	05	2	10	13		Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
05	05	2	10	14		Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
05	05	2	10	15		Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau
05	05	2	10	16		Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
05	05	2	10	17		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
06						PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	01					Pengembangan Perumahan
06	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
06	01	1	03	07		Program Pengembangan Permukiman
06	01	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	01	1	04	02		Program Pengembangan Perumahan
06	01	1	04	03		Program Kawasan Permukiman
06	02					Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
06	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	02	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	02	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
06	02	1	04	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
06	03					Penyediaan Air Minum
06	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	03	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
06	03	1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
06	04					Penerangan Jalan
06	04	2				Urusan Pilihan
06	04	2	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
06	04	2	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
07						KESEHATAN
07	01					Obat dan Peralatan Kesehatan
07	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	01	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	01	1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
07	02					Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	02	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	02	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
07	03					Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	03	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	03	1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
07	04					Keluarga Berencana
07	04	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	04	2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
07	04	2	14	02		Program Pengendalian Penduduk

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
07	04	2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
07	04	2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
07	90					Kesehatan lainnya
07	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	90	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	90	1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
07	90	1	02	07		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
08						PARIWISATA
08	01					Pengembangan Pariwisata
08	01	3				Urusan Pilihan
08	01	3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
08	01	3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
08	01	3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata
08	01	3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
08	01	3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10						PENDIDIKAN
10	03					Pendidikan Menengah
10	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	03	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	03	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	03	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
10	03	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10	04	2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
10	04	2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan
10	04	2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
10	10					Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	10	2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	10	2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
10	10	2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
10	11					Pengembangan Budaya
10	11	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	11	2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
10	11	2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan
10	11	2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
10	11	2	22	04		Program Pembinaan Sejarah
10	11	2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	11	2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman
10	11	2	22	07		Program Majelis Adat Aceh (MAA)
10	11	2	22	08		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
10	11	2	22	09		Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
10	11	2	22	10		Program Perfilman Nasional
10	90					Pendidikan Lainnya
10	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	90	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	90	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
10	90	1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
10	90	1	01	02	3.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
10	90	1	01	02	4.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
10	90	1	01	02	3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas
10	90	1	01	02	4.04	Pengelolaan Akademi Komunitas
10	90	1	01	02	3.05	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas
10	90	1	01	02	4.05	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas
10	90	1	01	02	3.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan bagi OAP
10	90	1	01	02	4.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan bagi OAP
10	90	1	01	02	3.07	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan
10	90	1	01	02	4.07	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan
10	90	1	01	02	3.08	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan
10	90	1	01	02	4.08	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan
10	90	1	01	03		Program Pengembangan Kurikulum
10	90	1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	90	1	01	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
10	90	1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
10	90	1	01	07		Program Pendidikan Dayah
10	90	1	01	08		Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
11						PERLINDUNGAN SOSIAL
11	01					Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	01	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	01	1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial
11	02					Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
11	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	02	1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial
11	04					Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	04	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	04	1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	05					Pemberdayaan Perempuan
11	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	05	2	08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	05	2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
11	05	2	08	03		Program Perlindungan Perempuan
11	05	2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11	05	2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11	05	2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	05	2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak
11	08					Bantuan dan Jaminan Sosial
11	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	08	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	08	1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
11	90					Perlindungan Sosial lainnya
11	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	90	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
11	90	1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
11	90	3				Urusan Pilihan
11	90	3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
11	90	3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
11	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	90	2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
11	90	2	23	04		Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan
11	90	2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
11	90	2	24	05		Program Akreditasi dan Sertifikasi

Kode Kekhususan:
3.01 : Provinsi Papua
4.01 : Provinsi Papua Barat
5.01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.01 : Provinsi DKI Jakarta
7.01 : Provinsi Aceh
8.01 : Provinsi Bali

E. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI - KABUPATEN/KOTA

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01						PELAYANAN UMUM
01	01					Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	01	X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
01	01	4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
01	01	4	01			Sekretariat Daerah
01	01	4	01	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
01	01	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan
01	01	4	01	04		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	4	02			Sekretariat DPRD
01	01	4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
01	01	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	01	5	02			Keuangan
01	01	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
01	01	5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
01	01	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
01	01	8				Unsur Pemerintahan Umum
01	01	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik
01	01	8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
01	01	8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
01	01	8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
01	01	8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
01	01	8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
01	03					Pelayanan Umum
01	03	2				Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	03	2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk
01	03	2	12	03		Program Pencatatan Sipil
01	03	2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
01	03	2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
01	03	2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
01	03	2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
01	03	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	03	5	01			Perencanaan
01	03	5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
01	03	5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
01	03	5	03			Kepegawaian
01	03	5	03	02		Program Kepegawaian Daerah

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01	04					Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01	04	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	04	5	05			Penelitian dan Pengembangan
01	04	5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
01	04	5	05	03		Program Riset dan Inovasi Daerah
01	06					Pembangunan Daerah
01	06	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	06	2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01	06	2	13	02		Program Penataan Desa
01	06	2	13	03		Program Peningkatan Kerja Sama Desa
01	06	2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa
01	06	2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
01	06	2	13	06		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua
01	06	2	13	07		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat
01	06	2	13	08		Program Peembangunan Kampung dan Perkampungan
01	06	7				Unsur Kewilayahan
01	06	7	01			Kecamatan
01	06	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
01	06	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
01	06	7	01	04		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
01	06	7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
01	06	7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
01	90					Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
01	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	90	2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
01	90	2	24	02		Program Pengelolaan Arsip
01	90	2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
01	90	2	24	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip
01	90	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	90	5	04			Pendidikan dan Pelatihan
01	90	5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
01	90	5	06			Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan
01	90	6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
01	90	6	01			Inspektorat Daerah
01	90	6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan
01	90	6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
01	90	9				Unsur Kekhususan
01	90	9	01			Kekhususan Aceh
01	90	9	01	02		Program Syariat Islam Aceh
01	90	9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
01	90	9	01	04		Program Baitul Mal
03						KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	02					Penanggulangan Bencana
03	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	02	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
03	02	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana
03	02	1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
03	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
03	02	1	06	06		Program Penanganan Bencana
03	03					Pembinaan Hukum
03	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	03	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	03	1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
03	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	03	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
03	03	2	17	09		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
04						EKONOMI
04	01					Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
04	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	01	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
04	01	2	17	02		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
04	01	2	17	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
04	01	2	17	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
04	01	2	17	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
04	01	2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
04	01	2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
04	01	2	17	08		Program Pengembangan UMKM
04	01	3				Urusan Pilihan
04	01	3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
04	01	3	30	02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
04	01	3	30	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
04	01	3	30	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
04	01	3	30	05		Program Pengembangan Ekspor
04	01	3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
04	01	3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
04	02					Tenaga Kerja
04	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	02	2	07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
04	02	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja
04	02	2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja
04	02	2	07	05		Program Hubungan Industrial
04	03					Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04	03	3				Urusan Pilihan
04	03	3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
04	03	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
04	03	3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	03	3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
04	03	3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
04	03	3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
04	03	3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
04	03	3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
04	03	3	27	06		Program Perizinan Usaha Pertanian
04	03	3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian
04	03	3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
04	03	3	28	08		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
04	04					Pengairan
04	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	04	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	04	1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
04	04	1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
04	05					Bahan Bakar dan Energi
04	05	3				Urusan Pilihan
04	05	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	05	3	29	05		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
04	06					Pertambangan
04	06	3				Urusan Pilihan
04	06	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	06	3	29	02		Program Pengelolaan Aspek Geologi
04	07					Industri dan Konstruksi
04	07	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	07	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	07	1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung
04	07	1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
04	07	1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
04	07	3				Urusan Pilihan
04	07	3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
04	07	3	31	02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
04	07	3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
04	07	3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
04	08					Transportasi
04	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	08	1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan
04	08	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
04	08	2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
04	08	2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran
04	08	2	15	04		Program Pengelolaan Penerbangan
04	08	2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian
04	09					Telekomunikasi dan Informatika
04	09	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	09	2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
04	09	2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	09	2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
04	09	2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
04	09	2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
04	90					Ekonomi lainnya
04	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	90	2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
04	90	2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
04	90	2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
04	90	2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan
04	90	2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan
04	90	2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
04	90	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
04	90	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal
04	90	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal
04	90	2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
04	90	2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
05						PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05	01					Manajemen Limbah
05	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	01	1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
05	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	01	2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
05	01	2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan
05	02					Manajemen Air Limbah
05	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	02	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	02	1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
05	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	02	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	02	2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
05	03					Penanggulangan Polusi
05	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	03	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	03	2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
05	03	2	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
05	03	2	11	07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
05	04					Konservasi Sumber Daya Alam
05	04	3				Urusan Pilihan
05	04	3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
05	04	3	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
05	05					Tata Ruang dan Pertanahan
05	05	1				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	05	1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
05	05	1	03	13		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
05	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
05	05	2	10	03		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
05	05	2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
05	05	2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
05	05	2	10	06		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
05	05	2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat
05	05	2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong
05	05	2	10	09		Program Penggelolaan Izin Membuka Tanah
05	05	2	10	10		Program Penatagunaan Tanah
05	05	2	10	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
05	05	2	10	12		Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah
05	05	2	10	13		Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
05	05	2	10	14		Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan
05	05	2	10	15		Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau
05	05	2	10	16		Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
05	05	2	10	17		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
06						PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	01					Pengembangan Perumahan
06	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
06	01	1	03	07		Program Pengembangan Permukiman
06	01	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	01	1	04	02		Program Pengembangan Perumahan
06	01	1	04	03		Program Kawasan Permukiman
06	01	1	04	04		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
06	02					Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
06	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	02	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	02	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
06	02	1	04	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
06	03					Penyediaan Air Minum
06	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	03	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
06	03	1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
07						KESEHATAN
07	01					Obat dan Peralatan Kesehatan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
07	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	01	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	01	1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
07	02					Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	02	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	02	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
07	03					Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	03	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	03	1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
07	04					Keluarga Berencana
07	04	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	04	2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
07	04	2	14	02		Program Pengendalian Penduduk
07	04	2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
07	04	2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
07	90					Kesehatan lainnya
07	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	90	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	90	1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
07	90	1	02	07		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
08						PARIWISATA
08	01					Pengembangan Pariwisata
08	01	3				Urusan Pilihan
08	01	3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
08	01	3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
08	01	3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata
08	01	3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
08	01	3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10						PENDIDIKAN
10	01					Pendidikan Anak Usia Dini
10	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	01	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	01	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	01	1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10	01	1	01	02	3.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10	02					Pendidikan Dasar
10	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	02	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	02	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	02	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10	02	1	01	02	3.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10	02	1	01	02	4.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10	02	1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
10	02	1	01	02	3.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
10	02	1	01	02	4.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
10	02	1	01	02	3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
10	02	1	01	02	4.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
10	02	1	01	02	3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10	02	1	01	02	4.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10	04					Pendidikan Nonformal dan Informal
10	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	04	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	04	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	04	1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10	04	1	01	02	3.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10	04	2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
10	04	2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan
10	04	2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
10	10					Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	10	2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	10	2	19	03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
10	10	2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
10	11					Pengembangan Budaya
10	11	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	11	2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
10	11	2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan
10	11	2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
10	11	2	22	04		Program Pembinaan Sejarah
10	11	2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	11	2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman
10	11	2	22	07		Program Majelis Adat Aceh (MAA)
10	11	2	22	08		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
10	11	2	22	10		Program Perfilman Indonesia
10	90					Pendidikan Lainnya
10	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	90	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	90	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	90	1	01	02	3.07	Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus bagi OAP
10	90	1	01	02	4.07	Penyediaan Pendidikan Layanan Khusus bagi OAP
10	90	1	01	02	3.08	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota
10	90	1	01	02	4.08	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota
10	90	1	01	02	3.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota
10	90	1	01	02	4.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota
10	90	1	01	03		Program Pengembangan Kurikulum
10	90	1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	90	1	01	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
10	90	1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
10	90	1	01	07		Program Pendidikan Dayah

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
10	90	1	01	08		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh
11						PERLINDUNGAN SOSIAL
11	01					Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	01	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	01	1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial
11	02					Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
11	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	02	1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial
11	04					Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	04	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	04	1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	05					Pemberdayaan Perempuan
11	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	05	2	08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	05	2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
11	05	2	08	03		Program Perlindungan Perempuan
11	05	2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11	05	2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11	05	2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	05	2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak
11	08					Bantuan dan Jaminan Sosial
11	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	08	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	08	1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
11	90					Perlindungan Sosial lainnya
11	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	90	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	90	1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
11	90	3				Urusan Pilihan
11	90	3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
11	90	3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kode Kekhususan:
3.01 : Provinsi Papua
4.01 : Provinsi Papua Barat
5.01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.01 : Provinsi DKI Jakarta
7.01 : Provinsi Aceh
8.01 : Provinsi Bali

F. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.1	Pendidikan	1:1	0:0	0:0	01		Dinas Pendidikan
		1:1	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:1	0:0	0:0	01	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	2:22	0:0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1:1	2:22	0:0	02	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	2:22	0:0	02	XXXX	UPTD
		1:1	2:22	0:0	02	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	2:19	0:0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1:1	2:19	0:0	03	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	2:19	0:0	03	XXXX	UPTD
		1:1	2:19	0:0	03	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	3.26	0:0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1:1	3.26	0:0	04	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	3.26	0:0	04	XXXX	UPTD
		1:1	3.26	0:0	04	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	2:22	2:19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1:1	2:22	2:19	05	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	2:22	2:19	05	XXXX	UPTD
		1:1	2:22	2:19	05	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	2:22	3:26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1:1	2:22	3:26	06	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	2:22	3:26	06	XXXX	UPTD
		1:1	2:22	3:26	06	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	2:19	3:26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1:1	2:19	3:26	07	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1:1	2:19	3:26	07	XXXX	UPTD
		1:1	2:19	3:26	07	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1:1	0:0	0:0	08		Dinas Pendidikan Dayah******)
		1:1	0:0	0:0	09		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh******)
1.2	Kesehatan	1:2	0:0	0:0	01		Dinas Kesehatan
		1:2	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:2	0:0	0:0	01	XXXX	RSUD
		1:2	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:8	0:0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1:2	2:8	0:0	02	XXXX	RSUD
		1:2	2:8	0:0	02	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:14	0:0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1:2	2:14	0:0	03	XXXX	RSUD
		1:2	2:14	0:0	03	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:12	0:0	04		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:2	2:12	0:0	04	XXXX	RSUD
		1:2	2:12	0:0	04	XXXX	UPTD selain RSUD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1:2	2:13	0:0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:2	2:13	0:0	05	XXXX	RSUD
		1:2	2:13	0:0	05	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:8	2:14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1:2	2:8	2:14	06	XXXX	RSUD
		1:2	2:8	2:14	06	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:8	2:12	07		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:2	2:8	2:12	07	XXXX	RSUD
		1:2	2:8	2:12	07	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:8	2:13	08		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:2	2:8	2:13	08	XXXX	RSUD
		1:2	2:8	2:13	08	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:14	2:12	09		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:2	2:14	2:12	09	XXXX	RSUD
		1:2	2:14	2:12	09	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:14	2:13	10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:2	2:14	2:13	10	XXXX	RSUD
		1:2	2:14	2:13	10	XXXX	UPTD selain RSUD
		1:2	2:12	2:13	11		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:2	2:12	2:13	11	XXXX	RSUD
		1:2	2:12	2:13	11	XXXX	UPTD selain RSUD
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1:3	0:0	0:0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1:3	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1:3	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1:3	0:0	0:0	03	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
		1:3	0:0	0:0	04	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1:3	0:0	0:0	05	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1:3	0:0	0:0	06	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1:3	0:0	0:0	07	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1:3	0:0	0:0	08	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1:3	0:0	0:0	09	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	10		Dinas Bina Marga*****)
		1:3	0:0	0:0	10	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:3	0:0	0:0	10	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	11		Dinas Sumber Daya Air*****)
		1:3	0:0	0:0	11	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:3	0:0	0:0	11	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	12		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan*****)
		1:3	0:0	0:0	12	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:3	0:0	0:0	12	XXXX	UPTD
		1:3	0:0	0:0	13		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam****)
		1:3	0:0	0:0	13	XXXX	UPTD
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1:4	0:0	0:0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1:4	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:4	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	0:0	02		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1:4	2:10	0:0	02	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	0:0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		1:4	2:15	0:0	03	XXXX	UPTD
		1:4	2:11	0:0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		1:4	2:11	0:0	04	XXXX	UPTD
		1:4	3:28	0:0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kehutanan
		1:4	3:28	0:0	05	XXXX	UPTD
		1:4	2:9	0:0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pangan
		1:4	2:9	0:0	06	XXXX	UPTD
		1:4	3:27	0:0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1:4	3:27	0:0	07	XXXX	UPTD
		1:4	3:25	0:0	08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	3:25	0:0	08	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	2:15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1:4	2:10	2:15	09	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	2:11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1:4	2:10	2:11	10	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	3:28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1:4	2:10	3:28	11	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1:4	2:10	2:9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1:4	2:10	2:9	12	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	3:27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1:4	2:10	3:27	13	XXXX	UPTD
		1:4	2:10	3:25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	2:10	3:25	14	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	2:11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1:4	2:15	2:11	15	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	3:28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1:4	2:15	3:28	16	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	2:9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1:4	2:15	2:9	17	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	3:27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1:4	2:15	3:27	18	XXXX	UPTD
		1:4	2:15	3:25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	2:15	3:25	19	XXXX	UPTD
		1:4	2:11	3:28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1:4	2:11	3:28	20	XXXX	UPTD
		1:4	2:11	2:9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pangan
		1:4	2:11	2:9	21	XXXX	UPTD
		1:4	2:11	3:27	22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		1:4	2:11	3:27	22	XXXX	UPTD
		1:4	2:11	3:25	23		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	2:11	3:25	23	XXXX	UPTD
		1:4	3:28	2:9	24		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pangan
		1:4	3:28	2:9	24	XXXX	UPTD
		1:4	3:28	3:27	25		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pertanian
		1:4	3:28	3:27	25	XXXX	UPTD
		1:4	3:28	3:25	26		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	3:28	3:25	26	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1:4	2:9	3:27	27		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan dan Pertanian
		1:4	2:9	3:27	27	XXXX	UPTD
		1:4	2:9	3:25	28		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	2:9	3:25	28	XXXX	UPTD
		1:4	3:27	3:25	29		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		1:4	3:27	3:25	29	XXXX	UPTD
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1:5	0:0	0:0	01		Satuan Polisi Pamongpraja
		1:5	0:0	0:0	01	XXXX	Satuan Polisi Pamongpraja Kota/Kabupaten Administrasi *****)
		1:5	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1:5	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	03		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		1:5	0:0	0:0	03	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1:5	0:0	0:0	04	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	05		Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah
		1:5	0:0	0:0	05	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	06		Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana
		1:5	0:0	0:0	06	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	07		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah******)
		1:5	0:0	0:0	07	XXXX	UPTD
		1:5	0:0	0:0	08		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan *****)
		1:5	0:0	0:0	08	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:5	0:0	0:0	08	XXXX	UPTD
1.6	Sosial	1:6	0:0	0:0	01		Dinas Sosial
		1:6	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1:6	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		1:6	2:8	0:0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1:6	2:8	0:0	02	XXXX	UPTD
		1:6	2:14	0:0	03		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1:6	2:14	0:0	03	XXXX	UPTD
		1:6	2:12	0:0	04		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:6	2:12	0:0	04	XXXX	UPTD
		1:6	2:13	0:0	05		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:6	2:13	0:0	05	XXXX	UPTD
		1:6	2:8	2:14	06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1:6	2:8	2:14	06	XXXX	UPTD
		1:6	2:8	2:12	07		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:6	2:8	2:12	07	XXXX	UPTD
		1:6	2:8	2:13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:6	2:8	2:13	08	XXXX	UPTD
		1:6	2:14	2:12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1:6	2:14	2:12	09	XXXX	UPTD
		1:6	2:14	2:13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:6	2:14	2:13	10	XXXX	UPTD
		1:6	2:12	2:13	11		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1:6	2:12	2:13	11	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.7	Tenaga Kerja	2:7	0:0	0:0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2:7	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2:8	0:0	0:0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2:8	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:8	2:14	0:0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2:8	2:14	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:8	2:12	0:0	03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2:8	2:12	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:8	2:13	0:0	04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:8	2:13	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:8	2:14	2:12	05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2:8	2:14	2:12	05	XXXX	UPTD
		2:8	2:14	2:13	06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:8	2:14	2:13	06	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:8	2:14	2:13	06	XXXX	UPTD
		2:8	2:12	2:13	07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:8	2:12	2:13	07	XXXX	UPTD
2.9	Pangan	2:9	0:0	0:0	01		Dinas Ketahanan Pangan
		2:9	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:9	0:0	0:0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2:9	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
2.10	Pertanahan	2:10	0:0	0:0	01		Dinas Pertanahan
		2:10	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	0:0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2:10	2:15	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:10	2:11	0:0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2:10	2:11	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:10	3:28	0:0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2:10	3:28	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:10	2:9	0:0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2:10	2:9	0:0	05	XXXX	UPTD
		2:10	3:27	0:0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2:10	3:27	0:0	06	XXXX	UPTD
		2:10	3:25	0:0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2:10	3:25	0:0	07	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	2:11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2:10	2:15	2:11	08	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	3:28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2:10	2:15	3:28	09	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	2:9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan
		2:10	2:15	2:9	10	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	3:27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2:10	2:15	3:27	11	XXXX	UPTD
		2:10	2:15	3:25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2:10	2:15	3:25	12	XXXX	UPTD
		2:10	2:11	3:28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2:10	2:11	3:28	13	XXXX	UPTD
		2:10	2:11	2:9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2:10	2:11	2:9	14	XXXX	UPTD
		2:10	2:11	3:27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2:10	2:11	3:27	15	XXXX	UPTD
		2:10	2:11	3:25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2:10	2:11	3:25	16	XXXX	UPTD
		2:10	3:28	2:9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2:10	3:28	2:9	17	XXXX	UPTD
		2:10	3:28	3:27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2:10	3:28	3:27	18	XXXX	UPTD
		2:10	3:28	3:25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2:10	3:28	3:25	19	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:10	2:9	3:27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2:10	2:9	3:27	20	XXXX	UPTD
		2:10	2:9	3:25	21		Dinas Pertanahan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2:10	2:9	3:25	21	XXXX	UPTD
		2:10	3:27	3:25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2:10	3:27	3:25	22	XXXX	UPTD
		2:10	3:27	3:25	23		Dinas Pertanahan Aceh******)
		2:10	3:27	3:25	23	XXXX	UPTD
2.11	Lingkungan Hidup	2:11	0:0	0:0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2:11	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:11	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:11	3:28	0:0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2:11	3:28	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:11	2:9	0:0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2:11	2:9	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:11	3:27	0:0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2:11	3:27	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:11	3:25	0:0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2:11	3:25	0:0	05	XXXX	UPTD
		2:11	3:28	2:9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2:11	3:28	2:9	06	XXXX	UPTD
		2:11	3:28	3:27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
		2:11	3:28	3:27	07	XXXX	UPTD
		2:11	3:28	3:25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2:11	3:28	3:25	08	XXXX	UPTD
		2:11	2:9	3:27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2:11	2:9	3:27	09	XXXX	UPTD
		2:11	2:9	3:25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2:11	2:9	3:25	10	XXXX	UPTD
		2:11	3:27	3:25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2:11	3:27	3:25	11	XXXX	UPTD
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2:12	0:0	0:0	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2:12	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:12	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:12	2:13	0:0	02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:12	2:13	0:0	02	XXXX	UPTD
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2:13	0:0	0:0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:13	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:13	0:0	0:0	02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung*)
		2:13	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2:14	0:0	0:0	01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2:14	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:14	2:12	0:0	02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2:14	2:12	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:14	2:13	0:0	03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:14	2:13	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:14	2:12	2:13	04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2:14	2:12	2:13	04	XXXX	UPTD
2.15	Perhubungan	2:15	0:0	0:0	01		Dinas Perhubungan
		2:15	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:15	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:15	2:11	0:0	02		Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2:15	2:11	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:15	3:28	0:0	03		Dinas Perhubungan dan Kehutanan
		2:15	3:28	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:15	2:9	0:0	04		Dinas Perhubungan dan Pangan
		2:15	2:9	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:15	3:27	0:0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2:15	3:27	0:0	05	XXXX	UPTD
		2:15	3:25	0:0	06		Dinas Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2:15	3:25	0:0	06	XXXX	UPTD
		2:15	2:11	3:28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2:15	2:11	3:28	07	XXXX	UPTD
		2:15	2:11	2:9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2:15	2:11	2:9	08	XXXX	UPTD
		2:15	2:11	3:27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2:15	2:11	3:27	09	XXXX	UPTD
		2:15	2:11	3:25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2:15	2:11	3:25	10	XXXX	UPTD
		2:15	3:28	2:9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan
		2:15	3:28	2:9	11	XXXX	UPTD
		2:15	3:28	3:27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian
		2:15	3:28	3:27	12	XXXX	UPTD
		2:15	3:28	3:25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2:15	3:28	3:25	13	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:15	2:9	3:27	14		Dinas Perhubungan, Pangan dan Pertanian
		2:15	2:9	3:27	14	XXXX	UPTD
		2:15	2:9	3:25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2:15	2:9	3:25	15	XXXX	UPTD
		2:15	3:27	3:25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2:15	3:27	3:25	16	XXXX	UPTD
2.16	Komunikasi dan Informatika	2:16	0:0	0:0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2:16	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:16	2:20	0:0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2:16	2:20	0:0	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:16	2:20	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:16	2:21	0:0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2:16	2:21	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:16	2:20	2:21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2:16	2:20	2:21	04	XXXX	UPTD
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2:17	0:0	0:0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2:17	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:17	3:31	0:0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2:17	3:31	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:17	3:30	0:0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		2:17	3:30	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:17	3:29	0:0	04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:17	3:29	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:17	3:32	0:0	05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2:17	3:32	0:0	05	XXXX	UPTD
		2:17	2:7	0:0	06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2:17	2:7	0:0	06	XXXX	UPTD
		2:17	3:31	3:30	07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2:17	3:31	3:30	07	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:17	3:31	3:30	07	XXXX	UPTD
		2:17	3:31	3:29	08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:17	3:31	3:29	08	XXXX	UPTD
		2:17	3:31	3:32	09		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2:17	3:31	3:32	09	XXXX	UPTD
		2:17	3:31	2:7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2:17	3:31	2:7	10	XXXX	UPTD
		2:17	3:30	3:29	11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:17	3:30	3:29	11	XXXX	UPTD
		2:17	3:30	3:32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2:17	3:30	3:32	12	XXXX	UPTD
		2:17	3:30	2:7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2:17	3:30	2:7	13	XXXX	UPTD
		2:17	3:29	3:32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2:17	3:29	3:32	14	XXXX	UPTD
		2:17	3:29	2:7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2:17	3:29	2:7	15	XXXX	UPTD
		2:17	3:32	2:7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2:17	3:32	2:7	16	XXXX	UPTD
2.18	Penanaman Modal	2:18	0:0	0:0	01		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2:18	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:18	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	0:0	02		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2:18	2:17	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:18	3:31	0:0	03		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian
		2:18	3:31	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:18	3:30	0:0	04		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan
		2:18	3:30	0:0	04	XXXX	UPTD
		2:18	3:29	0:0	05		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:18	3:29	0:0	05	XXXX	UPTD
		2:18	3:32	0:0	06		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi
		2:18	3:32	0:0	06	XXXX	UPTD
		2:18	2:7	0:0	07		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		2:18	2:7	0:0	07	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	3:31	08		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2:18	2:17	3:31	08	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	3:30	09		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2:18	2:17	3:30	09	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	3:29	10		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:18	2:17	3:29	10	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	3:32	11		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:18	2:17	3:32	11	XXXX	UPTD
		2:18	2:17	2:7	12		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2:18	2:17	2:7	12	XXXX	UPTD
		2:18	3:31	3:30	13		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
		2:18	3:31	3:30	13	XXXX	UPTD
		2:18	3:31	3:29	14		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:18	3:31	3:29	14	XXXX	UPTD
		2:18	3:31	3:32	15		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Transmigrasi
		2:18	3:31	3:32	15	XXXX	UPTD
		2:18	3:31	2:7	16		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2:18	3:31	2:7	16	XXXX	UPTD
		2:18	3:30	3:29	17		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2:18	3:30	3:29	17	XXXX	UPTD
		2:18	3:30	3:32	18		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Transmigrasi
		2:18	3:30	3:32	18	XXXX	UPTD
		2:18	3:30	2:7	19		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2:18	3:30	2:7	19	XXXX	UPTD
		2:18	3:29	3:32	20		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2:18	3:29	3:32	20	XXXX	UPTD
		2:18	3:29	2:7	21		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2:18	3:29	2:7	21	XXXX	UPTD
		2:18	3:32	2:7	22		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2:18	3:32	2:7	22	XXXX	UPTD
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	2:19	0:0	0:0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2:19	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:19	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:19	3:26	0:0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2:19	3:26	0:0	02	XXXX	UPTD
2.20	Statistik	2:20	0:0	0:0	01		Dinas Statistik
		2:20	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:20	2:21	0:0	02		Dinas Statistik dan Persandian
		2:20	2:21	0:0	02	XXXX	UPTD
2.21	Persandian	2:21	0:0	0:0	01		Dinas Persandian
		2:21	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
2.22	Kebudayaan	2:22	0:0	0:0	01		Dinas Kebudayaan
		2:22	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:22	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2:22	2:19	0:0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		2:22	2:19	0:0	02	XXXX	UPTD
		2:22	3:26	0:0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2:22	3:26	0:0	03	XXXX	UPTD
		2:22	2:19	3:26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2:22	2:19	3:26	04	XXXX	UPTD
		2:22	0:0	0:0	05		Sekretariat Majelis Adat Aceh******)
		2:22	0:0	0:0	06		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat*******)
		2:22	0:0	0:0	06	XXXX	UPTD
2.23	Perpustakaan	2:23	0:0	0:0	01		Dinas Perpustakaan
		2:23	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		2:23	2:24	0:0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2:23	2:24	0:0	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		2:23	2:24	0:0	02	XXXX	UPTD
2.24	Kearsipan	2:24	0:0	0:0	01		Dinas Kearsipan
		2:24	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Kelautan dan Perikanan	3:25	0:0	0:0	01		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3:25	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:25	2:9	3:27	02		Dinas Kelautan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian*****)
		3:25	2:9	3:27	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		3:25	2:9	3:27	02	XXXX	UPTD
3.26	Pariwisata	3:26	0:0	0:0	01		Dinas Pariwisata
		3:26	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		3:26	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
3.27	Pertanian	3:27	0:0	0:0	01		Dinas Pertanian
		3:27	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	02		Dinas Tanaman Pangan
		3:27	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	03		Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan
		3:27	0:0	0:0	03	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	04		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3:27	0:0	0:0	04	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	05		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3:27	0:0	0:0	05	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	06		Dinas Perkebunan
		3:27	0:0	0:0	06	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	07		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		3:27	0:0	0:0	07	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	08		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3:27	0:0	0:0	08	XXXX	UPTD
		3:27	0:0	0:0	09		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		3:27	0:0	0:0	09	XXXX	UPTD
3.28	Kehutanan	3:28	0:0	0:0	01		Dinas Kehutanan
		3:28	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:28	2:9	0:0	02		Dinas Kehutanan dan Pangan
		3:28	2:9	0:0	02	XXXX	UPTD
		3:28	3:27	0:0	03		Dinas Kehutanan dan Pertanian
		3:28	3:27	0:0	03	XXXX	UPTD
		3:28	3:25	0:0	04		Dinas Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		3:28	3:25	0:0	04	XX	UPTD
		3:28	2:9	3:27	05		Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian
		3:28	2:9	3:27	05	XXXX	UPTD
		3:28	2:9	3:25	06		Dinas Kehutanan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		3:28	2:9	3:25	06	XXXX	UPTD
		3:28	3:27	3:25	07		Dinas Kehutanan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		3:28	3:27	3:25	07	XXXX	UPTD
		3:28	0:0	0:0	08		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota*****)
		3:28	0:0	0:0	08	XXXX	Suku Dinas*****)
		3:28	0:0	0:0	08	XXXX	UPTD
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3:29	0:0	0:0	01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3:29	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:29	3:32	0:0	02		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3:29	3:32	0:0	02	XXXX	UPTD
		3:29	2:7	0:0	03		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3:29	3:32	2:7	04		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3:29	3:32	2:7	04	XXXX	UPTD
3.30	Perdagangan	3:30	0:0	0:0	01		Dinas Perdagangan
		3:30	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:30	3:29	0:0	02		Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3:30	3:29	0:0	02	XXXX	UPTD
		3:30	3:32	0:0	03		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		3:30	3:32	0:0	03	XXXX	UPTD
		3:30	2:7	0:0	04		Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3:30	2:7	0:0	04	XXXX	UPTD
		3:30	3:29	3:32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
		3:30	3:29	3:32	05	XXXX	UPTD
		3:30	3:29	2:7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3:30	3:29	2:7	06	XXXX	UPTD
		3:30	3:32	2:7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3:30	3:32	2:7	07	XXXX	UPTD
3.31	Perindustrian	3:31	0:0	0:0	01		Dinas Perindustrian
		3:31	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:31	0:0	0:0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3:31	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
		3:31	0:0	0:0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3:31	0:0	0:0	03	XXXX	UPTD
		3:31	3:32	0:0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3:31	3:32	0:0	04	XXXX	UPTD
		3:31	2:7	0:0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3:31	2:7	0:0	05	XXXX	UPTD
		3:31	3:30	3:29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3:31	3:30	3:29	06	XXXX	UPTD
		3:31	3:30	3:32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3:31	3:30	3:32	07	XXXX	UPTD
		3:31	3:30	2:7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3:31	3:30	2:7	08	XXXX	UPTD
		3:31	3:29	3:32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3:31	3:29	3:32	09	XXXX	UPTD
		3:31	3:29	2:7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3:31	3:29	2:7	10	XXXX	UPTD
		3:31	3:32	2:7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3:31	3:32	2:7	11	XXXX	UPTD
3.32	Transmigrasi	3:32	0:0	0:0	01		Dinas Transmigrasi
		3:32	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		3:32	2:7	0:0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3:32	2:7	0:0	02	XXXX	UPTD
NO	UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		UNSUR PENDUKUNG					
4.1	Sekretariat Daerah	4:1	0:0	0:0	01		Sekretariat Daerah
		4:1	0:0	0:0	01	XX	Biro
4.2	Sekretariat DPRD	4:2	0:0	0:0	01		Sekretariat DPRD
		4:2	0:0	0:0	01	XX	Bagian
		4:2	0:0	0:0	02		Sekretariat DPR Aceh******)
		4:2	0:0	0:0	03		Sekretariat DPR Papua**)
		4:2	0:0	0:0	04		Sekretariat DPR Papua Barat***)

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
UNSUR PENUNJANG							
5.1	Perencanaan	5:1	0:0	0:0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5:1	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5:1	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		5:1	5:5	0:0	02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5:1	5:5	0:0	02	XXXX	UPTD
		5:1	5:8	0:0	03		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
		5:1	5:8	0:0	03	XXXX	UPTD
5.2	Keuangan	5:2	0:0	0:0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5:2	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5:2	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5:2	0:0	0:0	03	XXXX	Suku Badan*****)
		5:2	0:0	0:0	03	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5:2	0:0	0:0	04	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	05		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*****)
		5:2	0:0	0:0	05	XXXX	Suku Badan*****)
		5:2	0:0	0:0	05	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	07		Badan Pengelolaan Aset Daerah*****)
		5:2	0:0	0:0	07	XXXX	Suku Badan*****)
		5:2	0:0	0:0	07	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	08		Badan Pembinaan BUMD*****)
		5:2	0:0	0:0	08	XXXX	Suku Badan*****)
		5:2	0:0	0:0	08	XXXX	UPTD
		5:2	0:0	0:0	09		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa*****)
		5:2	0:0	0:0	09	XXXX	Suku Badan*****)
		5:2	0:0	0:0	09	XXXX	UPTD
5.3	Kepegawaian	5:3	0:0	0:0	01		Badan Kepegawaian Daerah
		5:3	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5:3	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	5:4	0:0	0:0	01		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5:4	0:0	0:0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5:4	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		5:4	0:0	0:0	02		Badan Pendidikan dan Pelatihan****)
		5:4	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD
5.5	Penelitian dan Pengembangan	5:5	0:0	0:0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5:5	0:0	0:0	01	XXXX	UPTD
		5:5	0:0	0:0	02		Badan Riset dan Inovasi Daerah*******)
		5:5	0:0	0:0	02	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
5.6	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5:6	0:0	0:0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
5.7	Penghubung	5:7	0:0	0:0	01		Badan Penghubung
5.8	Riset dan Inovasi Daerah	5:8	0:0	0:0	01		Badan Riset dan Inovasi Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
6.1	Inspektorat	6:1	0:0	0:0	01		Inspektorat
		6:1	0:0	0:0	01	XXXX	Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi *****)
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.1	Kota Administrasi	7:1	0:0	01			Kota Administrasi Jakarta Pusat*****)
		7:1	0:0	01	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	01	XX	XX	Kelurahan*****)
		7:1	0:0	02			Kota Administrasi Jakarta Utara*****)
		7:1	0:0	02	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	02	XX	XX	Kelurahan*****)
		7:1	0:0	03			Kota Administrasi Jakarta Timur*****)
		7:1	0:0	03	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	03	XX	XX	Kelurahan*****)
		7:1	0:0	04			Kota Administrasi Jakarta Selatan*****)
		7:1	0:0	04	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	04	XX	XX	Kelurahan*****)
		7:1	0:0	05			Kota Administrasi Jakarta Barat*****)
		7:1	0:0	05	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	05	XX	XX	Kelurahan*****)
	Kabupaten Administrasi	7:1	0:0	06			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*****)
		7:1	0:0	06	XX		Unit Kerja Teknis Kabupaten*****)
		7:1	0:0	06	XX		Kecamatan*****)
		7:1	0:0	06	XX	XX	Kelurahan*****)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8:1	0:0	0:0	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8:1	0:0	0:0	01	XX	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi *****)
UNSUR KEKHUSUSAN							
9.1	Aceh	9:1	0:0	0:0	01		Dinas Syariat Islam Aceh ******)
		9:1	0:0	0:0	02		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh******)
		9:1	0:0	0:0	03		Sekretariat Baitul Mal Aceh******)
		9:1	0:0	0:0	04		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh******)
		9:1	0:0	0:0	05		Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe******)
9.2	Kekhususan Papua Sekretariat MRP	9:2	0:0	0:0	05		Sekretariat MRP Provinsi Papua**)

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
9.3	Kekhususan Papua Barat-Sekretariat MRP	9:3	0:0	0:0	06		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat***)

Keterangan:
* : Provinsi Papua dan Papua Barat
**) : Provinsi Papua
***) : Provinsi Papua Barat
****) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
*****) : Provinsi DKI Jakarta
******) : Provinsi Aceh
*******) : Provinsi Bali

G. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.1	Pendidikan	1.1	0.0	0.0	01		Dinas Pendidikan
		1.1	0.0	0.0	01	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		1.1	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	2.22	0.0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1	2.22	0.0	02	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	2.22	0.0	02	XXXX	UPTD
		1.1	2.22	0.0	02	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	2.19	0.0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.1	2.19	0.0	03	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	2.19	0.0	03	XXXX	UPTD
		1.1	2.19	0.0	03	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	3.26	0.0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1.1	3.26	0.0	04	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	3.26	0.0	04	XXXX	UPTD
		1.1	3.26	0.0	04	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	2.22	2.19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1.1	2.22	2.19	05	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	2.22	2.19	05	XXXX	UPTD
		1.1	2.22	2.19	05	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	2.22	3.26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1	2.22	3.26	06	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	2.22	3.26	06	XXXX	UPTD
		1.1	2.22	3.26	06	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	2.19	3.26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1.1	2.19	3.26	07	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1.1	2.19	3.26	07	XXXX	UPTD
		1.1	2.19	3.26	07	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1.1	0.0	0.0	08		Dinas Pendidikan Dayah******)
		1.1	0.0	0.0	09		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota******)
1.2	Kesehatan	1.2	0.0	0.0	01		Dinas Kesehatan
		1.2	0.0	0.0	01	XXXX	RSUD
		1.2	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.8	0.0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2	2.8	0.0	02	XXXX	RSUD
		1.2	2.8	0.0	02	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.14	0.0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1.2	2.14	0.0	03	XXXX	RSUD
		1.2	2.14	0.0	03	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.12	0.0	04		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.2	2.12	0.0	04	XXXX	RSUD
		1.2	2.12	0.0	04	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.13	0.0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1.2	2.13	0.0	05	XXXX	RSUD
		1.2	2.13	0.0	05	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.8	2.14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1.2	2.8	2.14	06	XXXX	RSUD
		1.2	2.8	2.14	06	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.8	2.14	07		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.2	2.8	2.14	07	XXXX	RSUD
		1.2	2.8	2.14	07	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.8	2.13	08		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.2	2.8	2.13	08	XXXX	RSUD
		1.2	2.8	2.13	08	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.14	2.12	09		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.2	2.14	2.12	09	XXXX	RSUD
		1.2	2.14	2.12	09	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.14	2.13	10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.2	2.14	2.13	10	XXXX	RSUD
		1.2	2.14	2.13	10	XXXX	UPTD selain RSUD
		1.2	2.12	2.13	11		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.2	2.12	2.13	11	XXXX	RSUD
		1.2	2.12	2.13	11	XXXX	UPTD selain RSUD
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3	0.0	0.0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.3	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.3	0.0	0.0	02	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1.3	0.0	0.0	03	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
		1.3	0.0	0.0	04	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.3	0.0	0.0	05	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1.3	0.0	0.0	06	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1.3	0.0	0.0	07	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1.3	0.0	0.0	08	XXXX	UPTD
		1.3	0.0	0.0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1.3	0.0	0.0	09	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.4	0.0	0.0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.4	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	0.0	02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.4	2.10	0.0	02	XXXX	UPTD
		1.4	2.15	0.0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Perhubungan
		1.4	2.15	0.0	03	XXXX	UPTD
		1.4	2.11	0.0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup
		1.4	2.11	0.0	04	XXXX	UPTD
		1.4	3.28	0.0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Kehutanan
		1.4	3.28	0.0	05	XXXX	UPTD
		1.4	2.9	0.0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pangan
		1.4	2.9	0.0	06	XXXX	UPTD
		1.4	3.27	0.0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1.4	3.27	0.0	07	XXXX	UPTD
		1.4	3.25	0.0	08		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perikanan
		1.4	3.25	0.0	08	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	2.15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1.4	2.10	2.15	09	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	2.11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1.4	2.10	2.11	10	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	3.28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1.4	2.10	3.28	11	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	2.9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1.4	2.10	2.9	12	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	3.27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1.4	2.10	3.27	13	XXXX	UPTD
		1.4	2.10	3.25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1.4	2.10	3.25	14	XXXX	UPTD
		1.4	2.15	2.11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1.4	2.15	2.11	15	XXXX	UPTD
		1.4	2.15	3.28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1.4	2.15	3.28	16	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1.4	2.15	2.9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1.4	2.15	2.9	17	XXXX	UPTD
		1.4	2.15	3.27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1.4	2.15	3.27	18	XXXX	UPTD
		1.4	2.15	3.25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Perikanan
		1.4	2.15	3.25	19	XXXX	UPTD
		1.4	2.11	3.28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1.4	2.11	3.28	20	XXXX	UPTD
		1.4	2.11	2.9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pangan
		1.4	2.11	2.9	21	XXXX	UPTD
		1.4	2.11	3.27	22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		1.4	2.11	3.27	22	XXXX	UPTD
		1.4	2.11	3.25	23		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		1.4	2.11	3.25	23	XXXX	UPTD
		1.4	3.28	2.9	24		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pangan
		1.4	3.28	2.9	24	XXXX	UPTD
		1.4	3.28	3.27	25		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pertanian
		1.4	3.28	3.27	25	XXXX	UPTD
		1.4	3.28	3.25	26		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, serta Perikanan
		1.4	3.28	3.25	26	XXXX	UPTD
		1.4	2.9	3.27	27		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan dan Pertanian
		1.4	2.9	3.27	27	XXXX	UPTD
		1.4	2.9	3.25	28		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		1.4	2.9	3.25	28	XXXX	UPTD
		1.4	3.27	3.25	29		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian serta Perikanan
		1.4	3.27	3.25	29	XXXX	UPTD
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.5	0.0	0.0	01		Satuan Polisi Pamongpraja
		1.5	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		1.5	0.0	0.0	02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.5	0.0	0.0	02	XXXX	UPTD
		1.5	0.0	0.0	03		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		1.5	0.0	0.0	03	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1.5	0.0	0.0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5	0.0	0.0	04	XXXX	UPTD
		1.5	0.0	0.0	05		Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5	0.0	0.0	05	XXXX	UPTD
		1.5	0.0	0.0	06		Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana
		1.5	0.0	0.0	06	XXXX	UPTD
		1.5	0.0	0.0	07		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah******)
		1.5	0.0	0.0	07	XXXX	UPTD
1.6	Sosial	1.6	0.0	0.0	01		Dinas Sosial
		1.6	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		1.6	2.8	0.0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.6	2.8	0.0	02	XXXX	UPTD
		1.6	2.14	0.0	03		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1.6	2.14	0.0	03	XXXX	UPTD
		1.6	2.12	0.0	04		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.6	2.12	0.0	04	XXXX	UPTD
		1.6	2.13	0.0	05		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.6	2.13	0.0	05	XXXX	UPTD
		1.6	2.8	2.14	06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1.6	2.8	2.14	06	XXXX	UPTD
		1.6	2.8	2.12	07		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.6	2.8	2.12	07	XXXX	UPTD
		1.6	2.8	2.13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.6	2.8	2.13	08	XXXX	UPTD
		1.6	2.14	2.12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.6	2.14	2.12	09	XXXX	UPTD
		1.6	2.14	2.13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.6	2.14	2.13	10	XXXX	UPTD
		1.6	2.12	2.13	11		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.6	2.12	2.13	11	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.7	Tenaga Kerja	2.7	0.0	0.0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2.7	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
2.8	Pemberdayaan	2.8	0.0	0.0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perempuan dan	2.8	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
	Perlindungan Anak						
		2.8	2.14	0.0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.8	2.14	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.8	2.12	0.0	03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.8	2.12	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.8	2.13	0.0	04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.8	2.13	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.8	2.14	2.12	05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.8	2.14	2.12	05	XXXX	UPTD
		2.8	2.14	2.13	06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.8	2.14	2.13	06	XXXX	UPTD
		2.8	2.12	2.13	07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.8	2.12	2.13	07	XXXX	UPTD
2.9	Pangan	2.9	0.0	0.0	01		Dinas Ketahanan Pangan
		2.9	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.9	3.27	0.0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.9	3.27	0.0	02	XXXX	UPTD
2.10	Pertanahan	2.10	0.0	0.0	01		Dinas Pertanahan
		2.10	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.10	2.15	0.0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2.10	2.15	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.10	2.11	0.0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2.10	2.11	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.10	3.28	0.0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2.10	3.28	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.10	2.9	0.0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2.10	2.9	0.0	05	XXXX	UPTD
		2.10	3.27	0.0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2.10	3.27	0.0	06	XXXX	UPTD
		2.10	3.25	0.0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2.10	3.25	0.0	07	XXXX	UPTD
		2.10	2.15	2.11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2.10	2.15	2.11	08	XXXX	UPTD
		2.10	2.15	3.28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2.10	2.15	3.28	09	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2.10	2.15	2.9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan
		2.10	2.15	2.9	10	XXXX	UPTD
		2.10	2.15	3.27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2.10	2.15	3.27	11	XXXX	UPTD
		2.10	2.15	3.25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Perikanan
		2.10	2.15	3.25	12	XXXX	UPTD
		2.10	2.11	3.28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.10	2.11	3.28	13	XXXX	UPTD
		2.10	2.11	2.9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2.10	2.11	2.9	14	XXXX	UPTD
		2.10	2.11	3.27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2.10	2.11	3.27	15	XXXX	UPTD
		2.10	2.11	3.25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Perikanan
		2.10	2.11	3.25	16	XXXX	UPTD
		2.10	3.28	2.9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2.10	3.28	2.9	17	XXXX	UPTD
		2.10	3.28	3.27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2.10	3.28	3.27	18	XXXX	UPTD
		2.10	3.28	3.25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2.10	3.28	3.25	19	XXXX	UPTD
		2.10	2.9	3.27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2.10	2.9	3.27	20	XXXX	UPTD
		2.10	2.9	3.25	21		Dinas Pertanahan, Pangan dan Perikanan
		2.10	2.9	3.25	21	XXXX	UPTD
		2.10	3.27	3.25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2.10	3.27	3.25	22	XXXX	UPTD
		2.10	3.27	3.25	23		Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota******)
		2.10	3.27	3.25	23	XXXX	UPTD
2.11	Lingkungan Hidup	2.11	0.0	0.0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.11	3.29	0.0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11	3.29	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.11	2.9	0.0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2.11	2.9	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.11	3.27	0.0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2.11	3.27	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.11	3.25	0.0	05		Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
		2.11	3.25	0.0	05	XXXX	UPTD
		2.11	3.28	2.9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2.11	3.28	2.9	06	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2.11	3.28	3.27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
		2.11	3.28	3.27	07	XXXX	UPTD
		2.11	3.28	3.25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2.11	3.28	3.25	08	XXXX	UPTD
		2.11	2.9	3.27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2.11	2.9	3.27	09	XXXX	UPTD
		2.11	2.9	3.25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Perikanan
		2.11	2.9	3.25	10	XXXX	UPTD
		2.11	3.27	3.25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2.11	3.27	3.25	11	XXXX	UPTD
2.12	Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil	2.12	0.0	0.0	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.12	2.13	0.0	02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.12	2.13	0.0	02	XXXX	UPTD
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	0.0	0.0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.13	0.0	0.0	02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung*)
		2.13	0.0	0.0	02	XXXX	UPTD
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	0.0	0.0	01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.14	2.12	0.0	02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.14	2.12	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.14	2.13	0.0	03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.14	2.13	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.14	2.12	2.13	04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.14	2.12	2.13	04	XXXX	UPTD
2.15	Perhubungan	2.15	0.0	0.0	01		Dinas Perhubungan
		2.15	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.15	2.11	0.0	02		Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2.15	2.11	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.15	3.28	0.0	03		Dinas Perhubungan dan Kehutanan
		2.15	3.28	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.15	2.9	0.0	04		Dinas Perhubungan dan Pangan
		2.15	2.9	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.15	3.27	0.0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2.15	3.27	0.0	05	XXXX	UPTD
		2.15	3.25	0.0	06		Dinas Perhubungan dan Perikanan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2.15	3.25	0.0	06	XXXX	UPTD
		2.15	2.11	3.28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.15	2.11	3.28	07	XXXX	UPTD
		2.15	2.11	2.9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2.15	2.11	2.9	08	XXXX	UPTD
		2.15	2.11	3.27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2.15	2.11	3.27	09	XXXX	UPTD
		2.15	2.11	3.25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2.15	2.11	3.25	10	XXXX	UPTD
		2.15	3.28	2.9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan
		2.15	3.28	2.9	11	XXXX	UPTD
		2.15	3.28	3.27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian
		2.15	3.28	3.27	12	XXXX	UPTD
		2.15	3.28	3.25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Perikanan
		2.15	3.28	3.25	13	XXXX	UPTD
		2.15	2.9	3.27	14		Dinas Perhubungan, Pangan dan Pertanian
		2.15	2.9	3.27	14	XXXX	UPTD
		2.15	2.9	3.25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2.15	2.9	3.25	15	XXXX	UPTD
		2.15	3.27	3.25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian dan Perikanan
		2.15	3.27	3.25	16	XXXX	UPTD
2.16	Komunikasi dan Informatika	2.16	0.0	0.0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.16	2.20	0.0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.16	2.20	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.16	2.21	0.0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16	2.21	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.16	2.20	2.21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.16	2.20	2.21	04	XXXX	UPTD
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17	0.0	0.0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.17	3.31	0.0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2.17	3.31	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.17	3.30	0.0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		2.17	3.30	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.17	3.29	0.0	04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.17	3.29	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.17	3.32	0.0	05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2.17	3.32	0.0	05	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2.17	2.7	0.0	06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2.17	2.7	0.0	06	XXXX	UPTD
		2.17	3.31	3.30	07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.17	3.31	3.30	07	XXXX	UPTD
		2.17	3.31	3.29	08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.17	3.31	3.29	08	XXXX	UPTD
		2.17	3.31	3.32	09		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2.17	3.31	3.32	09	XXXX	UPTD
		2.17	3.31	2.7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.17	3.31	2.7	10	XXXX	UPTD
		2.17	3.30	3.29	11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.17	3.30	3.29	11	XXXX	UPTD
		2.17	3.30	3.32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2.17	3.30	3.32	12	XXXX	UPTD
		2.17	3.30	2.7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2.17	3.30	2.7	13	XXXX	UPTD
		2.17	3.29	3.32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2.17	3.29	3.32	14	XXXX	UPTD
		2.17	3.29	2.7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2.17	3.29	2.7	15	XXXX	UPTD
		2.17	3.32	2.7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2.17	3.32	2.7	16	XXXX	UPTD
2.18	Penanaman Modal	2.18	0.0	0.0	01		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2.18	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	0.0	02		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.18	2.17	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.18	3.31	0.0	03		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian
		2.18	3.31	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.18	3.30	0.0	04		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan
		2.18	3.30	0.0	04	XXXX	UPTD
		2.18	3.29	0.0	05		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.18	3.29	0.0	05	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2.18	3.32	0.0	06		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi
		2.18	3.32	0.0	06	XXXX	UPTD
		2.18	2.7	0.0	07		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		2.18	2.7	0.0	07	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	3.31	08		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2.18	2.17	3.31	08	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	3.30	09		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2.18	2.17	3.30	09	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	3.29	10		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.18	2.17	3.29	10	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	3.32	11		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi
		2.18	2.17	3.32	11	XXXX	UPTD
		2.18	2.17	2.7	12		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2.18	2.17	2.7	12	XXXX	UPTD
		2.18	3.31	3.30	13		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
		2.18	3.31	3.30	13	XXXX	UPTD
		2.18	3.31	3.29	14		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.18	3.31	3.29	14	XXXX	UPTD
		2.18	3.31	3.32	15		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Transmigrasi
		2.18	3.31	3.32	15	XXXX	UPTD
		2.18	3.31	2.7	16		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.18	3.31	2.7	16	XXXX	UPTD
		2.18	3.30	3.29	17		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.18	3.30	3.29	17	XXXX	UPTD
		2.18	3.30	3.32	18		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Transmigrasi
		2.18	3.30	3.32	18	XXXX	UPTD
		2.18	3.30	2.7	19		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2.18	3.30	2.7	19	XXXX	UPTD
		2.18	3.29	3.32	20		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2.18	3.29	3.32	20	XXXX	UPTD
		2.18	3.29	2.7	21		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2.18	3.29	2.7	21	XXXX	UPTD
		2.18	3.32	2.7	22		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2.18	3.32	2.7	22	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	2.19	0.0	0.0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2.19	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.19	3.26	0.0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2.19	3.26	0.0	02	XXXX	UPTD
2.20	Statistik	2.20	0.0	0.0	01		Dinas Statistik
		2.20	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.20	2.21	0.0	02		Dinas Statistik dan Persandian
		2.20	2.21	0.0	02	XXXX	UPTD
2.21	Persandian	2.21	0.0	0.0	01		Dinas Persandian
		2.21	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
2.22	Kebudayaan	2.22	0.0	0.0	01		Dinas Kebudayaan
		2.22	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.22	2.19	0.0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		2.22	2.19	0.0	02	XXXX	UPTD
		2.22	3.26	0.0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.22	3.26	0.0	03	XXXX	UPTD
		2.22	2.19	3.26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22	2.19	3.26	04	XXXX	UPTD
		2.22	0.0	0.0	05		Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota******)
2.23	Perpustakaan	2.23	0.0	0.0	01		Dinas Perpustakaan
		2.23	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		2.23	2.24	0.0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23	2.24	0.0	02	XXXX	UPTD
2.24	Kearsipan	2.24	0.0	0.0	01		Dinas Kearsipan
		2.24	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Kelautan dan Perikanan	3.25	0.0	0.0	01		Dinas Perikanan
		3.25	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
3.26	Pariwisata	3.26	0.0	0.0	01		Dinas Pariwisata
		3.26	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
3.27	Pertanian	3.27	0.0	0.0	01		Dinas Pertanian
		3.27	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	02		Dinas Tanaman Pangan
		3.27	0.0	0.0	02	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	03		Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan
		3.27	0.0	0.0	03	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	04		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3.27	0.0	0.0	04	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	05		Dinas Perkebunan dan Pertenakan
		3.27	0.0	0.0	05	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3.27	0.0	0.0	06		Dinas Perkebunan
		3.27	0.0	0.0	06	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	07		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		3.27	0.0	0.0	07	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	08		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27	0.0	0.0	08	XXXX	UPTD
		3.27	0.0	0.0	09		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		3.27	0.0	0.0	09	XXXX	UPTD
3.28	Kehutanan	3.28	0.0	0.0	01		Dinas Kehutanan
		3.28	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		3.28	2.9	0.0	02		Dinas Kehutanan dan Pangan
		3.28	2.9	0.0	02	XXXX	UPTD
		3.28	3.27	0.0	03		Dinas Kehutanan dan Pertanian
		3.28	3.27	0.0	03	XXXX	UPTD
		3.28	3.25	0.0	04		Dinas Kehutanan dan Perikanan
		3.28	3.25	0.0	04	XXXX	UPTD
		3.28	2.9	3.27	05		Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian
		3.28	2.9	3.27	05	XXXX	UPTD
		3.28	2.9	3.25	06		Dinas Kehutanan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		3.28	2.9	3.25	06	XXXX	UPTD
		3.28	3.27	3.25	07		Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perikanan
		3.28	3.27	3.25	07	XXXX	UPTD
3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.29	0.0	0.0	01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.29	0.0	0.0	01	XXXX	
		3.29	3.32	0.0	02		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3.29	3.32	0.0	02	XXXX	UPTD
		3.29	2.7	0.0	03		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3.29	2.7	0.0	03	XXXX	UPTD
		3.29	3.32	2.7	04		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3.29	3.32	2.7	04	XXXX	UPTD
3.30	Perdagangan	3.30	0.0	0.0	01		Dinas Perdagangan
		3.30	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		3.30	3.29	0.0	02		Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.30	3.29	0.0	02	XXXX	UPTD
		3.30	3.32	0.0	03		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		3.30	3.32	0.0	03	XXXX	UPTD
		3.30	2.7	0.0	04		Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3.30	2.7	0.0	04	XXXX	UPTD
		3.30	3.29	3.32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3.30	3.29	3.32	05	XXXX	UPTD
		3.30	3.29	2.7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja
		3.30	3.29	2.7	06	XXXX	UPTD
		3.30	3.32	2.7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3.30	3.32	2.7	07	XXXX	UPTD
3.31	Perindustrian	3.31	0.0	0.0	01		Dinas Perindustrian
		3.31	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		3.31	3.30	0.0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31	3.30	0.0	02	XXXX	UPTD
		3.31	3.29	0.0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.31	3.29	0.0	03	XXXX	UPTD
		3.31	3.32	0.0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3.31	3.32	0.0	04	XXXX	UPTD
		3.31	2.7	0.0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31	2.7	0.0	05	XXXX	UPTD
		3.31	3.30	3.29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.31	3.30	3.29	06	XXXX	UPTD
		3.31	3.30	3.32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3.31	3.30	3.32	07	XXXX	UPTD
		3.31	3.30	2.7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3.31	3.30	2.7	08	XXXX	UPTD
		3.31	3.29	3.32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3.31	3.29	3.32	09	XXXX	UPTD
		3.31	3.29	2.7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3.31	3.29	2.7	10	XXXX	UPTD
		3.31	3.32	2.7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3.31	3.32	2.7	11	XXXX	UPTD
3.32	Transmigrasi	3.32	0.0	0.0	01		Dinas Transmigrasi
		3.32	0.0	0.0	01	XXXX	UPTD
		3.32	2.7	0.0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3.32	2.7	0.0	02	XXXX	UPTD
UNSUR PENDUKUNG							
4.1	Sekretariat Daerah	4.1	0.0	0.0	01		Sekretariat Daerah
		4.1	0.0	0.0	01	XX	Bagian
4.2	Sekretariat DPRD	4.2	0.0	0.0	01		Sekretariat DPRD
		4.2	0.0	0.0	01	XX	Bagian
UNSUR PENUNJANG							
5.1	Perencanaan	5.1	0.0	0.0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		5.1	0.0	0.0	01	XX	UPTD
		5.1	5.4	0.0	02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.1	5.4	0.0	02	XX	UPTD
		5.1	5.8	0.0	03		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
		5.1	5.8	0.0	03	XX	UPTD
5.2	Keuangan	5.2	0.0	0.0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.2	0.0	0.0	01	XX	UPTD
		5.2	0.0	0.0	02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2	0.0	0.0	02	XX	UPTD
		5.2	0.0	0.0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5.2	0.0	0.0	03	XX	UPTD
		5.2	0.0	0.0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5.2	0.0	0.0	04	XX	UPTD
5.3	Kepegawaian, Pendidikan dan	5.3	5.4	0.0	01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.3	5.4	0.0	01	XX	UPTD
5.5	Penelitian dan Pengembangan	5.5	0.0	0.0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.5	0.0	0.0	01	XX	UPTD
5.6	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5.6	0.0	0.0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
5.8	Riset dan Inovasi Daerah	5.8	0.0	0.0	01		Badan Riset dan Inovasi Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
6.1	Inspektorat	6.1	0.0	0.0	01		Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.1	Kecamatan	7.1	0.0	0.0	XX		Kecamatan
		7.1	0.0	0.0	XX	XX	Kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.1	0.0	0.0	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
UNSUR KEKHUSUSAN							
9.1	Aceh	9.1	0.0	0.0	01		Dinas Syariat Islam Aceh ******)
		9.1	0.0	0.0	02		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota******)
		9.1	0.0	0.0	03		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota******)

Keterangan:
* : Provinsi Papua dan Papua Barat
**) : Provinsi Papua
***) : Provinsi Papua Barat
****) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
*****) : Provinsi DKI Jakarta
******) : Provinsi Aceh
*******) : Provinsi Bali

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						DANA UMUM
1	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	1	01				Pajak Daerah
1	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	01	04			Pajak Air Permukaan
1	1	01	05			Pajak Rokok
1	1	01	06			Pajak Hotel
1	1	01	07			Pajak Restoran
1	1	01	08			Pajak Hiburan
1	1	01	09			Pajak Reklame
1	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan
1	1	01	11			Pajak Parkir
1	1	01	12			Pajak Air Tanah
1	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet
1	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	01	17			Pajak Alat Berat
1	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	02				Retribusi Daerah - LRA
1	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
1	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha
1	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1	1	03	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	04				Lain-lain PAD Yang Sah
1	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	04	05			Jasa Giro
1	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	04	07			Pendapatan Bunga
1	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
1	1	04	16			Pendapatan dari BLUD
1	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
1	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
1	1	04	23			Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
1	2					PENDAPATAN TRANSFER
1	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1	2	01	03			Dana Otonomi Khusus
1	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Umum
1	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Umum
1	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum
1	2	01	03	02	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum
1	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	2	01	07			Dana Bagi Hasil (DBH)
1	2	01	08			Dana Alokasi Umum (DAU)
1	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
1	2	02	02			Bantuan Keuangan
1	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1	3	01				Hibah
1	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
1	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
1	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
1	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
1	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
1	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
1	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1	3	03	03			Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1	3	03	03	01		Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1	4					Penerimaan Pembiayaan
1	4	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1	4	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
1	4	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
1	4	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	4	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
1	4	01	05			Penghematan Belanja
1	4	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
1	4	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
1	4	01	08			Sisa Belanja Lainnya
1	4	01	09			Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
1	4	02				Pencairan Dana Cadangan
1	4	02	01			Pencairan Dana Cadangan
1	4	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	4	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	4	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	4	04				Penerimaan Pinjaman Daerah
1	4	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
1	4	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
1	4	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
1	4	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1	4	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
1	4	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1	4	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	4	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	4	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
1	4	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
1	4	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
1	4	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
1	4	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
1	4	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1	4	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
1	4	06	02			Divestasi BLUD
2						DANA KHUSUS
2	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	1	01				Pajak Daerah
2	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	01	01	01		PKB
2	1	01	01	01	0001	PKB
2	1	01	05			Pajak Rokok
2	1	01	05	01		Pajak Rokok
2	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok
2	1	01	12			Pajak Air Tanah
2	1	01	12	01		Pajak Air Tanah
2	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah
2	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik
2	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
2	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
2	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2	1	01	20	01		Opsen PKB
2	1	01	20	01	0001	Opsen PKB
2	1	02				Retribusi Daerah
2	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
2	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
2	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
2	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
2	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
2	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
2	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
2	1	02	03	08		Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2	1	02	03	08	0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2	1	04				Lain-lain PAD yang Sah

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	04	24			Pungutan bagi Wisatawan Asing
2	1	04	24	01		Pungutan bagi Wisatawan Asing
2	1	04	24	01	0001	Pungutan bagi Wisatawan Asing
2	1	04	25			Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
2	1	04	25	01		Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
2	1	04	25	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
2	2					PENDAPATAN TRANSFER
2	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2	2	01	01			Dana Perimbangan
2	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	2	01	01	01	0001	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	2	01	01	01	0002	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2	2	01	01	01	0003	Kurang Bayar DBH Pajak
2	2	01	01	01	0004	Kurang Bayar DBH SDA
2	2	01	01	01	0014	DBH Sawit
2	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	01	01	02	0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
2	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	2	01	01	02	0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	2	01	01	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
2	2	01	01	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
2	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
2	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
2	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
2	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
2	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
2	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
2	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
2	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
2	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
2	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
2	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
2	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
2	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
2	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
2	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
2	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
2	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
2	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
2	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
2	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
2	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
2	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
2	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
2	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
2	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
2	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
2	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
2	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
2	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
2	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
2	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
2	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
2	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
2	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
2	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
2	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
2	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
2	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
2	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
2	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
2	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
2	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
2	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
2	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
2	2	01	01	03	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
2	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
2	2	01	01	03	0053	DAK Fisik- Bidang Transportasi Laut-Reguler
2	2	01	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
2	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
2	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
2	2	01	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
2	2	01	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
2	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
2	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	01	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
2	2	01	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
2	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
2	2	01	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
2	2	01	01	03	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
2	2	01	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
2	2	01	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
2	2	01	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
2	2	01	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
2	2	01	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
2	2	01	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
2	2	01	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
2	2	01	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
2	2	01	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
2	2	01	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	01	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
2	2	01	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
2	2	01	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	01	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	01	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	01	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	01	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	01	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
2	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
2	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
2	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
2	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
2	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
2	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
2	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
2	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
2	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
2	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
2	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
2	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
2	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
2	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
2	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
2	2	01	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	2	01	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2	01	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	2	01	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK
2	2	01	01	04	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
2	2	01	01	04	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
2	2	01	01	04	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
2	2	01	01	04	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
2	2	01	01	04	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
2	2	01	01	04	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
2	2	01	01	04	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
2	2	01	01	04	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
2	2	01	01	04	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	01	01	04	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	2	01	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
2	2	01	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
2	2	01	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
2	2	01	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
2	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur
2	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
2	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama
2	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua
2	2	01	03	01	0003	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
2	2	01	03	01	0004	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Khusus
2	2	01	03	01	0005	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus
2	2	01	03	02		Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
2	2	01	03	02	0001	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
2	2	01	03	02	0002	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua
2	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
2	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama
2	2	01	03	03	0002	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat
2	2	01	03	03	0003	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
2	2	01	03	03	0004	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Khusus
2	2	01	03	03	0005	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Khusus
2	2	01	03	04		Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat
2	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat
2	2	01	03	04	0002	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua Barat
2	2	01	03	05		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
2	2	01	03	05	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
2	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
2	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
2	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
2	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
2	2	01	04			Dana Keistimewaan
2	2	01	04	01		Dana Keistimewaan DIY
2	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan DIY
2	2	01	05			Dana Desa
2	2	01	05	01		Dana Desa
2	2	01	05	01	0001	Dana Desa
2	2	01	06			Insentif Fiskal
2	2	01	06	02		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
2	2	01	06	02	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
2	2	01	06	03		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
2	2	01	06	03	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
2	2	01	07			Dana Bagi Hasil (DBH)
2	2	01	07	01		DBH Pajak

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	07	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	2	01	07	02		DBH Sumber Daya Alam (SDA)
2	2	01	07	02	0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2	2	01	07	03		DBH Lainnya
2	2	01	07	03	0001	DBH Sawit
2	2	01	08			Dana Alokasi Umum (DAU)
2	2	01	08	02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya
2	2	01	08	02	0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2	2	01	08	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	2	01	08	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	2	01	08	02	0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	2	01	08	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
2	2	01	08	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
2	2	01	09			Dana Alokasi Khusus (DAK)
2	2	01	09	01		DAK Fisik
2	2	01	09	01	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
2	2	01	09	01	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2	2	01	09	01	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
2	2	01	09	01	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
2	2	01	09	01	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2	2	01	09	01	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
2	2	01	09	01	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
2	2	01	09	01	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
2	2	01	09	01	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
2	2	01	09	01	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
2	2	01	09	01	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	2	01	09	01	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
2	2	01	09	01	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
2	2	01	09	01	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
2	2	01	09	01	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
2	2	01	09	01	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
2	2	01	09	01	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2	2	01	09	01	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	2	01	09	01	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
2	2	01	09	01	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
2	2	01	09	01	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
2	2	01	09	01	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
2	2	01	09	01	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
2	2	01	09	01	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
2	2	01	09	01	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
2	2	01	09	01	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
2	2	01	09	01	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
2	2	01	09	01	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
2	2	01	09	01	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
2	2	01	09	01	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
2	2	01	09	01	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
2	2	01	09	01	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
2	2	01	09	01	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
2	2	01	09	01	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	09	01	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
2	2	01	09	01	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
2	2	01	09	01	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
2	2	01	09	01	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
2	2	01	09	01	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
2	2	01	09	01	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
2	2	01	09	01	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
2	2	01	09	01	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
2	2	01	09	01	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
2	2	01	09	01	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
2	2	01	09	01	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
2	2	01	09	01	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
2	2	01	09	01	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
2	2	01	09	01	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
2	2	01	09	01	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
2	2	01	09	01	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
2	2	01	09	01	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
2	2	01	09	01	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
2	2	01	09	01	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
2	2	01	09	01	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
2	2	01	09	01	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
2	2	01	09	01	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
2	2	01	09	01	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
2	2	01	09	01	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
2	2	01	09	01	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
2	2	01	09	01	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	01	09	01	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
2	2	01	09	01	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
2	2	01	09	01	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
2	2	01	09	01	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
2	2	01	09	01	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
2	2	01	09	01	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
2	2	01	09	01	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
2	2	01	09	01	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
2	2	01	09	01	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
2	2	01	09	01	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
2	2	01	09	01	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
2	2	01	09	01	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
2	2	01	09	01	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
2	2	01	09	01	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
2	2	01	09	01	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	01	09	01	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
2	2	01	09	01	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
2	2	01	09	01	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	09	01	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	09	01	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	09	01	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	01	09	01	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	01	09	01	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	01	09	01	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	09	01	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	01	09	01	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	09	01	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	09	01	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	09	01	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	09	01	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	01	09	01	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	09	01	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	09	01	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	01	09	01	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	01	09	01	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	01	09	02		DAK Non Fisik
2	2	01	09	02	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
2	2	01	09	02	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
2	2	01	09	02	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	2	01	09	02	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
2	2	01	09	02	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
2	2	01	09	02	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
2	2	01	09	02	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
2	2	01	09	02	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
2	2	01	09	02	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
2	2	01	09	02	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
2	2	01	09	02	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
2	2	01	09	02	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	01	09	02	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
2	2	01	09	02	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
2	2	01	09	02	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	2	01	09	02	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
2	2	01	09	02	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	2	01	09	02	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
2	2	01	09	02	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
2	2	01	09	02	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
2	2	01	09	02	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	2	01	09	02	0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2	01	09	02	0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	2	01	09	02	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
2	2	01	09	02	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK
2	2	01	09	02	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
2	2	01	09	02	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
2	2	01	09	02	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
2	2	01	09	02	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
2	2	01	09	02	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
2	2	01	09	02	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	09	02	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
2	2	01	09	02	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
2	2	01	09	02	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	01	09	02	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	2	01	09	02	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
2	2	01	09	02	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
2	2	01	09	02	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
2	2	01	09	02	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
2	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
2	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
2	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
2	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
2	2	02	02			Bantuan Keuangan
2	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
2	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	3	02				Dana Darurat
2	3	02	01			Dana Darurat
2	3	02	01	01		Dana Darurat
2	3	02	01	01	0001	Dana Darurat
2	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
2	3	03	01	03		Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
2	3	03	01	03	0001	Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
2	3	03	02			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
2	3	03	02	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
2	3	03	02	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
2	3	03	04			Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
2	3	03	04	01		Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
2	3	03	04	01	0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
2	4					Penerimaan Pembiayaan
2	4	07				Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah
2	4	07	01			Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat
2	4	07	01	01		Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat
2	4	07	01	01	0001	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	15		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
1	1	03	01	15	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	15	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	15	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	15	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	16		Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
1	1	03	01	16	0001	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	16	0002	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	16	0003	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	16	0004	Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	17		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
1	1	03	01	17	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	17	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	17	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	17	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	18		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
1	1	03	01	18	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	18	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	18	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	18	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	15		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
1	1	03	02	15	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	16		Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
1	1	03	02	16	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	17		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
1	1	03	02	17	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	18		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
1	1	03	02	18	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	38		Piutang Pajak Belerang
1	1	03	14	38	0001	Piutang Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak belerang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	14	39		Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
1	1	03	14	39	0001	Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	17			Piutang Pajak Alat Berat
1	1	03	17	01		Piutang Pajak Alat Berat
1	1	03	17	01	0001	Piutang Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	18			Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	03	18	01		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	03	18	01	0001	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	19			Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	03	19	01		Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman
1	1	03	19	01	0001	Piutang PBJT-Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-restoran.
1	1	03	19	01	0002	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-penyedia jasa boga atau katering.
1	1	03	19	02		Piutang PBJT-Tenaga Listrik
1	1	03	19	02	0001	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
1	1	03	19	02	0002	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
1	1	03	19	03		Piutang PBJT-Jasa Perhotelan
1	1	03	19	03	0001	Piutang PBJT-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	19	03	0002	Piutang PBJT-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-hostel.
1	1	03	19	03	0003	Piutang PBJT-Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-vila.
1	1	03	19	03	0004	Piutang PBJT-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pondok wisata.
1	1	03	19	03	0005	Piutang PBJT-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-motel.
1	1	03	19	03	0006	Piutang PBJT-Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-losmen.
1	1	03	19	03	0007	Piutang PBJT-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-wisma pariwisata.
1	1	03	19	03	0008	Piutang PBJT-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pesanggrahan.
1	1	03	19	03	0009	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalo/*resort*/*cottage*.
1	1	03	19	03	0010	Piutang PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
1	1	03	19	03	0011	Piutang PBJT-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-*glamping*.
1	1	03	19	04		Piutang PBJT-Jasa Parkir
1	1	03	19	04	0001	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
1	1	03	19	04	0002	Piutang PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
1	1	03	19	05		Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
1	1	03	19	05	0001	Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
1	1	03	19	05	0002	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
1	1	03	19	05	0003	Piutang PBJT-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-kontes kecantikan.
1	1	03	19	05	0004	Piutang PBJT-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-kontes binaraga.
1	1	03	19	05	0005	Piutang PBJT-Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pameran.
1	1	03	19	05	0006	Piutang PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
1	1	03	19	05	0007	Piutang PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
1	1	03	19	05	0008	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-permainan ketangkasan.
1	1	03	19	05	0009	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
1	1	03	19	05	0010	Piutang PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
1	1	03	19	05	0011	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-panti pijat dan panti refleksi.
1	1	03	19	05	0012	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak barang dan jasa tertentu-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
1	1	03	20			Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	20	01		Piutang Opsen PKB
1	1	03	20	01	0001	Piutang Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	21			Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	03	21	01		Piutang Opsen BBNKB
1	1	03	21	01	0001	Piutang Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	04	01	14		Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan
1	1	04	01	14	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan persampahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	14	0002	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	14	0003	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	15		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	01	15	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	12		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02	12	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	13		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	13	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	13	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	14		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
1	1	04	02	14	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan luar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan luar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	15		Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
1	1	04	02	15	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	16		Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
1	1	04	02	16	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	17		Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
1	1	04	02	17	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	18		Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
1	1	04	02	18	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	19		Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
1	1	04	02	19	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	20		Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
1	1	04	02	20	0001	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemanfaatan aset daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	06	12	01	0071	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0072	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0073	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0074	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0075	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0076	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0077	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0078	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0079	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0080	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0081	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0082	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0083	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0084	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0085	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0086	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0015	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0016	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda BBNKB-mobil barang-roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0017	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0018	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0038	Piutang Pendapatan Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak belerang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0039	Piutang Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	17		Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
1	1	06	12	17	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	18		Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	06	12	18	0001	Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19		Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	06	12	19	0001	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0002	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0003	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0004	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0005	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0006	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-hostel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0007	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-vila sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0008	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0009	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0010	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0011	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0012	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0013	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalo/*resort*/*cottage* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0014	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0015	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-*glamping* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0016	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0017	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0018	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0019	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0020	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0021	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0022	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0023	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0024	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0025	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0026	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0027	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0028	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	19	0029	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	20		Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	20	0001	Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda opsen PKB sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	21		Piutang Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	21	0001	Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	13	01	0046	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0047	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0048	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0049	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0037	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0038	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0039	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0040	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0041	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0042	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0043	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	02	0044	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0045	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0046	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	15	09	0011	Piutang Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
1	1	06	15	09	0012	Piutang Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	09	0013	Piutang Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
1	1	06	15	09	0014	Piutang Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
1	1	06	15	09	0015	Piutang Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
1	1	06	15	09	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
1	1	06	15	09	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
1	1	06	15	09	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
1	1	06	15	09	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
1	1	06	15	09	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
1	1	06	15	09	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
1	1	06	15	09	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
1	1	06	15	09	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
1	1	06	15	09	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan.
1	1	06	15	09	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	09	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
1	1	06	15	09	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
1	1	06	15	09	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
1	1	06	15	09	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu.
1	1	06	15	09	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
1	1	06	15	09	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
1	1	06	15	09	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
1	1	06	15	09	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
1	1	06	15	09	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
1	1	06	15	09	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
1	1	06	15	09	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
1	1	06	15	09	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
1	1	06	15	09	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
1	1	06	15	09	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
1	1	06	15	09	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
1	1	06	15	09	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
1	1	06	15	09	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
1	1	06	15	09	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
1	1	06	15	09	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	06	15	09	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
1	1	06	15	09	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
1	1	06	15	09	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
1	1	06	15	09	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal.
1	1	06	15	09	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
1	1	06	15	09	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
1	1	06	15	09	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
1	1	06	15	09	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
1	1	06	15	09	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
1	1	06	15	09	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
1	1	06	15	09	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
1	1	06	15	09	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
1	1	06	15	09	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
1	1	06	15	09	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
1	1	06	15	09	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	09	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
1	1	06	15	09	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	09	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
1	1	06	15	09	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
1	1	06	15	09	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	09	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
1	1	06	15	09	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
1	1	06	15	09	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
1	1	06	15	09	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
1	1	06	15	09	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
1	1	06	15	09	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
1	1	06	15	09	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
1	1	06	15	09	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
1	1	06	15	09	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
1	1	06	15	09	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD.
1	1	06	15	09	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD.
1	1	06	15	09	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD.
1	1	06	15	09	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
1	1	06	15	09	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
1	1	06	15	09	0079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
1	1	06	15	09	0080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK.
1	1	06	15	09	0081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK.
1	1	06	15	09	0082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK.
1	1	06	15	09	0083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah.
1	1	06	15	10	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat.
1	1	06	15	10	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
1	1	06	15	10	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
1	1	06	15	10	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
1	1	06	15	10	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
1	1	06	15	10	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
1	1	06	15	10	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	10	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
1	1	06	15	10	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
1	1	06	15	10	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
1	1	06	15	10	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
1	1	06	15	10	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
1	1	06	15	10	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
1	1	06	15	10	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
1	1	06	15	10	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
1	1	06	15	10	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
1	1	06	15	12	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat.
1	1	06	15	12	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
1	1	06	15	12	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
1	1	06	15	12	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
1	1	06	15	12	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
1	1	06	15	12	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	12	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
1	1	06	15	12	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
1	1	06	15	12	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
1	1	06	15	12	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
1	1	06	15	12	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
1	1	06	15	12	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
1	1	06	15	12	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
1	1	06	15	12	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
1	1	06	15	12	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
1	1	06	15	15	0868	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang sampel pangan.
1	1	06	15	16	1045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat.
1	1	06	15	16	1046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
1	1	06	15	16	1047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PJBT).
1	1	06	15	16	1048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
1	1	06	15	16	1049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
1	1	06	15	16	1050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	16	1052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
1	1	06	15	16	1053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
1	1	06	15	16	1054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
1	1	06	15	16	1055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
1	1	06	15	16	1056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
1	1	06	15	16	1057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
1	1	06	15	16	1058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
1	1	06	15	16	1059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
1	1	06	15	16	1060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
1	1	06	15	16	1061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-sewa jasa internet.
1	1	06	15	16	1062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan.
1	1	06	15	16	1063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
1	1	06	15	16	1064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa.
1	1	06	15	16	1065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
1	1	06	15	16	1066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe.
1	1	06	15	16	1076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1084	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1085	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi.
1	1	06	15	16	1086	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1087	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1088	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1089	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1090	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1091	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1092	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1093	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1094	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi.
1	1	06	15	16	1095	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1096	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1097	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1098	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1099	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1100	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1101	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1102	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1103	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1104	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional.
1	1	06	15	16	1105	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional.
1	1	06	15	18	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Belanja Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-belanja uang meugang.
1	1	06	24			Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
1	1	06	24	01		Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
1	1	06	24	01	0001	Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	25			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
1	1	06	25	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
1	1	06	25	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil pengelolaan dana abadi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0014	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sawit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0066	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0067	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0068	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0069	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0070	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0071	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0072	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0073	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0074	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0075	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0076	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0077	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	03	0078	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0079	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0080	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0081	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0082	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0083	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0084	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0085	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	03	0086	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0087	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0088	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0089	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0090	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0091	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0092	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0093	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0094	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0095	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0096	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0097	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0098	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0099	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0100	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	04	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	06		Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	1	07	03	06	0001	Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	07		Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	1	07	03	07	0001	Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	06	02		Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1	1	07	06	02	0001	Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	06	03		Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
1	1	07	06	03	0001	Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07			Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)
1	1	07	07	01		Piutang DBH Pajak
1	1	07	07	01	0001	Piutang DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	01	0002	Piutang DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH PPh pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	01	0003	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	01	0004	Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH cukai hasil tembakau (CHT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02		Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)
1	1	07	07	02	0001	Piutang DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA minyak bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0002	Piutang DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA gas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0003	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA pengusahaan panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0004	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0005	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0006	Piutang DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0007	Piutang DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0008	Piutang DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA kehutanan-dana reboisasi (DR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	02	0009	Piutang DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH SDA perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	07	03		Piutang DBH Lainnya
1	1	07	07	03	0001	Piutang DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat piutang DBH sawit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08			Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
1	1	07	08	01		Piutang DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
1	1	07	08	01	0001	Piutang DAU
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02		Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya
1	1	07	08	02	0001	Piutang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02	0002	Piutang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02	0003	Piutang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02	0004	Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02	0005	Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	08	02	0006	Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09			Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	1	07	09	01		Piutang DAK Fisik
1	1	07	09	01	0001	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0002	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0003	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0004	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0005	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0006	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0007	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0008	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0009	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0010	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0011	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0012	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0013	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0014	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0015	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0016	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	01	0017	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0018	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0019	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0020	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0021	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0022	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0023	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DPTK) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0024	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0025	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0026	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0027	Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0028	Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0029	Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0030	Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0031	Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0032	Piutang DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0033	Piutang DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0034	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0035	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0036	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0037	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0038	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0039	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0040	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0041	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0042	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0043	Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0044	Piutang DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pasar-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0045	Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0046	Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0047	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0048	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0049	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0050	Piutang DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sosial-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0051	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menegah kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0052	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	01	0053	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0054	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0055	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0056	Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perumahan dam permukiman-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0057	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0058	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0059	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0060	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0061	Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	01	0062	Piutang DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0063	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0064	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0065	Piutang DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0066	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0067	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0068	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0069	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0070	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0071	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0072	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	01	0073	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0074	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0075	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0076	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0077	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0078	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0079	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0080	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0081	Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	01	0082	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0083	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0084	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0085	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0086	Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0087	Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0088	Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0089	Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0090	Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0091	Piutang DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0092	Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0093	Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0094	Piutang DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0095	Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0096	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0097	Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0098	Piutang DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0099	Piutang DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	01	0100	Piutang DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02		Piutang DAK Non Fisik
1	1	07	09	02	0001	Piutang DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOS reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0002	Piutang DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOS afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0003	Piutang DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOS kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0004	Piutang DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-TPG PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0005	Piutang DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-Tamsil guru PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0006	Piutang DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-TKG PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0007	Piutang DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOP PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0008	Piutang DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0009	Piutang DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0010	Piutang DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0011	Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKKB-BOK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0012	Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0013	Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0014	Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0015	Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKKB-BOKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0016	Piutang DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-P2UKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0017	Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0018	Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	02	0019	Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana bantuan BLPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0020	Piutang DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0021	Piutang DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-BOKB-KB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0022	Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0023	Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0024	Piutang DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0025	Piutang DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-P2UMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0026	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOS reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0027	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOS kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0028	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0029	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0030	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0031	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0032	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0033	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0034	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0035	Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0036	Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0037	Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0038	Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	02	0039	Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	10	01	01	0173	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0174	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0175	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0176	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0177	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0178	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0179	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0180	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0181	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0182	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0183	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0184	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0185	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	01	0186	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0187	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0188	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0189	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil penumpang-roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil penumpang-roda tiga sehingga nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0190	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang-roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang-roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0191	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0192	Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0193	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Belerang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0194	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0195	Penyisihan Piutang Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak alat berat sehingga nilai piutang pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0196	Penyisihan Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0197	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran sehingga nilai piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0198	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sehingga nilai piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	01	0199	Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sehingga nilai piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0200	Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0201	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-hotel sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0202	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-hostel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-hostel sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-hostel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0203	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-vila sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0204	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0205	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-motel sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0206	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-losmen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-losmen sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-losmen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0207	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0208	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0209	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0210	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0211	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa perhotelan-*glamping* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-*glamping* sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-*glamping* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0212	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	01	0213	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa perhotelan-parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sehingga nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0214	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk totonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk totonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk totonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0215	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0216	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0217	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0218	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0219	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0220	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0221	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0222	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0223	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0224	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0225	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0226	Penyisihan Piutang Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang opsen PKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang opsen PKB sehingga nilai piutang opsen PKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0227	Penyisihan Piutang Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang opsen BBNKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang opsen BBNKB sehingga nilai piutang opsen BBNKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0071	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0072	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0073	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0074	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0075	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0076	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0077	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0078	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0079	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	02	0080	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0081	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekrasi, pariwisata, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0082	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0083	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0084	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7467	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7468	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7469	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7470	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7471	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7472	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-umum sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7473	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7474	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7475	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7476	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7477	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7478	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7479	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7480	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7481	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7482	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7483	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-roda tiga sehingga nilai piutang denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7484	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang-roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang-roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7485	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* sehingga nilai piutang denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7486	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7487	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Belerang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang sehingga nilai piutang denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7488	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral sehingga nilai piutang denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7489	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak alat berat sehingga nilai piutang denda pajak daerah-pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7490	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang denda pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7491	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7492	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-penyediaan jasa boga atau katering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-penyediaan jasa boga atau katering sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-makanan dan/atau minuman-penyediaan jasa boga atau katering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7493	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7494	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7495	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hotel sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7496	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hostel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hostel sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-hostel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7497	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-vila sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7498	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7499	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-motel sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7500	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-losmen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-losmen sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-losmen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7501	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7502	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7503	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalo/*resort*/*cottage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/*resort* /*cottage* sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/*resort* /*cottage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7504	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7505	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-*glamping* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-*glamping* sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa perhotelan-*glamping* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7506	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7507	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7508	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7509	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7510	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7511	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7512	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7513	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7514	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7515	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7516	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7517	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7518	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7519	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga nilai piutang denda pajak daerah-PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7520	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen PKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen PKB sehingga nilai piutang denda pajak daerah-opsen PKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7521	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen BBNKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-opsen BBNKB sehingga nilai piutang denda pajak daerah-opsen BBNKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7522	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7523	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7524	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7525	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7526	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7527	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7528	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7529	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7530	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7531	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7532	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7533	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7534	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7535	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha brupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha brupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha brupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, periwisata, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, periwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, periwisata, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-sewa jasa internet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-sewa jasa internet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-sewa jasa internet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7585	Penyisihan Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pungutan bagi wisatawan asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pungutan bagi wisatawan asing sehingga nilai piutang pungutan bagi wisatawan asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7587	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan dana abadi daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan dana abadi daerah sehingga nilai piutang hasil pengelolaan dana abadi daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang sampel pangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang sampel pangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang sampel pangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanjata mbahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan dasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan,dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan,dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan,dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam lingkungan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7648	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7649	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7650	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7651	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7652	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7653	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7654	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7655	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7657	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jjasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7658	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jjasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7659	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7660	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7661	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7662	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7663	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7664	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7665	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7666	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7667	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7668	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7669	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7670	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7671	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7672	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7673	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7674	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7675	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7676	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7677	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7678	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7679	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7680	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7681	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7682	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7683	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7684	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7685	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7686	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7687	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7688	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7689	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7690	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7691	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7692	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7693	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7694	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7695	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7696	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7697	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7698	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7699	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7700	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7701	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7702	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7703	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7704	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	7705	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0134	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer umum-DBH-DBH sawit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer umum-DBH-DBH sawit sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer umum-DBH-DBH sawit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0135	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus papua-DBH minyak dan gas otonomi khusus papua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus papua-DBH minyak dan gas otonomi khusus papua sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus papua-DBH minyak dan gas otonomi khusus papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0136	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus aceh-DBH minyak dan gas otonomi khusus aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus aceh-DBH minyak dan gas otonomi khusus aceh sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus aceh-DBH minyak dan gas otonomi khusus aceh yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0137	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0138	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SD sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0139	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0140	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0141	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0142	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0143	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0144	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0145	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0146	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0147	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0148	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0149	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0150	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0151	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0152	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0153	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0154	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0155	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0156	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0157	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0158	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0159	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0160	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0161	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0162	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0163	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0164	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0165	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0166	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi lingkungan hidup prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0167	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0168	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0169	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0170	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0171	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK fisik-bidang energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0172	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0173	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0174	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0175	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer khusus-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0176	Penyisihan Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sehingga nilai piutang penyisihan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0177	Penyisihan Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sehingga nilai piutang penyisihan piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0178	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PBB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0179	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 21 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 21 sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 21 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0180	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0181	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH cukai hasil tembakau (CHT) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH cukai hasil tembakau (CHT) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH pajak-DBH cukai hasil tembakau (CHT) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0182	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA minyak bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA minyak bumi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA minyak bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0183	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA gas bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA gas bumi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA gas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0184	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA pengusahaan panas bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA pengusahaan panas bumi sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA pengusahaan panas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0185	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
iya						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0186	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0187	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0188	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-iuran pemanfaatan hutan (IIUPH) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-iuran pemanfaatan hutan (IIUPH) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-iuran pemanfaatan hutan (IIUPH) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0189	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-dana reboisasi (DR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-dana reboisasi (DR) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA kehutanan-dana reboisasi (DR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0190	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA perikanan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH sumber daya alam (SDA)-DBH SDA perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0191	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH lainnya-DBH sawit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH lainnya-DBH sawit sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil (DBH)-DBH lainnya-DBH sawit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0192	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-DAU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-DAU sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-DAU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0193	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0194	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU tidak ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0195	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0196	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0197	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0198	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi umum (DAU)-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0199	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0200	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0201	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0202	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0203	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0204	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0205	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0206	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0207	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0208	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0209	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0210	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0211	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0212	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0213	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0214	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0215	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0216	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0217	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0218	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0219	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0220	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0221	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DPTK) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DPTK) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DPTK) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0222	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0223	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0224	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB) sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0225	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0226	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0227	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0228	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0229	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0230	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0231	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0232	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0233	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0234	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0235	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0236	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0237	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0238	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0239	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0240	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0241	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0242	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pasar-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pasar-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pasar-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0243	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0244	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0245	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0246	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0247	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0248	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sosial-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sosial-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sosial-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0249	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0250	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0251	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0252	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0253	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0254	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0255	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0256	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0257	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0258	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0259	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0260	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0261	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0262	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0263	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0264	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0265	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0266	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0267	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0268	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0269	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0270	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0271	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0272	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0273	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0274	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0275	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0276	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0277	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0278	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0279	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0280	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0281	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0282	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0283	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0284	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0285	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0286	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0287	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0288	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0289	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0290	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0291	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0292	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0293	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0294	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0295	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang transpotasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0296	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0297	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0298	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0299	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0300	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-afirmasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-afirmasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0301	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-kinerja sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOS-kinerja sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0302	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-TPG PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-TPG PNSD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-TPG PNSD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0303	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-Tamsil guru PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-Tamsil guru PNSD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-Tamsil guru PNSD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0304	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-TKG PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-TKG PNSD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-TKG PNSD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0305	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-PAUD sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-PAUD sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0306	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-pendidikan kesetaraan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-pendidikan kesetaraan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-pendidikan kesetaraan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0307	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-museum sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-museum sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0308	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-taman budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-taman budaya sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOP-museum dan taman budaya-taman budaya sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0309	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOK sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOK sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0310	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0311	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0312	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0313	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOKB sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKKB-BOKB sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0314	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UKM sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UKM sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0315	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0316	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0317	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana bantuan BLPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana bantuan BLPS sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana bantuan BLPS sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0318	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0319	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKB-KB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKB-KB sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOKB-KB sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0320	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0321	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0322	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0323	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UMK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UMK sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-PK2UMK sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0324	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0325	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS kinerja sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOS kinerja sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0326	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0327	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD kinerja sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP PAUD kinerja sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0328	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan reguler sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan reguler sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0329	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan kinerja sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOSP-BOP kesetaraan kinerja sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0330	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK provinsi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK provinsi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0331	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0332	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0333	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK puskesmas sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-BOK dinas-BOK puskesmas sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0334	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0335	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0336	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0337	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana khusus (DAK)-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	14		Penyisihan Dana Bergulir
1	1	10	02	14	0001	Penyisihan Pokok Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan pokok dana bergulir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan pokok dana bergulir sehingga nilai pokok dana bergulir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	11	02	07		Beban Dibayar Dimuka Sewa Jasa
1	1	11	02	07	0001	Beban Dibayar Dimuka Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jasa internet.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	03			Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah
1	1	11	03	01		Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah
1	1	11	03	01	0001	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-tanah.
1	1	11	03	02		Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin
1	1	11	03	02	0001	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat besar.
1	1	11	03	02	0002	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat angkutan.
1	1	11	03	02	0003	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat ukur.
1	1	11	03	02	0004	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat pertanian.
1	1	11	03	02	0005	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat kantor dan rumah tangga.
1	1	11	03	02	0006	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat studio, komunikasi, dan pemancar.
1	1	11	03	02	0007	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat kedokteran dan kesehatan.
1	1	11	03	02	0008	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat laboratorium.
1	1	11	03	02	0009	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Persenjataan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat persenjataan.
1	1	11	03	02	0010	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Komputer
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-komputer.
1	1	11	03	02	0011	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Eksplorasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat eksplorasi.
1	1	11	03	02	0012	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat pengeboran.
1	1	11	03	02	0013	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
1	1	11	03	02	0014	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat bantu eksplorasi.
1	1	11	03	02	0015	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat keselamatan kerja.
1	1	11	03	02	0016	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-alat peraga.
1	1	11	03	02	0017	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-peralatan proses/produksi.
1	1	11	03	02	0018	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-rambu-rambu.
1	1	11	03	02	0019	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-peralatan olahraga.
1	1	11	03	03		Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan
1	1	11	03	03	0001	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-bangunan gedung.
1	1	11	03	03	0002	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Monumen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-monumen.
1	1	11	03	03	0003	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-bangunan menara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	03	03	0004	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-tugu titik kontrol/pasti.
1	1	11	03	03	0005	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-jalan, jaringan, dan irigasi.
1	1	11	03	03	0006	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-jalan dan jembatan.
1	1	11	03	03	0007	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-bangunan air.
1	1	11	03	03	0008	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-instalasi.
1	1	11	03	03	0009	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka asuransi barang milik daerah-jaringan.
1	2	02	03			Investasi Dana Abadi Daerah
1	2	02	03	01		Investasi Dana Abadi Daerah
1	2	02	03	01	0001	Investasi Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat investasi dana abadi daerah yang ditempatkan pada instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	3	08				Aset Konsesi Jasa
1	3	08	01			Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi
1	3	08	01	01		Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Tanah
1	3	08	01	01	0001	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02		Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin
1	3	08	01	02	0001	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Besar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat besar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0002	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat angkutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0003	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat bengkel dan alat ukur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0004	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0005	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat kantor dan rumah tangga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0006	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat studio, komunikasi, dan pemancar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0007	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat kedokteran dan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0008	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat laboratorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0009	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Persenjataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat persenjataan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0010	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Komputer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa komputer sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0011	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat eksplorasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0012	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat pengeboran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0013	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0014	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat bantu eksplorasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0015	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat keselamatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0016	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat praga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0017	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan Proses/Produksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan proses/produksi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0018	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa rambu-rambu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	02	0019	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	03		Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan
1	3	08	01	03	0001	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa bangunan gedung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	03	0002	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Monumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa monumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	03	0003	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa bangunan menara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	03	0004	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa tugu titik kontrol/pasti sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	04		Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	08	01	04	0001	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan dan Jembatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	04	0002	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa bangunan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	04	0003	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	04	0004	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05		Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya
1	3	08	01	05	0001	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-bahan perpustakaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0002	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0003	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0004	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-biota perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0005	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0006	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-barang koleksi non budaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	01	05	0007	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap dalam renovasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	02			Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
1	3	08	02	01		Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Tidak Dapat Disusutkan
1	3	08	02	01	0001	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Tidak Dapat Disusutkan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa bersumber dari milik mitra yang tidak dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	02	02		Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Dapat Disusutkan
1	3	08	02	02	0001	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Dapat Disusutkan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada aset konsesi jasa bersumber dari milik mitra yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	08	03			Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
1	3	08	03	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Tidak Dapat Disusutkan
1	3	08	03	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Tidak Dapat Disusutkan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra-aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra yang tidak dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	08	03	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Dapat Disusutkan
1	3	08	03	02	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra yang Dapat Disusutkan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra-aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	09				Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa
1	3	09	01			Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi
1	3	09	01	01		Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin
1	3	09	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat besar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat angkutan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat bengkel dan alat ukur yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat pertanian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	09	01	01	0005	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat kantor dan rumah tangga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0006	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat studio, komunikasi, dan pemancar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0007	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat kedokteran dan kesehatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0008	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat laboratorium yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0009	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Persenjataan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat persenjataan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0010	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Komputer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa komputer yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0011	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Eksplorasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat eksplorasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0012	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat pengeboran yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0013	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0014	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat bantu eksplorasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0015	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat keselamatan kerja yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0016	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat peraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0017	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Peralatan Proses/Produksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa peralatan proses/produksi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0018	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa rambu-rambu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	01	0019	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa peralatan olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	02		Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan
1	3	09	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa bangunan gedung yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Monumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa monumen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa bangunan menara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Tugu Titik Kontrol/Pasti

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa tugu titik kontrol/pasti yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	03		Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	09	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa jalan dan jembatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa bangunan air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Instalasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa instalasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa jaringan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04		Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya
1	3	09	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-hewan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-biota perairan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-tanaman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	09	02			Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
1	3	09	02	01		Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
1	3	09	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	5	03	02			Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud
1	5	03	02	01		Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	5	03	02	01	0001	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa *Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
1	5	03	02	01	0002	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
1	5	03	02	01	0003	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
1	5	03	02	01	0004	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1	5	03	02	01	0005	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi *Software*
						Digunakan untuk mencatat *software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
1	5	03	02	01	0006	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Kajian
						Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
1	5	03	02	01	0007	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
1	5	03	02	01	0008	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
1	5	03	02	01	0009	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat ATB lainnya.
1	5	03	02	02		Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Mitra
1	5	03	02	02	0001	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Dapat Diamortisasi
						Digunakan untuk mencatat aset konsesi jasa aset tidak berwujud yang disediakan mitra-aset konsesi jasa yang dapat diamortisasi.
1	5	03	02	02	0002	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud yang Disediakan Mitra-Aset Konsesi Jasa yang Tidak Dapat Diamortisasi
						Digunakan untuk mencatat aset konsesi jasa aset tidak berwujud yang disediakan mitra-aset konsesi jasa yang tidak dapat diamortisasi.
1	5	07	01	04		Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
1	5	07	01	04	0001	Uang Jaminan Reklamasi
						Uang yang merupakan hak pemerintah daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak diluar pemerintah daerah berupa uang jaminan reklamasi.
1	5	08				Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
1	5	08	01			Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
1	5	08	01	01		Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
1	5	08	01	01	0001	Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
						Dana bagi hasil yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan dana bagi hasil yang tidak ditentukan penggunaannya.
1	5	08	01	02		Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
1	5	08	01	02	0002	Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (*TDF*)
						Dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
1	6					PROPERTI INVESTASI
1	6	01				Properti Investasi Tanah
1	6	01	01			Properti Investasi Tanah
1	6	01	01	01		Properti Investasi Tanah
1	6	01	01	01	0001	Properti Investasi Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada properti investasi tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	02				Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	02	01			Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	02	01	01		Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	02	01	01	0001	Properti Investasi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada properti investasi bangunan gedung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	02	01	02		Properti Investasi Monumen
1	6	02	01	02	0001	Properti Investasi Monumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada properti investasi monumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	02	01	03		Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	02	01	03	0001	Properti Investasi Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada properti investasi bangunan menara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	02	01	04		Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	02	01	04	0001	Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada properti investasi tugu titik kontrol/pasti sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	03				Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
1	6	03	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	03	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	03	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan properti investasi bangunan gedung yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	03	01	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Monumen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan properti investasi monumen yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	03	01	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan properti investasi bangunan menara yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	03	01	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada konstruksi dalam pengerjaan properti investasi tugu titik kontrol/pasti yang dapat disusutkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	6	04				Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
1	6	04	01			Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
1	6	04	01	01		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung
1	6	04	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan properti investasi bangunan gedung yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	6	04	01	02		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen
1	6	04	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan properti investasi monumen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	6	04	01	03		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
1	6	04	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan properti investasi bangunan menara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	6	04	01	04		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	6	04	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan properti investasi tugu titik kontrol/pasti yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
2	1	01	05	05		Utang PPh Pasal 4 ayat (2)
2	1	01	05	05	0001	Utang PPh Pasal 4 ayat (2)
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh pasal 4 ayat (2).
2	1	01	05	06		Utang PPh Pasal 15

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	01	05	06	0001	Utang PPh Pasal 15
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh pasal 15.
2	1	01	05	07		Utang PPh Pasal 26
2	1	01	05	07	0001	Utang PPh Pasal 26
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh pasal 26.
2	1	06	01	02	0011	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	02	0012	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	02	0013	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	01	02	0014	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0015	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	06	01	02	0016	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	06	01	02	0017	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
2	1	06	01	02	0018	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	06	01	02	0019	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	06	01	02	0020	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	02	0021	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	06	01	02	0022	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	06	01	02	0023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	02	0024	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	02	0025	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	02	0026	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	01	02	0027	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
2	1	06	01	02	0028	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	06	01	02	0029	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
2	1	06	01	02	0030	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
2	1	06	01	02	0031	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
2	1	06	01	02	0032	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0033	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0034	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0035	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0036	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0037	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0038	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0039	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0040	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0041	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0042	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0043	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0044	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0045	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0046	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0047	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0048	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0050	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0051	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0052	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0053	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0054	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0055	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0056	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0057	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk meyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk meyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	02	0058	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	02	0059	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	02	0060	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	06	01	02	0061	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengguanaan tenaga kerja asing belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengguanaan tenaga kerja asing.
2	1	06	01	02	0062	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
2	1	06	01	02	0063	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan keberhasilan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan keberhasilan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0064	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	02	0065	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kergiatan usaha lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kergiatan usaha lainnya.
2	1	06	01	02	0066	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikakn, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelanggan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelanggan.
2	1	06	01	02	0067	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0068	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	06	01	02	0069	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhan.
2	1	06	01	02	0070	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	06	01	02	0071	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha- retribusi pelayanan pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0072	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	06	01	02	0073	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
2	1	06	01	02	0074	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	02	0075	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	02	0076	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbagan lainnya ASN-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	02	0077	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
2	1	06	01	02	0078	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan badan milik daerah yang menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan badan milik daerah yang menghasilkan pendapatan.
2	1	06	01	02	0079	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan badan milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan badan milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	06	01	02	0080	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	06	01	02	0081	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	06	01	02	0082	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN- yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	02	0083	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu daerah.
2	1	06	01	03	0063	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
2	1	06	01	03	0064	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	03	0065	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	06	01	03	0066	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaran bermotor.
2	1	06	01	03	0067	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	0068	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kebersihan.
2	1	06	01	03	0069	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daereh-pengendalilan lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalilan lalu lintas.
2	1	06	01	03	0070	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daereh-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnnya yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnnya.
2	1	06	01	03	0071	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	06	01	03	0072	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	06	01	03	0073	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah pemotongan hewan ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	06	01	03	0074	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan jasa kepelabuhan ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan jasa kepelabuhan.
2	1	06	01	03	0075	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	06	01	03	0076	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	06	01	03	0077	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	06	01	03	0078	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemanfaatan aset daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemanfaatan aset daerah.
2	1	06	01	05	0061	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat.
2	1	06	01	05	0062	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	05	0063	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	06	01	05	0064	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0065	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0066	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
2	1	06	01	05	0067	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	05	0068	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0069	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	06	01	05	0070	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	06	01	05	0071	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	06	01	05	0072	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhan.
2	1	06	01	05	0073	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	06	01	05	0074	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaran di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaran di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0075	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	06	01	05	0076	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	06	02	01	0868	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-barang sampel pangan yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-barang sampel pangan.
2	1	06	02	02	1045	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat.
2	1	06	02	02	1046	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	02	02	1047	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	06	02	02	1048	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor tertentu yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	1049	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor tertentu yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	1050	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan tertentu yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
2	1	06	02	02	1051	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	02	02	1052	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	06	02	02	1053	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	06	02	02	1054	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai nonASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	06	02	02	1055	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	06	02	02	1056	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhan yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhan.
2	1	06	02	02	1057	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	1058	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	06	02	02	1059	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	06	02	02	1060	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	06	02	02	1061	Utang Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-sewa jasa internet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-sewa jasa internet.
2	1	06	02	02	1062	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan.
2	1	06	02	02	1063	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
2	1	06	02	02	1064	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	1065	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa.
2	1	06	02	02	1066	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1067	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1068	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1069	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1070	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kesehatan Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kesehatan Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1071	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	1072	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian kerja Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian kerja Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1073	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1074	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1075	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Wali Nanggroe.
2	1	06	02	02	1076	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1077	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1078	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1079	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-transportasi Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1080	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1081	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1082	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1083	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pakaian dinas Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pakaian dinas Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1084	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1085	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi.
2	1	06	02	02	1086	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-representasi majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-representasi majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1087	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1088	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1089	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1090	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kesehatan majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kesehatan majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1091	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1092	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1093	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1094	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1095	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi.
2	1	06	02	02	1096	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1097	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1098	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1099	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan tansportasi majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1100	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1101	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1102	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1103	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1104	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional.
2	1	06	02	02	1105	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional terjadinya transaksi belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional.
2	1	06	02	05	0016	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang.
2	1	07	01	01	0173	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	01	0174	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0175	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0176	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0177	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	01	0178	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-umum.
2	1	07	01	01	0179	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintahpusat.
2	1	07	01	01	0180	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0181	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi.
2	1	07	01	01	0182	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-umum.
2	1	07	01	01	0183	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0184	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotorKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0185	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi.
2	1	07	01	01	0186	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum.
2	1	07	01	01	0187	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0188	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0189	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	01	0190	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	01	0191	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	01	0192	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	01	0193	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Belerang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-belarang.
2	1	07	01	01	0194	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambahan mineral.
2	1	07	01	01	0195	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak alat berat.
2	1	07	01	01	0196	Utang Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	01	0197	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	01	0198	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau ketering.
2	1	07	01	01	0199	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	01	0200	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	01	0201	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	07	01	01	0202	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0203	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	01	0204	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	01	0205	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	07	01	01	0206	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	01	0207	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisata pariwisata.
2	1	07	01	01	0208	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	01	0209	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	01	0210	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	01	0211	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	07	01	01	0212	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0213	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
2	1	07	01	01	0214	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	07	01	01	0215	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	01	0216	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	01	0217	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	07	01	01	0218	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	01	0219	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	01	0220	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	0221	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	07	01	01	0222	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	01	0223	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	01	0224	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
2	1	07	01	01	0225	Utang Kelebihan Pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karoke, kelab malam, bar, dan mandi uang/spa.
2	1	07	01	01	0226	Utang Kelebihan Pembayaran Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	0227	Utang Kelebihan Pembayaran Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	02	0073	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	07	01	02	0074	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	02	0075	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2	1	07	01	02	0076	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	02	0077	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan ushaa berupa pasar, grosir, petokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya .
2	1	07	01	02	0078	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	02	0079	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	02	0080	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyedian tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0081	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	02	0082	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	02	0083	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	02	0084	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	02	0085	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	02	0086	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pedapatan denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	04	7489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-umum.
2	1	07	01	04	7490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	7491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	04	7493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-umum.
2	1	07	01	04	7494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	7495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi.
2	1	07	01	04	7497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-umum.
2	1	07	01	04	7498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	7499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi.
2	1	07	01	04	7501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum.
2	1	07	01	04	7502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	7503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daeah.
2	1	07	01	04	7504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	04	7505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	04	7506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	04	7507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	04	7508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang.
2	1	07	01	04	7509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan- mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	07	01	04	7510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak alat berat.
2	1	07	01	04	7511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	07	01	04	7512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	04	7513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	07	01	04	7514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	04	7515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	04	7516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	07	01	04	7517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	07	01	04	7518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	04	7519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	04	7520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	07	01	04	7521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	04	7522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
2	1	07	01	04	7523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	04	7524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	04	7525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	04	7526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	07	01	04	7527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempatparkir.
2	1	07	01	04	7528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	07	01	04	7530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	04	7531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	04	7532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	07	01	04	7533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	04	7534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	04	7535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	07	01	04	7537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	04	7538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	04	7539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan panti refleksi.
2	1	07	01	04	7540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	07	01	04	7541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	07	01	04	7544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyeditan kakus.
2	1	07	01	04	7545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tanngga, perkantoran, dan industri.
2	1	07	01	04	7546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	7547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, petokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	04	7548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	04	7551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	04	7552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	04	7554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	04	7555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat.
2	1	07	01	04	7558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	7559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	07	01	04	7560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
2	1	07	01	04	7563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi jasa umum-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	7564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	04	7565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	04	7567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASNInsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	04	7568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi.
2	1	07	01	04	7570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	04	7571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	7575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	07	01	04	7576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	7580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	04	7581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	04	7584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	04	7586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	04	7587	PUtang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat.
2	1	07	01	04	7590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	7591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	07	01	04	7592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
2	1	07	01	04	7595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	7596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	04	7599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	04	7600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat reke]reasim pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	04	7602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	04	7603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa sewa internet.
2	1	07	01	04	7606	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pungutan bagi wisatawan asing.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang.
2	1	07	01	04	7608	Utang Kelebihan Pembayaran atas Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas hasil pengelolaan dana abadi daerah.
2	1	07	01	04	7609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang sampel pangan.
2	1	07	01	04	7610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan.
2	1	07	01	04	7611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaran bermotor.
2	1	07	01	04	7612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	07	01	04	7615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	07	01	04	7616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	07	01	04	7617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	07	01	04	7619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	07	01	04	7620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	04	7621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	07	01	04	7622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	04	7624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	7625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	04	7626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	04	7627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	7629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu.
2	1	07	01	04	7630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	04	7634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	07	01	04	7635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	04	7636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	07	01	04	7637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	7638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	7639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	07	01	04	7640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	07	01	04	7643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	07	01	04	7644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	7645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	07	01	04	7646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	07	01	04	7647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	07	01	04	7649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	07	01	04	7650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	07	01	04	7652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	04	7654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	07	01	04	7655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan peroduksi usaha daerah.
2	1	07	01	04	7656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	04	7657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	04	7658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	07	01	04	7659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	04	7661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing.
2	1	07	01	04	7662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
2	1	07	01	04	7663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
2	1	07	01	04	7664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	7665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	04	7666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	7667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	04	7668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	04	7669	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	7670	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	04	7671	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	04	7672	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	7673	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	04	7674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	01	04	7675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	01	04	7676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	01	04	7677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
2	1	07	01	04	7678	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilan pendapatan.
2	1	07	01	04	7679	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilan pendapatan.
2	1	07	01	04	7680	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	07	01	04	7681	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	07	01	04	7682	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	07	01	04	7683	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah.
2	1	07	01	04	7684	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
2	1	07	01	04	7685	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa.
2	1	07	01	04	7686	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
2	1	07	01	04	7687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7688	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7689	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7690	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan tranportasi Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7691	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7692	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7693	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7694	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7695	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7696	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembualatan gaji Wali Nanggroe.
2	1	07	01	04	7697	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7698	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	7699	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7700	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7701	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7702	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7703	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7704	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7705	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7706	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi.
2	1	07	01	04	7707	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7708	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7709	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7710	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7711	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7712	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7713	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7714	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7715	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7716	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi.
2	1	07	01	04	7717	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7718	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7719	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7720	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7721	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7722	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7723	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7724	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7725	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali v-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional.
2	1	07	01	04	7726	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional.
2	1	07	02	01	0139	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-dana bagi hasil sawit.
2	1	07	02	01	0140	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Papua-dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Papua.
2	1	07	02	01	0141	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Aceh-dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Aceh.
2	1	07	02	01	0142	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-pendidikan anak usia dini.
2	1	07	02	01	0143	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SD.
2	1	07	02	01	0144	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMP.
2	1	07	02	01	0145	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar.
2	1	07	02	01	0146	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMA.
2	1	07	02	01	0147	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMK.
2	1	07	02	01	0148	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SLB.
2	1	07	02	01	0149	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan.
2	1	07	02	01	0150	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting*.
2	1	07	02	01	0151	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0152	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga bencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0153	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konertivitas daerah.
2	1	07	02	01	0154	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0155	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektifitas di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0156	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate*.
2	1	07	02	01	0157	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0158	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2	1	07	02	01	0159	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan pemukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0160	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kulitas sumber daya manusia.
2	1	07	02	01	0161	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0162	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0163	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate.*
2	1	07	02	01	0164	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0165	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate*.
2	1	07	02	01	0166	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0167	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0168	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0169	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0170	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0171	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0172	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang trasportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0173	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang trasportasi pedesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0174	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0175	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0176	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang insfrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0177	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru.
2	1	07	02	01	0178	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru.
2	1	07	02	01	0179	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru.
2	1	07	02	01	0180	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana
2	1	07	02	01	0181	Utang Kelebihan Pembayaran Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahunan.
2	1	07	02	01	0182	Utang Kelebihan Pembayaran Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
2	1	07	02	01	0183	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil pajak-dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
2	1	07	02	01	0184	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil pajak-dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21.
2	1	07	02	01	0185	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil pajak-dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2	1	07	02	01	0186	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil pajak-dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
2	1	07	02	01	0187	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi.
2	1	07	02	01	0188	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi.
2	1	07	02	01	0189	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi.
2	1	07	02	01	0190	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*landrent*.
2	1	07	02	01	0191	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty*.
2	1	07	02	01	0192	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provinsi sumber daya hutan.
2	1	07	02	01	0193	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
2	1	07	02	01	0194	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi.
2	1	07	02	01	0195	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil sumber daya alam perikanan.
2	1	07	02	01	0196	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil-dana bagi hasil sumber daya alam-dana bagi hasil lainnya-dana bagi hasil sawit.
2	1	07	02	01	0197	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum.
2	1	07	02	01	0198	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0199	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2	1	07	02	01	0200	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	07	02	01	0201	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan.
2	1	07	02	01	0202	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan.
2	1	07	02	01	0203	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi umum-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum.
2	1	07	02	01	0204	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD.
2	1	07	02	01	0205	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD.
2	1	07	02	01	0206	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP.
2	1	07	02	01	0207	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA.
2	1	07	02	01	0208	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB.
2	1	07	02	01	0209	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB.
2	1	07	02	01	0210	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD.
2	1	07	02	01	0211	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP.
2	1	07	02	01	0212	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA.
2	1	07	02	01	0213	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK
2	1	07	02	01	0214	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakan daerah.
2	1	07	02	01	0215	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga.
2	1	07	02	01	0216	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-pelayanan kesehatan dasar.
2	1	07	02	01	0217	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-pelayanan kesehatan rujukan.
2	1	07	02	01	0218	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-pelayanan kefarmasian.
2	1	07	02	01	0219	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
2	1	07	02	01	0220	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-penguatan intervensi *stunting*.
2	1	07	02	01	0221	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat.
2	1	07	02	01	0222	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-penguatan rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata.
2	1	07	02	01	0223	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-pembangunan rumah sakit pratama.
2	1	07	02	01	0224	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-puskesmas pariwisata.
2	1	07	02	01	0225	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-balai pelatihan kesehatan.
2	1	07	02	01	0226	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan.
2	1	07	02	01	0227	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas.
2	1	07	02	01	0228	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0229	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-penurunan *stunting* keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0230	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan pemukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya.
2	1	07	02	01	0231	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan pemukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya.
2	1	07	02	01	0232	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan pemukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus.
2	1	07	02	01	0233	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra industri kecil dan menengah dan revitalisasi sentra industri kecil menengah.
2	1	07	02	01	0234	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian.
2	1	07	02	01	0235	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan.
2	1	07	02	01	0236	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan.
2	1	07	02	01	0237	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan.
2	1	07	02	01	0238	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan.
2	1	07	02	01	0239	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan.
2	1	07	02	01	0240	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-reguler.
2	1	07	02	01	0241	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-afirmasi.
2	1	07	02	01	0242	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan.
2	1	07	02	01	0243	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0244	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi.
2	1	07	02	01	0245	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan.
2	1	07	02	01	0246	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan.
2	1	07	02	01	0247	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pasar-penugasan.
2	1	07	02	01	0248	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup.
2	1	07	02	01	0249	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan.
2	1	07	02	01	0250	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi pedesaan-afirmasi.
2	1	07	02	01	0251	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi.
2	1	07	02	01	0252	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-penugasan.
2	1	07	02	01	0253	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sosial-reguler.
2	1	07	02	01	0254	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan
2	1	07	02	01	0255	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0256	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-reguler.
2	1	07	02	01	0257	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi pedesaan-reguler.
2	1	07	02	01	0258	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-penugasan-keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0259	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan.
2	1	07	02	01	0260	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
2	1	07	02	01	0261	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting*.
2	1	07	02	01	0262	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-pengendalian penyakit.
2	1	07	02	01	0263	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penguatan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0264	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-penugasan.
2	1	07	02	01	0265	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan.
2	1	07	02	01	0266	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-penugasan.
2	1	07	02	01	0267	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang tranportasi pedesaan-penugasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0268	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang insfrastruktur energi terbarukan.
2	1	07	02	01	0269	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-pendidikan anak usia dini.
2	1	07	02	01	0270	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah dasar
2	1	07	02	01	0271	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah pertama.
2	1	07	02	01	0272	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar.
2	1	07	02	01	0273	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah atas.
2	1	07	02	01	0274	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah kejuruan.
2	1	07	02	01	0275	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah luar biasa.
2	1	07	02	01	0276	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan.
2	1	07	02	01	0277	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting*.
2	1	07	02	01	0278	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0279	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0280	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah.
2	1	07	02	01	0281	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0282	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0283	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0284	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0285	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kulitas sumber daya manusia.
2	1	07	02	01	0286	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0287	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2	1	07	02	01	0288	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan pemukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0289	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.
2	1	07	02	01	0290	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate*.
2	1	07	02	01	0291	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0292	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate*.
2	1	07	02	01	0293	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0294	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
2	1	07	02	01	0295	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0296	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0297	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0298	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0299	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0300	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi pedesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0301	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* .
2	1	07	02	01	0302	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.
2	1	07	02	01	0303	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2	1	07	02	01	0304	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah reguler.
2	1	07	02	01	0305	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah afirmasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0306	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah kinerja.
2	1	07	02	01	0307	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	02	01	0308	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	02	01	0309	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	07	02	01	0310	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
2	1	07	02	01	0311	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
2	1	07	02	01	0312	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya-museum.
2	1	07	02	01	0313	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya-taman budaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0314	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
2	1	07	02	01	0315	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-pengawasan obat dan makanan.
2	1	07	02	01	0316	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
2	1	07	02	01	0317	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-jaminan persalinan.
2	1	07	02	01	0318	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0319	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2	1	07	02	01	0320	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan.
2	1	07	02	01	0321	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-pelayanan kepariwisataan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0322	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah.
2	1	07	02	01	0323	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal.
2	1	07	02	01	0324	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-biaya operasional keluarga berencana-keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0325	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
2	1	07	02	01	0326	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian.
2	1	07	02	01	0327	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.
2	1	07	02	01	0328	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil.
2	1	07	02	01	0329	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler.
2	1	07	02	01	0330	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja.
2	1	07	02	01	0331	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan pendidikan anak usia dini reguler.
2	1	07	02	01	0332	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan pendidikan anak usia dini kinerja.
2	1	07	02	01	0333	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler.
2	1	07	02	01	0334	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja.
2	1	07	02	01	0335	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan provinsi.
2	1	07	02	01	0336	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota.
2	1	07	02	01	0337	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.
2	1	07	02	01	0338	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas.
2	1	07	02	01	0339	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru.
2	1	07	02	01	0340	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru.
2	1	07	02	01	0341	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru.
2	1	07	02	01	0342	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana.
2	1	07	03	02	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah provinsi.
2	1	07	03	02	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota penghasil dalam provinsi.
2	1	07	03	02	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.
2	1	07	03	02	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2	2	05				Kewajiban Konsesi Jasa
2	2	05	01			Kewajiban Konsesi Jasa
2	2	05	01	01		Kewajiban Konsesi Jasa
2	2	05	01	01	0001	Kewajiban Konsesi Jasa
						Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa.
2	2	05	01	01	0002	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran kepada Mitra
						Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra.
2	2	05	01	01	0003	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra
						Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra.

J. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	01	15		PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	01	15	0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	15	0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-roda tiga-umum.
4	1	01	01	15	0003	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	15	0004	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	01	01	16		PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	01	16	0001	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang-roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	16	0002	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang-roda tiga-umum.
4	1	01	01	16	0003	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	16	0004	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	01	01	17		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	01	17	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up box-pribadi.
4	1	01	01	17	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up box-umum.
4	1	01	01	17	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up box-pemerintah pusat.
4	1	01	01	17	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up box-pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	01	18		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	01	18	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi.
4	1	01	01	18	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum.
4	1	01	01	18	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat.
4	1	01	01	18	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah.
4	1	01	02	15		BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	02	15	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	16		BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	02	16	0001	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang-roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	17		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	02	17	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up box sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	18		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	02	18	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	14	38		Pajak Belerang
4	1	01	14	38	0001	Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa belerang.
4	1	01	14	39		Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	01	14	39	0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
4	1	01	17			Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01		Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01	0001	Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara perrnanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
4	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	01	18	01		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	01	18	01	0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4	1	01	19	01		PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4	1	01	19	01	0001	PBJT-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh restoran.
4	1	01	19	01	0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penyedia jasa boga atau katering.
4	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik
4	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik yang berasal dari sumber lain.
4	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik yang dihasilkan sendiri.
4	1	01	19	03		PBJT-Jasa Perhotelan
4	1	01	19	03	0001	PBJT-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa hotel.
4	1	01	19	03	0002	PBJT-Hostel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa hostel.
4	1	01	19	03	0003	PBJT-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa vila.
4	1	01	19	03	0004	PBJT-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa pondok wisata.
4	1	01	19	03	0005	PBJT-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa motel.
4	1	01	19	03	0006	PBJT-Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa losmen.
4	1	01	19	03	0007	PBJT-Wisma Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa wisma pariwisata.
4	1	01	19	03	0008	PBJT-Pesanggarahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa pesanggrahan.
4	1	01	19	03	0009	PBJT-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/Resort/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*.
4	1	01	19	03	0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
4	1	01	19	03	0011	PBJT-Glamping
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu dalam bentuk jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya berupa glamping.
4	1	01	19	04		PBJT-Jasa Parkir
4	1	01	19	04	0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	19	04	0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	19	05		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
4	1	01	19	05	0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
4	1	01	19	05	0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
4	1	01	19	05	0003	PBJT-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk kontes kecantikan.
4	1	01	19	05	0004	PBJT-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk kontes binaraga.
4	1	01	19	05	0005	PBJT-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk pameran.
4	1	01	19	05	0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
4	1	01	19	05	0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
4	1	01	19	05	0008	PBJT-Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk permainan ketangkasan.
4	1	01	19	05	0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
4	1	01	19	05	0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
4	1	01	19	05	0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk panti pijat dan pijat refleksi.
4	1	01	19	05	0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dalam bentuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
4	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	20	01		Opsen PKB
4	1	01	20	01	0001	Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	21	01		Opsen BBNKB
4	1	01	21	01	0001	Opsen BBNKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	14		Retribusi Pelayanan Kebersihan
4	1	02	01	14	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berupa pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4	1	02	01	14	0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berupa penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	02	01	14	0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berupa pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
4	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
4	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	02	02	12	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	13		Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	13	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan termasuk tempat yang disewa oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	13	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk tempat yang disewa oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	15		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	02	02	15	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	02	02	16	0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
4	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	18		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	02	02	18	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	02	02	20	0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	12	01	0071	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pribadi.
4	1	04	12	01	0072	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-umum.
4	1	04	12	01	0073	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0074	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0075	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pribadi.
4	1	04	12	01	0076	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-umum.
4	1	04	12	01	0077	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0078	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0079	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box-pribadi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	01	0080	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box-umum.
4	1	04	12	01	0081	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0082	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0083	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi.
4	1	04	12	01	0084	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum.
4	1	04	12	01	0085	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0086	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah.
4	1	04	12	02	0015	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
4	1	04	12	02	0016	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
4	1	04	12	02	0017	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.
4	1	04	12	02	0018	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
4	1	04	12	14	0038	Pendapatan Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak belerang.
4	1	04	12	14	0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
4	1	04	12	17		Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
4	1	04	12	17	0001	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak alat berat.
4	1	04	12	18		Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	04	12	18	0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	12	19		Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4	1	04	12	19	0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
4	1	04	12	19	0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
4	1	04	12	19	0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
4	1	04	12	19	0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
4	1	04	12	19	0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
4	1	04	12	19	0006	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
4	1	04	12	19	0007	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
4	1	04	12	19	0008	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
4	1	04	12	19	0009	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
4	1	04	12	19	0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
4	1	04	12	19	0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
4	1	04	12	19	0012	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
4	1	04	12	19	0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*.
4	1	04	12	19	0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
4	1	04	12	19	0015	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping.
4	1	04	12	19	0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
4	1	04	12	19	0017	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	19	0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
4	1	04	12	19	0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
4	1	04	12	19	0020	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
4	1	04	12	19	0021	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
4	1	04	12	19	0022	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
4	1	04	12	19	0023	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
4	1	04	12	19	0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
4	1	04	12	19	0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
4	1	04	12	19	0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	19	0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
4	1	04	12	19	0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
4	1	04	12	19	0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
4	1	04	12	20		Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	20	0001	Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	12	21		Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	21	0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	13	01	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
4	1	04	13	01	0047	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	13	01	0048	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
4	1	04	13	01	0049	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	13	02	0037	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	13	02	0038	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	0039	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	0040	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
4	1	04	13	02	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
4	1	04	13	02	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4	1	04	13	02	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	13	02	0045	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
4	1	04	13	02	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	09	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
4	1	04	15	09	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
4	1	04	15	09	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
4	1	04	15	09	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
4	1	04	15	09	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
4	1	04	15	09	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
4	1	04	15	09	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
4	1	04	15	09	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
4	1	04	15	09	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
4	1	04	15	09	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
4	1	04	15	09	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	09	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
4	1	04	15	09	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	15	09	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
4	1	04	15	09	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu.
4	1	04	15	09	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
4	1	04	15	09	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	15	09	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	15	09	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
4	1	04	15	09	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	09	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	09	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	15	09	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
4	1	04	15	09	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	15	09	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
4	1	04	15	09	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	15	09	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-kekayaan daerah.
4	1	04	15	09	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
4	1	04	15	09	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal.
4	1	04	15	09	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
4	1	04	15	09	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	04	15	09	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
4	1	04	15	09	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	15	09	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
4	1	04	15	09	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	15	09	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	15	09	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	15	09	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	09	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
4	1	04	15	09	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing.
4	1	04	15	09	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
4	1	04	15	09	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
4	1	04	15	09	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	15	09	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
4	1	04	15	09	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
4	1	04	15	09	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
4	1	04	15	09	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4	1	04	15	09	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	15	09	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
4	1	04	15	09	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	09	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru PNSD.
4	1	04	15	09	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru PNSD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan guru PNSD.
4	1	04	15	09	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
4	1	04	15	09	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	09	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	09	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru PPPK.
4	1	04	15	09	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru PPPK.
4	1	04	15	09	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan guru PPPK.
4	1	04	15	09	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu daerah.
4	1	04	15	10	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat.
4	1	04	15	10	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	10	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
4	1	04	15	10	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
4	1	04	15	10	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	15	10	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
4	1	04	15	10	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
4	1	04	15	10	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
4	1	04	15	10	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
4	1	04	15	10	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	15	10	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
4	1	04	15	10	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	12	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat.
4	1	04	15	12	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	12	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
4	1	04	15	12	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	12	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	12	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
4	1	04	15	12	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	12	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	15	12	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	12	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat
4	1	04	15	12	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
4	1	04	15	12	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
4	1	04	15	12	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4	1	04	15	12	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	15	12	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	12	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	15	0868	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang sampel pangan.
4	1	04	15	16	1045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat.
4	1	04	15	16	1046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	16	1047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
4	1	04	15	16	1048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	1049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
4	1	04	15	16	1051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	16	1052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	15	16	1053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
4	1	04	15	16	1054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
4	1	04	15	16	1055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
4	1	04	15	16	1056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
4	1	04	15	16	1057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4	1	04	15	16	1058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	15	16	1059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
4	1	04	15	16	1060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	16	1061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-sewa jasa internet.
4	1	04	15	16	1062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan.
4	1	04	15	16	1063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
4	1	04	15	16	1064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15	16	1065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa.
4	1	04	15	16	1066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe jaminan kematian Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe pembebanan PPh Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe pembulatan gaji Wali Nanggroe.
4	1	04	15	16	1076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe uang representasi Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe tunjangan keluarga Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Waliyul Ahdi.
4	1	04	15	16	1086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Majelis Tinggi.
4	1	04	15	16	1096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-uang representasi Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan keluarga Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan jabatan Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan transportasi Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-jaminan kematian Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembebanan PPh Majelis Fungsional.
4	1	04	15	16	1105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe-pembulatan gaji Majelis Fungsional.
4	1	04	15	18	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang.
4	1	04	24			Pungutan bagi Wisatawan Asing
4	1	04	24	01		Pungutan bagi Wisatawan Asing
4	1	04	24	01	0001	Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali dan diperuntukkan dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
4	1	04	25			Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
4	1	04	25	01		Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
4	1	04	25	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana abadi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah dengan ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	01	0014	DBH Sawit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi PAUD berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD dengan tingkat kerusakan minimal sedang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD, serta pengadaan sarana pembelajaran PAUD, dan pembangunan baru PAUD berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembeiajaran dan prasarana penunjang SD, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD, dan pengadaan sarana pembelajaran SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP, serta pengadaan sarana pembelajaran SMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB, serta pengadaan sarana pembelajaran SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SMA berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA, serta pengadaan sarana pembelajaran SMA, dan pembangunan baru SMA berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SMK berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK, serta pengadaan sarana pembelajaran SMK, dan pembangunan baru SMK berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SLB berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, serta pengadaan sarana pembelajaran SLB, dan pembangunan baru SLB berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dankabupaten/kota, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, serta pengadaan bahan perpustakaan dalam bentuk cetak dan/atau digital untuk perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, peralatan imunisasi dasar lengkap, penyediaan unit transfusi darah, penguatan *Public Savety Center* 119, dan penyediaan alat surveilans gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas, penguatan layanan primer, peralatan pengendalian penyakit, pembangunan RS pratama, pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, penguatan layanan rujukan, peningkatan laboratorium kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota, serta penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan vasektomi tanpa pisau (VTP) kit, pengadaan mini laparotomi/tubektomi set, pengadaan laparoskopi dengan kamera dan monitor, pembangunan/rehab/kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengadaan implant removal kit, pengadaan IUD kit, pengadaan kendaraan roda empat atau lebih antarjemput calon akseptor, pengadaan kendaraan roda dua antarjemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antarjemput calon akseptor, serta pembangunan/rehab/kelengkapan balai penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
4	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DBH minyak dan gas otonomi khusus Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
4	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DBH minyak dan gas otonomi khusus Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	06	02		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
4	2	01	06	02	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kinerja tahun sebelumnya atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	06	03		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
4	2	01	06	03	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07			Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	07	01		DBH Pajak
4	2	01	07	01	0001	DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	01	0002	DBH PPh Pasal 21

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02		DBH Sumber Daya Alam (SDA)
4	2	01	07	02	0001	DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0002	DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*landrent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	07	02	0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	02	0009	DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	07	03		DBH Lainnya
4	2	01	07	03	0001	DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08			Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	08	01		DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
4	2	01	08	01	0001	DAU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya
4	2	01	08	02	0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02	0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	08	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09			Dana Alokasi Khusus (DAK)
4	2	01	09	01		DAK Fisik
4	2	01	09	01	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitasi layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan, Rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten I Kota (lFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (lFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, Penguatan RS PONEK dan Penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai *Therapeutic Feeding Center* (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, penyediaan alat antropometri dan penyediaan obat gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat single gardan/double gardan, pusling air, ambulans transport single gardan/double gardan, ambulans PSC 119, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Puskesmas, Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, Perawat dan Bidan), Penyediaan Prasana Kendaraan Bermotor di Puskesmas, Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (*generator set/energy* terbarukan), Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana, pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), pengadaan sarana transportasi pelayanan KB, pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan, pengadaan media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan, pengadaan sarana petugas lapangan KB, pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan BKB Kit dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan/atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik secara insitu maupun relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indicator kelayakan rumah dan bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam hamparan melalui DAK fisik jenis afirmasi pada tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan type 36 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan/renovasi UPTD/balai proteksi/balai perbenihan/perbibitan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, kegiatan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit, *long storage* dan pintu air di kabupaten/kota, pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut, pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil, pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana tambak garam, rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota), pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah kabupaten/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah kabupaten/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di daerah afirmasi (kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas *stunting*, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulaupulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah
4	2	01	09	01	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepuiauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kola perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan kegiatan fisik berupa pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupatenf Kota yal1g terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariu,isata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transpotasi laut-reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transpotasi perdesaan-reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi PAUD berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD dengan tingkat kerusakan minimal sedang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD, serta pengadaan sarana pembelajaran PAUD, dan pembangunan baru PAUD berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembeiajaran dan prasarana penunjang SD, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD, dan pengadaan sarana pembelajaran SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP, serta pengadaan sarana pembelajaran SMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB, serta pengadaan sarana pembelajaran SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SMA berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA, serta pengadaan sarana pembelajaran SMA, dan pembangunan baru SMA berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SMK berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK, serta pengadaan sarana pembelajaran SMK, dan pembangunan baru SMK berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai revitalisasi SLB berupa rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, serta pengadaan sarana pembelajaran SLB, dan pembangunan baru SLB berupa pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dankabupaten/kota, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, serta pengadaan bahan perpustakaan dalam bentuk cetak dan/atau digital untuk perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, peralatan imunisasi dasar lengkap, penyediaan unit transfusi darah, penguatan *Public Savety Center* 119, dan penyediaan alat surveilans gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas, penguatan layanan primer, peralatan pengendalian penyakit, pembangunan RS pratama, pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, penguatan layanan rujukan, peningkatan laboratorium kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota, serta penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan vasektomi tanpa pisau (VTP) kit, pengadaan mini laparotomi/tubektomi set, pengadaan laparoskopi dengan kamera dan monitor, pembangunan/rehab/kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengadaan implant removal kit, pengadaan IUD kit, pengadaan kendaraan roda empat atau lebih antarjemput calon akseptor, pengadaan kendaraan roda dua antarjemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antarjemput calon akseptor, serta pembangunan/rehab/kelengkapan balai penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	01	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	01	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02		DAK Non Fisik
4	2	01	09	02	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-BOKB-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-PK2UMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan provinsi yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN-tunjangan profesi guru yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN-tambahan penghasilan guru yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN-tunjangan khusus guru yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	02	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	03			Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4	3	03	03	01		Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4	3	03	03	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang IUPK berupa izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	03	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang IUPK berupa izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada Pemerintah kabupaten/kota penghasil dalam provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	03	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang IUPK berupa izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	04			Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	3	03	04	01		Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
4	3	03	04	01	0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta diperuntukkan dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	02	06		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	01	02	06	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	02	06	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	02	06	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	06	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	02	06	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak barang dan jasa tertentu yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	02	06	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	06	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0033	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	06	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0046	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0048	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0049	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0052	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0054	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0058	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0061	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	06	0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	02	06	0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	02	06	0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan khusus guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	02	06	0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	02	06	0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	01	02	06	0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang serta pejabat dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
5	1	01	02	06	0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	01	02	06	0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
5	1	01	02	06	0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat tunjangan khusus guru bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	06	0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
5	1	01	02	06	0073	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat tunjangan khusus bagi penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu daerah.
5	1	01	03	01	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak barang dan jasa tertentu yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	02	0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	02	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	05	10	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak alat berat.
5	1	01	05	10	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	01	05	10	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
5	1	01	05	10	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	01	05	11	0034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi umum-pelayanan kebersihan.
5	1	01	05	11	0035	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi umum-pengendalilan lalu lintas.
5	1	01	05	11	0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
5	1	01	05	11	0037	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
5	1	01	05	11	0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
5	1	01	05	11	0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
5	1	01	05	11	0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
5	1	01	05	11	0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
5	1	01	05	11	0042	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
5	1	01	05	11	0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
5	1	01	05	11	0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi usaha-pemanfaatan aset daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	01	01	0079	Belanja Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang sampel pangan dalam rangka pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji.
5	1	02	02	01	0078	Belanja Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jasa internet.
5	1	02	02	01	0079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengujian sampel pangan dalam rangka pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji.
5	1	02	02	01	0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
5	1	02	02	01	0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat honorarium pengadaan barang/jasa.
5	1	02	02	01	0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
5	1	02	02	13	0017	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak alat berat oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0018	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan opsen pajak barang dan jasa tertentu oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0034	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	14	0035	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0037	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0039	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0040	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0041	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0042	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	14	0043	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0044	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	16		Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
5	1	02	02	16	0001	Belanja Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0002	Belanja Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0003	Belanja Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0004	Belanja Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0007	Belanja Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0008	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan pakaian dinas Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0009	Belanja Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0010	Belanja Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji Wali Nanggroe.
5	1	02	02	16	0011	Belanja Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0012	Belanja Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0013	Belanja Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan Waliyul Ahdi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	16	0014	Belanja Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0015	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0016	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0017	Belanja Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0018	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan pakaian dinas Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0019	Belanja Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0020	Belanja Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji Waliyul Ahdi.
5	1	02	02	16	0021	Belanja Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0022	Belanja Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0023	Belanja Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0024	Belanja Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0025	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0026	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0027	Belanja Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0028	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan pakaian dinas Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0029	Belanja Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh Majelis Tinggi.
5	1	02	02	16	0030	Belanja Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji Majelis Tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	16	0031	Belanja Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0032	Belanja Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0033	Belanja Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0034	Belanja Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0035	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0036	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0037	Belanja Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0038	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan pakaian dinas Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0039	Belanja Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh Majelis Fungsional.
5	1	02	02	16	0040	Belanja Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji Majelis Fungsional.
5	1	02	05	01	0014	Belanja Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan Non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk memberli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh.
6	1	01	01	01	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak alat berat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa opsen pajak barang dan jasa tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa opsen pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa opsen bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0023	Pelampauan Penerimaan PAD-Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pungutan bagi wisatawan asing dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0024	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana abadi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0130	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi hasil-DBH sawit dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0131	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0132	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0133	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0134	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0135	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Papua-DBH minyak dan gas otonomi khusus Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0136	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil minyak dan gas otonomi khusus Aceh-DBH minyak dan gas otonomi khusus Aceh dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0137	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0138	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0139	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0140	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0141	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0142	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0143	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0144	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0145	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0146	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0147	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0148	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0149	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0150	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0151	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0152	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0153	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0154	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0155	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0156	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0157	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0158	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0159	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0160	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0161	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0162	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0163	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0164	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0165	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0166	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0167	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0168	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0169	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0170	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0171	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0172	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0173	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0174	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0175	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH pajak-DBH PBB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0177	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH pajak-DBH PPh Pasal 21 dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0178	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0179	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH pajak-DBH cukai hasil tembakau dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0180	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA minyak bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0181	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA gas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0182	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA pengusahaan panas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0183	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0185	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0187	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0188	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH SDA-DBH SDA perikanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0189	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil-DBH lainnya-DBH sawit dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang tidak ditentukan penggunaannya-DAU dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0191	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0192	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0193	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0194	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya-bidang pendidikan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0195	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya-bidang kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0196	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi umum-DAU yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya-bidang pekerjaan umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0197	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0198	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0199	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0200	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0201	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0202	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0203	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0204	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0205	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0206	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0207	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0208	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0209	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0210	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0211	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0212	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0213	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0214	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0215	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0216	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0217	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0218	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0219	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0220	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0221	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0222	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0223	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0224	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0225	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0226	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0227	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0228	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0229	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0230	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0231	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0232	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0233	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang air minum-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0234	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0235	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang air minum-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0236	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0237	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0238	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0239	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0240	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pasar-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0241	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0242	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0243	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0244	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0245	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0246	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sosial-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0247	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0248	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0249	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0250	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0251	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0252	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0253	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0254	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0255	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0256	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0257	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0258	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0259	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0260	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0261	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0262	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0263	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0264	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0265	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0266	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0267	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0268	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0269	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0270	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0271	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0272	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0273	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0274	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0275	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0276	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0277	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0278	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0279	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0280	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0281	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0282	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0283	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0284	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0285	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0286	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0287	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0288	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0289	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0290	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0291	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0292	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0293	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0294	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0295	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0296	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0297	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOS reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0298	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOS afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0299	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOS kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0300	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-TPG PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0301	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-tambahan penghasilan guru PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0302	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-TKG PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0303	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOP PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0304	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0305	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0306	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0307	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKKB-BOK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0308	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0309	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0310	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0311	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKKB-BOKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0312	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UKM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-PK2UKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0313	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0314	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0315	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana bantuan BLPS dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0316	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0317	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-BOKB-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0318	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0319	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0320	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0321	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-PK2UKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0322	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOS reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0323	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOS kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0324	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0325	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0326	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0327	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0328	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK provinsi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0329	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0330	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0331	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0332	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0333	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0334	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0335	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0336	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0337	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	07				Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah
6	1	07	01			Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat
6	1	07	01	01		Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat
6	1	07	01	01	0001	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat
						Digunakan untuk mencatat penarikan pokok dana abadi daerah dalam kondisi darurat sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan.
6	2	06				Pembentukan Dana Abadi Daerah
6	2	06	01			Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah
6	2	06	01	01		Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah
6	2	06	01	01	0001	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembentukan pokok dana abadi daerah dalam rangka mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	06	02			Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah
6	2	06	02	01		Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah
6	2	06	02	01	0001	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembentukan atas penambahan pokok dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	06	03			Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat
6	2	06	03	01		Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	06	03	01	0001	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat
						Digunakan untuk mencatat pembentukan atas pengembalian pokok dana abadi daerah akibat kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-LAPORAN OPERASIONAL

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	01	15		PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	01	01	15	0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	15	0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	15	0003	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	15	0004	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	16		PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	01	01	16	0001	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	16	0002	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	16	0003	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	16	0004	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	17		PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
7	1	01	01	17	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	17	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up box*-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	01	17	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	17	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	18		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	01	01	18	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	18	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	18	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	18	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	15		BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	15	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-roda tiga pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	16		BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
7	1	01	02	16	0001	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang-roda tiga pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	17		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
7	1	01	02	17	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bpajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up box* pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	18		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
7	1	01	02	18	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	14	38		Pajak Belerang-LO
7	1	01	14	38	0001	Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan belerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	14	39		Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
7	1	01	14	39	0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral logam bukan logam ikutan dalam suatu pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	17			Pajak Alat Berat-LO
7	1	01	17	01		Pajak Alat Berat-LO
7	1	01	17	01	0001	Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	01	18	01		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	01	18	01	0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PBJT-makanan dan/atau minuman-LO, PBJT-tenaga listrik-LO, PBJT-jasa perhotelan-LO, PBJT-jasa parkir-LO, dan PBJT-jasa kesenian dan hiburan-LO.
7	1	01	19	01		PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO
7	1	01	19	01	0001	PBJT-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	01	0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga atau katering dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik-LO
7	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03		PBJT-Jasa Perhotelan-LO
7	1	01	19	03	0001	PBJT-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh hotel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0002	PBJT-Hostel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh hostel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0003	PBJT-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh vila pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0004	PBJT-Pondok Wisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh pondok wisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0005	PBJT-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh motel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0006	PBJT-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh losmen pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0007	PBJT-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0008	PBJT-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0009	PBJT-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	03	0011	PBJT-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pelayanan yang disediakan oleh *glamping* pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	04		PBJT-Jasa Parkir-LO
7	1	01	19	04	0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	04	0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet), baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO
7	1	01	19	05	0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas penyelenggaraan tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0003	PBJT-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas kontes kecantikan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0004	PBJT-Kontes Binaraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas kontes binaraga pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0005	PBJT-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pameran pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	19	05	0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0008	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas permainan ketangkasan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas panti pijat dan pijat refleksi pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	19	05	0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	01	20	01		Opsen PKB-LO
7	1	01	20	01	0001	Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	01	21	01		Opsen BBNKB-LO
7	1	01	21	01	0001	Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	02	01	14		Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
7	1	02	01	14	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	14	0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	14	0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pengendalian lalu lintas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
7	1	02	02	12	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	13		Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	13	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	13	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
7	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	15		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
7	1	02	02	15	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	16	0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
7	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	18		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
7	1	02	02	18	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
7	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
7	1	02	02	20	0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemanfaatan aset daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0071	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0072	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0073	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0074	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0075	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0076	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0077	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0078	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0079	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban *pick up box*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0080	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban *pick up box*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0081	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban *pick up box*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0082	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban *pick up box*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0083	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0084	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0085	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0086	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0015	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0016	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda BBNKB-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0017	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0018	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0038	Pendapatan Denda Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	17		Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO
7	1	04	12	17	0001	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	18		Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	04	12	18	0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19		Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
7	1	04	12	19	0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0006	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0007	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0008	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0009	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0012	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0015	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0017	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0020	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0021	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0022	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0023	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	12	19	0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	19	0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	20		Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	20	0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	21		Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	21	0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0047	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0048	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	13	01	0049	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0037	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0038	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0039	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0040	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0045	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pendapatan denda retribusi pemanfaatan aset daerah -pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	09	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat ppendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahragayang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi daerah-retribusi pelayanan kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi daerah-retribusi pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	09	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn-tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi asn atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihanyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	12	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi kdh/wkdh atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi kdh/wkdh atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0868	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang sampel pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	1055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	1060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-sewa jasa internet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	1067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji wali nanggroe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji waliyul ahdi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	24			Pendapatan Konsesi Jasa-LO
7	1	04	24	01		Pendapatan Konsesi Jasa-LO
7	1	04	24	01	0001	Pendapatan Konsesi Jasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan konsesi jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	25			Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO
7	1	04	25	01		Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO
7	1	04	25	01	0001	Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	26			Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah-LO
7	1	04	26	01		Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah-LO
7	1	04	26	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana abadi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0014	DBH Sawit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sawit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang pendidikan-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani)yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate* -LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat DAK non fisik-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO
7	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat DBH minyak dan gas otonomi khusus papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO
7	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat DBH minyak dan gas otonomi khusus aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	06	02		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO
7	2	01	06	02	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	06	03		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan-LO
7	2	01	06	03	0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07			Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	07	01		DBH Pajak-LO
7	2	01	07	01	0001	DBH PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
7	2	01	07	02		DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO
7	2	01	07	02	0001	DBH SDA Minyak Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	07	02	0002	DBH SDA Gas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi penghasil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam pengusahaan panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*landrent* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	02	0009	DBH SDA Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	07	03		DBH Lainnya-LO
7	2	01	07	03	0001	DBH Sawit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam sawit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08			Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	08	01		DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO
7	2	01	08	01	0001	DAU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO
7	2	01	08	02	0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan peragkat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02	0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	08	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09			Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO
7	2	01	09	01		DAK Fisik-LO
7	2	01	09	01	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, pembangunan prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitasi layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota, pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (lFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (lFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, Penguatan RS PONEK dan penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai *therapeutic feeding center* (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, penyediaan alat antropometri dan penyediaan obat gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat *single gardan/double gardan*, pusling air, ambulans *transport single gardan/double gardan*, ambulans PSC 119, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan puskesmas, renovasi/rehabilitasi puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan prasana kendaraan bermotor di puskesmas, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (*generator set/energy* terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana, pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengadaan sarana transportasi pelayanan KB, pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan sarana KIE *kit* dan media lini lapangan, pengadaan media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/ pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan, pengadaan sarana petugas lapangan KB, pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan BKB *kit* dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indicator kelayakan rumah dan bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam t hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/renovasi UPTD/balai proteksi/balai perbenihan/perbibitan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, pembangunan irigasi air tanah (dangkal/ dalam), embung, dam parit, *long storage* dan pintu air di kabupaten/kota, pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut, pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil, pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana tambak garam, rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota), pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan perlengkapan jalan di daerah kab/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di daerah afirmasi (kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan
7	2	01	09	01	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas *stunting*, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan Hutan Kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju PLBN), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan perkada mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepuiauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan Daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kola perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada kabupaten/kota yang terdiri dari 34 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang tidak termasuk daerah afirmasi dan 19 kabupaten/kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupaten/Kota yamg terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis pariwisata maritim dari 50 destinasi pariwisata nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	09	01	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik–bidang pendidikan-reguler-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	09	01	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	09	01	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	01	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02		DAK Non Fisik-LO
7	2	01	09	02	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan beban operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	09	02	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	09	02	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	09	02	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana dengan tujuan meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK non fisik-BOKB-KB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-PK2UMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan PAUD reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan PAUD kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan kerja-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskkesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	02	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	03			Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	3	03	03	01		Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO
7	3	03	03	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang iupk atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	03	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang iupk atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota penghasil dalam provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	03	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pemegang iupk atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	04			Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO
7	3	03	04	01		Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO
7	3	03	04	01	0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta diperuntukkan dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	03	03			Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO
7	4	03	03	01		Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO
7	4	03	03	01	0001	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kenaikan nilai investasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	1	01	02	06		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	02	06	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	02	06	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	01	02	06	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	01	02	06	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
8	1	01	02	06	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
8	1	01	02	06	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
8	1	01	02	06	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
8	1	01	02	06	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
8	1	01	02	06	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
8	1	01	02	06	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
8	1	01	02	06	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
8	1	01	02	06	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
8	1	01	02	06	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
8	1	01	02	06	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-pajak minerla bukan logam dan batuan.
8	1	01	02	06	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
8	1	01	02	06	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
8	1	01	02	06	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
8	1	01	02	06	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	01	02	06	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
8	1	01	02	06	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
8	1	01	02	06	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan Bermotor (BBNKB).
8	1	01	02	06	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
8	1	01	02	06	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	01	02	06	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8	1	01	02	06	0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	01	02	06	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
8	1	01	02	06	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	01	02	06	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
8	1	01	02	06	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
8	1	01	02	06	0030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	02	06	0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair .
8	1	01	02	06	0032	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
8	1	01	02	06	0033	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
8	1	01	02	06	0034	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	01	02	06	0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
8	1	01	02	06	0036	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
8	1	01	02	06	0037	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
8	1	01	02	06	0038	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal.
8	1	01	02	06	0039	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
8	1	01	02	06	0040	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	01	02	06	0041	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
8	1	01	02	06	0042	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	01	02	06	0043	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	01	02	06	0044	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
8	1	01	02	06	0045	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
8	1	01	02	06	0046	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	01	02	06	0047	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	01	02	06	0048	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
8	1	01	02	06	0049	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	02	06	0050	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	01	02	06	0051	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	01	02	06	0052	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
8	1	01	02	06	0053	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi daerah-retribusi pelayanan kebersihan.
8	1	01	02	06	0054	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi daerah-retribusi pengendalian lalu lintas.
8	1	01	02	06	0055	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	01	02	06	0056	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
8	1	01	02	06	0057	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
8	1	01	02	06	0058	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	01	02	06	0059	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	01	02	06	0060	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	01	02	06	0061	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	01	02	06	0062	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	01	02	06	0063	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi daerah-retribusi pemanfaatan aset daerah.
8	1	01	02	06	0064	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan profesi guru TPG PNSD.
8	1	01	02	06	0065	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus guru TKG PNSD.
8	1	01	02	06	0066	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan tamsil guru PNSD.
8	1	01	02	06	0067	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pelayanan kesehatan.
8	1	01	02	06	0068	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan
8	1	01	02	06	0069	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
8	1	01	02	06	0070	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan profesi guru TPG PPPK.
8	1	01	02	06	0071	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus guru TKG PPPK.
8	1	01	02	06	0072	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan tamsil guru PPPK.
8	1	01	02	06	0073	Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah.
8	1	01	03	01	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat.
8	1	01	03	01	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	01	03	01	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
8	1	01	03	01	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
8	1	01	03	01	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
8	1	01	03	02	0034	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan.
8	1	01	03	02	0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	02	0036	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	01	03	02	0037	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
8	1	01	03	02	0038	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
8	1	01	03	02	0039	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	01	03	02	0040	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	01	03	02	0041	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	01	03	02	0042	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	01	03	02	0043	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	0044	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah.
8	1	01	05	10	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat.
8	1	01	05	10	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	01	05	10	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
8	1	01	05	10	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
8	1	01	05	10	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
8	1	01	05	11	0034	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
8	1	01	05	11	0035	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
8	1	01	05	11	0036	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	01	05	11	0037	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
8	1	01	05	11	0038	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
8	1	01	05	11	0039	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	01	05	11	0040	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	01	05	11	0041	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	01	05	11	0042	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	01	05	11	0043	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH ataspemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	01	05	11	0044	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	02	01	01	0079	Beban Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang sampel bangunan.
8	1	02	02	01	0078	Beban Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jasa internet.
8	1	02	02	01	0079	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengujian sampel pangan.
8	1	02	02	01	0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
8	1	02	02	01	0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium pengadaan barang/jasa.
8	1	02	02	01	0082	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
8	1	02	02	14	0017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat.
8	1	02	02	14	0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	02	02	14	0019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
8	1	02	02	14	0020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
8	1	02	02	14	0021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
8	1	02	02	15	0034	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan.
8	1	02	02	15	0035	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
8	1	02	02	15	0036	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	02	02	15	0037	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
8	1	02	02	15	0038	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
8	1	02	02	15	0039	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	02	02	15	0040	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	02	02	15	0041	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	02	02	15	0042	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	15	0043	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	02	02	15	0044	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	02	02	16		Beban Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
8	1	02	02	16	0001	Beban Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0002	Beban Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0003	Beban Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0004	Beban Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0006	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan kerja wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0007	Beban Jaminan Kematian Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0008	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan pakaian dinas wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0009	Beban Pembebanan PPh Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0010	Beban Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji wali nanggroe.
8	1	02	02	16	0011	Beban Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0012	Beban Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0013	Beban Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0014	Beban Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0015	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0016	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan kerja waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0017	Beban Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0018	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan pakaian dinas waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0019	Beban Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh waliyul ahdi.
8	1	02	02	16	0020	Beban Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji waliyul ahdi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	16	0021	Beban Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0022	Beban Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0023	Beban Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0024	Beban Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0025	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan bagi majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0026	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0027	Beban Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0028	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan pakaian dinas majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0029	Beban Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0030	Beban Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0031	Beban Uang Representasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0032	Beban Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0033	Beban Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0034	Beban Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0035	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan bagi majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0036	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0037	Beban Jaminan Kematian Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0038	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan pakaian dinas majelis tinggi.
8	1	02	02	16	0039	Beban Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh majelis fungsional.
8	1	02	02	16	0040	Beban Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji majelis fungsional.
8	1	02	05	01	0014	Beban Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang meugang.
8	1	07	01	01	0071	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0072	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0073	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0074	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0075	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0076	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0077	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0078	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0079	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0080	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	01	0081	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0082	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0083	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0084	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0085	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0086	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0015	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0016	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang-roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0017	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0018	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0038	Beban Penyisihan Piutang Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak belerang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0039	Beban Penyisihan Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	17		Beban Penyisihan Piutang Pajak Alat Berat
8	1	07	01	17	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	18		Beban Penyisihan Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	07	01	18	0001	Beban Penyisihan Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19		Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	07	01	19	0001	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0002	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	19	0003	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber laindapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0004	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0005	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0006	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-hostel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0007	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0008	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0009	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0010	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-losmen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0011	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0012	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	19	0013	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0014	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0015	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa perhotelan-*glamping* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0016	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0017	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0018	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0019	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0020	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	19	0021	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0022	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0023	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0024	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0025	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0026	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0027	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0028	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	19	0029	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	20		Beban Penyisihan Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	01	20	0001	Beban Penyisihan Piutang Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang opsen PKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	21		Beban Penyisihan Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8	1	07	01	21	0001	Beban Penyisihan Piutang Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang opsen BBNKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kebersihan-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	02	0037	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0038	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0039	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0040	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0041	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0042	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	02	0043	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0044	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0045	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0046	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemanfaatan aset daerah -pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang-roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up box*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang-roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Belerang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-belerang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-makanan dan/atau minuman-restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-hostel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-pondok wisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-losmen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-wisma pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0208	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa perhotelan-*glamping* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pameran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBJT-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0226	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda opsen PKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda opsen BBNKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	13	0081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan-pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah-pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3936	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3937	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3938	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3939	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3940	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3941	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3942	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3943	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3944	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3945	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3946	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3947	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3948	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3949	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3950	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3951	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3952	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3953	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3954	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3955	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3956	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3957	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3958	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3959	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3960	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3961	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3962	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3963	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3964	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3965	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3966	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3967	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi KDH/WKDH pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3968	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3969	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3970	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3971	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3972	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3973	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3974	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3975	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutanretribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3976	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3977	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3978	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3979	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3980	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3981	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3982	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3983	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3984	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-sewa jasa internet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3985	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang Meugang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang meugang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3986	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang sampel pangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3987	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengujian Sampel Pangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengujian sampel pangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3988	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3989	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3990	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3991	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3992	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3993	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3994	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3995	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3996	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3997	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3998	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3999	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	4000	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MLBB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	4009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	4045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	4049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pengadaan barang/jasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	4064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji wali nanggroe dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji waliyul ahdi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Uang Representasi Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-uang representasi majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan keluarga majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan jabatan majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan transportasi majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-iuran jaminan kesehatan majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kecelakaan kerja majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Majelis Fungsional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-jaminan kematian majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-tunjangan pakaian dinas majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembebanan PPh majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	4103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-gaji dan tunjangan perangkat lembaga wali Nanggroe-pembulatan gaji majelis fungsional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	24		Beban Penyisihan Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
8	1	07	04	24	0001	Beban Penyisihan Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pungutan bagi wisatawan asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	04	25		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
8	1	07	04	25	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil pengelolaan dana abadi daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	05	01	0121	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sawit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0122	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-pendidikan anak usia dini dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0123	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0124	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah pertama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0125	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0126	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0127	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah menengah kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0128	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sekolah luar biasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0129	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0130	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0131	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0132	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0133	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0134	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0135	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0136	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0137	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0138	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0139	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0140	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0141	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0142	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0143	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0144	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0145	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0146	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0147	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0148	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0149	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0150	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0151	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0152	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0153	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0154	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0155	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0156	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0157	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0158	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0159	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0160	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0010	Beban Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus papua-DBH minyak dan gas otonomi khusus papua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0011	Beban Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas otonomi khusus aceh-DBH minyak dan gas otonomi khusus aceh dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	06	0002	Beban Penyisihan Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	06	0003	Beban Penyisihan Piutang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	07		Beban Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)
8	1	07	05	07	0001	Beban Penyisihan Piutang DBH Pajak-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil pajak-DBH PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0002	Beban Penyisihan Piutang DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil pajak-DBH PPh Pasal 21 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0003	Beban Penyisihan Piutang DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0004	Beban Penyisihan Piutang DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil pajak-DBH cukai hasil tembakau dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0005	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA minyak bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0006	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA gas bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0007	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA pengusahaan panas bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0008	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	07	0009	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0010	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan (PSDH) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0011	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0012	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA kehutanan-dana reboisasi (DR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0013	Beban Penyisihan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil sumber daya alam-DBH SDA perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	07	0014	Beban Penyisihan Piutang DBH Lainnya-DBH Sawit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana bagi hasil lainnya-DBH sawit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08		Beban Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
8	1	07	05	08	0001	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang tidak dapat ditentukan penggunaannya disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08	0002	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	08	0003	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08	0004	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08	0005	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08	0006	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	08	0007	Beban Penyisihan Piutang DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09		Beban Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
8	1	07	05	09	0001	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler PAUD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0002	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler SD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0003	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler SMP disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0004	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler SMA disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0005	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler SLB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0006	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler sanggar kegiatan belajar disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0007	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi SD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0008	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi SMP disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0009	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi SMA disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0010	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0011	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0012	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0013	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0014	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0015	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0016	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0017	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0018	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0019	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0020	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0021	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0022	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0023	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0024	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana puskesmas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0025	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0026	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* KB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0027	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0028	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0029	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0030	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0031	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0032	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0033	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0034	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0035	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0036	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0037	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0038	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0039	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0040	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0041	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0042	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0043	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0044	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pasar-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0045	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0046	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0047	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0048	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0049	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0050	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sosial-reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0051	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0052	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0053	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0054	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0055	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0056	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0057	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0058	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0059	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0060	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0061	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0062	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0063	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0064	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0065	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0066	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-PAUD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0067	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0068	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMP disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0069	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-sanggar kegiatan belajar disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0070	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMA disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0071	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SMK disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0072	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-SLB disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0073	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-perpustakaan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0074	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0075	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0076	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0077	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0078	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0079	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0080	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik pengembangan *food estate* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0081	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0082	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-air minum mendukung peningkatan kualitas SDM disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0083	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0084	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-sanitasi mendukung peningkatan kualitas SDM disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0085	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0086	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0087	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik pengembangan *food estate* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0088	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0089	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik pengembangan *food estate* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0090	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0091	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0092	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	09	0093	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0094	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0095	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0096	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perairan-tematik peningkatan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0097	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-tematik peningkatan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0098	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan *Food Estate*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kehutanan-tematik pengembangan *food estate* disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0099	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0100	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus fisik-bidang infrastruktur energi terbarukan-tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0101	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0102	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah afirmasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0103	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah kinerja disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0104	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru PNSD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0105	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru PNSD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0106	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru PNSD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0107	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional pendidikan PAUD disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0108	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional pendidikan pendidikan kesetaraan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0109	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional pendidikan museum dan taman budaya-museum disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0110	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional pendidikan museum dan taman budaya-taman budaya disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0111	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0112	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-pengawasan obat dan makanan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0113	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0114	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0115	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0116	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-PK2UKM disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0117	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0118	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan kepariwisataan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0119	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan BLPS disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0120	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0121	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-keluarga berencana disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0122	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0123	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0124	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0125	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-PK2UMK disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0126	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0127	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0128	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan PAUD reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0129	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan PAUD kinerja disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0130	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0131	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0132	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan provinsi disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0133	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0134	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0135	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0136	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan profesi guru disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0137	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tambahan penghasilan guru disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0138	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru ASN daerah-tunjangan khusus guru disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	09	0139	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	06		Beban Penyisihan Dana Bergulir
8	1	07	07	06	0001	Beban Penyisihan Pokok Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai pokok dana bergulir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	08	08			Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	08	01		Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin
8	1	08	08	01	0001	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat besar.
8	1	08	08	01	0002	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat angkutan.
8	1	08	08	01	0003	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat bengkel dan alat ukur.
8	1	08	08	01	0004	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat pertanian.
8	1	08	08	01	0005	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat kantor dan rumah tangga.
8	1	08	08	01	0006	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
8	1	08	08	01	0007	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Kedokteran dan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat kedokteran dan kesehatan.
8	1	08	08	01	0008	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat laboratorium.
8	1	08	08	01	0009	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Persenjataan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat persenjataan.
8	1	08	08	01	0010	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Komputer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa komputer.
8	1	08	08	01	0011	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat eksplorasi.
8	1	08	08	01	0012	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan dan mesin-aset konsesi jasa alat pengeboran.
8	1	08	08	01	0013	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
8	1	08	08	01	0014	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Bantu Eksplorasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat bantu eksplorasi.
8	1	08	08	01	0015	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat keselamatan kerja.
8	1	08	08	01	0016	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa alat peraga.
8	1	08	08	01	0017	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan proses/produksi.
8	1	08	08	01	0018	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa rambu-rambu.
8	1	08	08	01	0019	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin-Aset Konsesi Jasa Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa peralatan olahraga.
8	1	08	08	02		Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan
8	1	08	08	02	0001	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa bangunan gedung.
8	1	08	08	02	0002	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Monumen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa monumen.
8	1	08	08	02	0003	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa bangunan menara.
8	1	08	08	02	0004	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan-Aset Konsesi Jasa Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa gedung dan bangunan-aset konsesi jasa tugu titik kontrol/pasti.
8	1	08	08	03		Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	08	08	03	0001	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa jalan dan jembatan.
8	1	08	08	03	0002	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa bangunan air.
8	1	08	08	03	0003	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa instalasi.
8	1	08	08	03	0004	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Aset Konsesi Jasa Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset konsesi jasa jalan, jaringan, dan irigasi-aset konsesi jasa jaringan.
8	1	08	08	04		Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya
8	1	08	08	04	0001	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan.
8	1	08	08	04	0002	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga.
8	1	08	08	04	0003	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-hewan.
8	1	08	08	04	0004	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-biota perairan.
8	1	08	08	04	0005	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-tanaman.
8	1	08	08	04	0006	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya.
8	1	08	08	04	0007	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi-aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi.
8	1	08	08	05		Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	08	05	0001	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset konsesi jasa yang bersumber dari milik mitra.
8	1	08	09			Beban Penyusutan Properti Investasi
8	1	08	09	01		Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
8	1	08	09	01	0001	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas beban penyusutan properti investasi bangunan gedung.
8	1	08	09	01	0002	Beban Penyusutan Properti Investasi Monumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas beban penyusutan properti investasi bangunan monumen.
8	1	08	09	01	0003	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas beban penyusutan properti investasi bangunan menara.
8	1	08	09	01	0004	Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas beban penyusutan properti investasi tugu titik kontrol/pasti.
8	3	03	03			Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
8	3	03	03	01		Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
8	3	03	03	01	0001	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas penurunan nilai investasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

II. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

B. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1	01	02	1.01	0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi			
1	01	02	1.01	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika			
1	01	02	1.01	0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia			
1	01	02	1.01	0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer			
1	01	02	1.01	0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa			
1	01	02	1.01	0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA			
1	01	02	1.01	0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.01	0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1	01	02	1.01	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi			
1	01	02	1.01	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			
1	01	02	1.01	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
1	01	02	1.01	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
1	01	02	1.01	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
1	01	02	1.01	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA			
1	01	02	1.01	0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1	01	02	1.01	0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1	01	02	1.01	0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1	01	02	1.01	0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1	01	02	1.01	0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.01	0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1	01	02	1.01	0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1	01	02	1.01	0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.01	0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1	01	02	1.01	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1	01	02	1.01	0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1	01	02	1.01	0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	1.02	0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1	01	02	1.02	0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.02	0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1	01	02	1.02	0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
1	01	02	1.02	0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa			
1	01	02	1.02	0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
1	01	02	1.02	0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula			
1	01	02	1.02	0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1	01	02	1.02	0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1	01	02	1.02	0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1	01	02	1.02	0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1	01	02	1.02	0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1	01	02	1.02	0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1	01	02	1.02	0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.02	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1	01	02	1.02	0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1	01	02	1.02	0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			
1	01	02	1.02	0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi			
1	01	02	1.02	0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1	01	02	1.02	0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	1.03	0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1	01	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.03	0018	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
1	01	02	1.03	0019	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
1	01	02	1.03	0020	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
1	01	02	1.03	0021	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
1	01	02	1.03	0022	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula			
1	01	02	1.03	0023	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1	01	02	1.03	0024	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1	01	02	1.03	0025	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1	01	02	1.03	0026	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1	01	02	1.03	0027	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.03	0041	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1	01	02	1.03	0043	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	1.03	0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1	01	02	1.03	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1	01	02	1.03	0047	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			
1	01	02	1.03	0055	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1	01	02	1.03	0061	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	03	1.01	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
1	01	03	1.02	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
1	02	02	1.01	0003	Pengembangan Rumah Sakit			
1	02	02	1.01	0005	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
1	02	02	1.01	0011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			
1	02	02	1.01	0012	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			
1	02	02	1.01	0014	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			
1	02	02	1.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1	02	02	1.01	0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan			
1	02	02	1.01	0019	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1	02	02	1.01	0022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1	02	02	1.01	0023	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota			
1	02	02	1.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			
1	02	02	1.02	0027	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	1.02	0028	Pengelolaan Penelitian Kesehatan			
1	02	02	1.02	0029	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana			
1	02	02	1.03	0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
1	02	02	1.03	0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			
1	02	04	1.01	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik			
1	02	04	1.02	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik			
1	03	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
1	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			
1	03	02	1.01	0003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			
1	03	02	1.01	0004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			
1	03	02	1.01	0006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1	03	02	1.01	0007	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1	03	02	1.01	0008	Pembangunan Unit Air Baku			
1	03	02	1.01	0010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	1.01	0011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1	03	02	1.01	0012	Pembangunan Kanal Banjir			
1	03	02	1.01	0014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	1.01	0016	Pembangunan Check Dam			
1	03	02	1.01	0017	Pembangunan Breakwater			
1	03	02	1.01	0018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	1.01	0020	Rehabilitasi Bendungan			
1	03	02	1.01	0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1	03	02	1.01	0022	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1	03	02	1.01	0023	Rehabilitasi Unit Air Baku			
1	03	02	1.01	0024	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
1	03	02	1.01	0025	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	1.01	0027	Rehabilitasi Kanal Banjir			
1	03	02	1.01	0029	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0032	Rehabilitasi Breakwater			
1	03	02	1.01	0033	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	1.01	0034	Peningkatan Tanggul Sungai			
1	03	02	1.01	0035	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	1.01	0036	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1	03	02	1.01	0037	Peningkatan Kanal Banjir			
1	03	02	1.01	0038	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir			
1	03	02	1.01	0039	Peningkatan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	1.01	0040	Peningkatan Bangunan Sabo			
1	03	02	1.01	0041	Peningkatan Check Dam			
1	03	02	1.01	0042	Peningkatan Breakwater			
1	03	02	1.01	0043	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	1.01	0044	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			
1	03	02	1.01	0045	Revitalisasi Danau			
1	03	02	1.01	0046	Normalisasi/Restorasi Sungai			
1	03	02	1.01	0047	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1	03	02	1.01	0049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1	03	02	1.01	0050	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku			
1	03	02	1.01	0052	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			
1	03	02	1.01	0053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			
1	03	02	1.01	0054	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			
1	03	02	1.01	0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	1.01	0057	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo			
1	03	02	1.01	0058	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam			
1	03	02	1.01	0059	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	1.01	0060	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi			
1	03	02	1.01	0061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
1	03	02	1.01	0062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi			
1	03	02	1.01	0063	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
1	03	02	1.01	0064	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1	03	02	1.01	0065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			
1	03	02	1.01	0066	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1	03	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
1	03	02	1.02	0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1	03	02	1.02	0012	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1	03	02	1.02	0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1	03	02	1.02	0020	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1	03	02	1.02	0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1	03	02	1.02	0027	Operasional Unit Pengelola Irigasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
1	03	02	1.02	0029	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1	03	02	3.01	0067	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi			
1	03	02	4.01	0068	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi			
1	03	03	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			
1	03	03	1.01	0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM			
1	03	03	1.01	0003	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan			
1	03	03	1.01	0004	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan			
1	03	03	1.01	0005	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan			
1	03	03	1.01	0006	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan			
1	03	03	1.01	0007	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0008	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi			
1	03	03	1.01	0009	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0010	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0011	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0012	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	04	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1	03	04	1.01	0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1	03	04	1.01	0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1	03	04	1.01	0004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1	03	04	1.01	0005	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1	03	04	1.01	0006	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan			
1	03	04	1.01	0007	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	04	1.01	0008	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			
1	03	05	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	1.01	0002	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk			
1	03	05	1.01	0003	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
1	03	05	1.01	0004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional			
1	03	05	1.01	0005	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
1	03	05	1.01	0006	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	0007	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	1.01	0008	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	05	1.01	0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	06	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	1.01	0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	1.01	0003	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	1.01	0004	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	1.01	0005	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya			
1	03	06	1.01	0006	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			
1	03	07	1.01	0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	0002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	0003	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	0001	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	0002	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	0003	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	0004	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi			
1	03	08	1.01	0005	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi			
1	03	08	1.01	0006	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi			
1	03	08	1.01	0007	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya			
1	03	08	1.01	0009	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara			
1	03	08	1.01	0010	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara			
1	03	08	1.01	0011	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek			
1	03	08	6.01	0008	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			
1	03	09	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	1.01	0002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01	0003	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	1.01	0004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	1.01	0006	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota			
1	03	09	1.01	0007	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	6.01	0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	10	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
1	03	10	1.01	0002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			
1	03	10	1.01	0003	Pengelolaan Leger Jalan			
1	03	10	1.01	0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
1	03	10	1.01	0005	Pembangunan Jalan			
1	03	10	1.01	0006	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
1	03	10	1.01	0007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			
1	03	10	1.01	0008	Rekonstruksi Jalan			
1	03	10	1.01	0009	Rehabilitasi Jalan			
1	03	10	1.01	0010	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1	03	10	1.01	0011	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1	03	10	1.01	0012	Pembangunan Jembatan			
1	03	10	1.01	0013	Pembangunan Flyover			
1	03	10	1.01	0014	Pembangunan Underpass			
1	03	10	1.01	0015	Pembangunan Terowongan/Tunnel			
1	03	10	1.01	0016	Penggantian Jembatan			
1	03	10	1.01	0017	Pelebaran Jembatan			
1	03	10	1.01	0018	Rehabilitasi Jembatan			
1	03	10	1.01	0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1	03	10	1.01	0020	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1	03	10	1.01	0021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			
1	03	10	1.01	0022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1	03	10	1.01	0023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1	03	11	1.01	0001	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0002	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan			
1	03	11	1.01	0003	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0005	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.01	0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
1	03	11	1.01	0008	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.02	0001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.02	0002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.02	0003	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			
1	03	11	1.02	0004	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU			
1	03	11	1.02	0005	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.03	0001	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan			
1	03	11	1.03	0002	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			
1	03	11	1.03	0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	12	1.01	0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi			
1	03	12	1.01	0002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi			
1	03	12	1.01	0004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			
1	03	12	1.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi			
1	03	12	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi			
1	03	12	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			
1	03	12	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
1	03	12	1.03	0002	Sistem Informasi Penataan Ruang			
1	03	12	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			
1	03	12	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
1	03	13	5.01	0001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0004	Penetapan RTR KSP DIY			
1	04	02	1.01	0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
1	04	02	1.01	0005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.02	0002	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	04	02	1.02	0003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP			
1	04	02	1.02	0005	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03	0002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.03	0003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
1	04	02	1.03	0005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.04	0001	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.04	0002	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	03	1.01	0001	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			
1	04	03	1.01	0002	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh			
1	04	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh			
1	04	03	1.01	0004	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	1.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	1.01	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	1.01	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	1.01	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	04	03	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
1	04	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	0006	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	0007	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	05	02	1.01	0001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0002	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
1	05	02	1.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			
1	05	02	1.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	05	02	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
1	05	02	1.01	0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	05	02	1.01	0009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
1	05	02	1.03	0002	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS			
1	05	03	1.01	0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			
1	05	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
1	05	03	1.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
1	05	03	1.02	0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	1.02	0004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1	05	03	1.02	0005	Pengelolaan Risiko Bencana			
1	05	03	1.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1	05	03	1.02	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
1	05	03	1.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
1	05	03	1.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi			
1	05	03	1.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	1.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1	05	03	1.02	0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi			
1	05	03	1.02	0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	1.02	0020	Pengelolaan Risiko Bencana			
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	1.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1	05	03	1.03	0006	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit			
1	05	03	1.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi			
1	05	03	1.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi			
1	05	03	1.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	03	1.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			
1	05	03	1.04	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
1	05	03	1.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
1	05	03	1.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			
1	05	03	1.04	0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi			
1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	04	1.01	0001	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			
1	05	04	1.01	0003	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
1	05	04	1.01	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
1	05	04	1.01	0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			
1	05	04	1.01	0010	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1	05	04	1.01	0011	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi			
1	05	04	1.02	0001	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
2	07	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
2	07	04	1.06	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	05	1.03	0002	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)			
2	07	05	1.03	0004	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
2	08	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.03	0003	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.02	0001	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi			
2	08	07	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2	09	02	1.01	0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			
2	09	02	1.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			
2	09	02	1.01	0005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			
2	09	03	1.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			
2	09	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			
2	09	03	1.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			
2	09	04	1.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			
2	09	05	1.01	0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi			
2	09	05	1.01	0002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	0003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan			
2	10	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi			
2	10	03	1.01	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
2	10	04	1.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	04	1.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.01	0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2	11	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi			
2	11	02	1.02	0001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			
2	11	02	1.02	0003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2	11	02	1.02	0004	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.01	0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			
2	11	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			
2	11	03	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
2	11	03	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			
2	11	04	1.01	0002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
2	11	04	1.01	0005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			
2	11	06	1.01	0002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
2	11	06	1.01	0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	11	06	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			
2	11	08	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan			
2	11	10	1.01	0001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi			
2	11	10	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			
2	11	11	1.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
2	11	11	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus			
2	13	07	4.03	0005	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung			
2	14	02	1.01	0001	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			
2	14	02	1.01	0008	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK			
2	14	02	1.01	0011	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain			
2	14	02	1.02	0003	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2	14	02	1.02	0005	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			
2	14	02	1.02	0006	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2	14	02	1.02	0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga			
2	14	03	1.01	0002	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	1.01	0003	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0004	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja			
2	14	03	1.01	0005	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK			
2	14	03	1.01	0008	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi			
2	14	03	1.02	0003	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK			
2	14	04	1.01	0004	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			
2	14	04	1.01	0005	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja			
2	14	04	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			
2	14	04	1.01	0007	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan			
2	14	04	1.01	0010	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			
2	14	04	1.01	0011	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK			
2	14	04	1.01	0012	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK			
2	14	04	1.01	0013	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK			
2	14	04	1.01	0014	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			
2	14	04	1.02	0002	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
2	14	04	1.02	0004	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
2	14	04	1.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB			
2	15	02	1.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
2	15	02	1.03	0002	Pembangunan Gedung Terminal			
2	15	02	1.03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			
2	15	02	1.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			
2	15	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B			
2	15	02	1.05	0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2	15	02	1.06	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
2	15	02	1.06	0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			
2	15	02	1.06	0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			
2	15	02	1.07	0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	1.08	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.10	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			
2	15	02	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	15	02	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi			
2	15	02	3.16	0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2	15	02	3.16	0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2	15	02	4.16	0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2	15	02	4.16	0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2	15	02	6.04	0002	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A			
2	15	02	6.04	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A			
2	15	02	6.04	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A			
2	15	03	1.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	03	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2	15	03	1.05	0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2	15	03	1.10	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	03	1.10	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	04	3.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	3.01	0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	4.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	4.01	0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2	16	02	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2	16	02	1.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik			
2	16	02	1.01	0007	Layanan Hubungan Media			
2	16	02	1.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2	16	02	1.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis			
2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
2	16	02	1.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			
2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2	16	03	1.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
2	16	03	1.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	16	03	1.02	0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
2	16	03	1.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas			
2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2	16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2	17	02	1.01	0001	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.02	0001	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.02	0002	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	17	03	1.01	0001	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			
2	17	03	1.01	0002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	1.02	0001	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			
2	17	04	1.01	0001	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			
2	17	04	1.01	0002	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi			
2	17	05	1.02	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2	17	06	1.01	0001	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
2	18	02	1.01	0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
2	18	02	1.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			
2	18	03	1.01	0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
2	18	04	1.01	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	18	04	1.01	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2	18	04	1.01	0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2	18	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2	18	04	1.02	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	18	04	1.02	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2	18	04	1.02	0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2	18	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2	18	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	06	1.01	0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			
2	19	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			
2	19	02	1.01	0004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
2	19	02	1.01	0006	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi			
2	19	02	1.01	0007	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2	19	02	1.01	0008	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
2	19	02	1.01	0009	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
2	19	02	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
2	19	02	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			
2	19	02	3.03	0001	Pembentukan Paskibraka			
2	19	02	3.03	0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka			
2	19	02	3.03	0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera			
2	19	02	3.03	0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera			
2	19	02	3.03	0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan			
2	19	02	4.03	0001	Pembentukan Paskibraka			
2	19	02	4.03	0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka			
2	19	02	4.03	0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera			
2	19	02	4.03	0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera			
2	19	02	4.03	0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan			
2	19	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi			
2	19	03	1.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			
2	19	03	1.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			
2	19	03	1.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			
2	19	03	1.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			
2	19	03	1.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			
2	19	03	1.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			
2	19	03	1.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			
2	19	03	1.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
2	19	03	1.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			
2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2	20	02	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
2	20	02	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2	20	02	1.01	0005	Pengembangan Infrastruktur			
2	20	02	1.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
2	23	02	1.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
2	23	02	1.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi			
2	23	02	1.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			
2	23	02	1.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi			
2	23	03	1.03	0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
2	23	03	1.03	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
2	24	02	1.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			
2	24	02	1.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi			
2	24	02	1.02	0002	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2	24	03	1.01	0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun			
2	24	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2	24	04	1.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2	24	04	1.01	0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan			
3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3	25	02	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional			
3	25	02	1.02	0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut			
3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3	25	03	1.02	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
3	25	03	1.02	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3	25	03	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.03	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
3	25	03	1.04	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
3	25	03	1.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	03	1.07	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.08	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.10	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	04	1.05	0003	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	1.05	0005	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.05	0009	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
3	25	05	1.02	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.03	0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	26	02	1.01	0002	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3	26	02	1.01	0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3	26	02	1.01	0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3	26	02	1.02	0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.02	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.02	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.04	0001	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	26	02	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota			
3	26	02	1.04	0003	Pengelolaan Investasi Pariwisata			
3	26	02	1.04	0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
3	26	02	1.04	0005	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			
3	26	03	1.01	0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
3	26	03	1.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			
3	26	03	1.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
3	26	04	1.01	0001	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
3	26	04	1.01	0002	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			
3	26	04	1.02	0001	Pengembangan Riset			
3	26	04	1.02	0002	Pengembangan Pendidikan			
3	26	04	1.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			
3	26	04	1.02	0004	Penyediaan Infrastruktur			
3	26	04	1.02	0006	Pemberian Insentif			
3	26	04	1.02	0007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			
3	26	04	1.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3	26	05	1.01	0002	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
3	26	05	1.01	0003	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)			
3	26	05	1.01	0006	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)			
3	26	05	1.01	0009	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.01	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			
3	27	02	1.02	0002	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
3	27	02	1.02	0003	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
3	27	02	1.02	0004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			
3	27	02	1.03	0001	Penilaian Kultivar SDG Hewan			
3	27	02	1.04	0002	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.04	0003	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.05	0001	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
3	27	02	1.05	0002	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan			
3	27	02	1.07	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			
3	27	03	1.01	0002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
3	27	03	1.01	0005	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan			
3	27	03	1.01	0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
3	27	03	1.01	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			
3	27	04	1.01	0001	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
3	27	04	1.01	0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	27	04	1.02	0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
3	27	04	1.02	0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			
3	27	04	1.02	0003	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi			
3	27	04	1.04	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.04	0002	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis			
3	27	04	1.05	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
3	27	05	1.01	0004	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3	27	06	1.01	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			
3	27	07	1.01	0001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			
3	27	07	1.01	0002	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta			
3	27	07	1.03	0001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani			
3	27	07	1.03	0002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani			
3	27	07	1.03	0003	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani			
3	27	07	1.03	0004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani			
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			
3	28	03	1.03	0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani			
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung			
3	28	03	1.03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi			
3	28	03	1.03	0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung			
3	28	03	1.03	0008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			
3	28	03	1.03	0009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			
3	28	03	1.04	0006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
3	28	03	1.05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan			
3	28	03	1.06	0001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			
3	28	03	1.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			
3	28	03	1.06	0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu			
3	28	03	1.07	0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
3	28	03	1.07	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	28	03	1.08	0001	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan			
3	28	03	1.08	0002	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani			
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar			
3	28	04	1.01	0001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3	28	04	1.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			
3	28	04	1.01	0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			
3	28	04	1.01	0004	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			
3	28	04	1.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			
3	28	04	1.01	0009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi			
3	28	04	1.01	0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA			
3	28	04	1.03	0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah			
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			
3	28	06	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS			
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			
3	28	06	1.01	0003	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			
3	28	06	1.01	0006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			
3	29	02	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3	29	02	1.02	0002	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3	29	02	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			
3	29	03	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.02	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.02	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.03	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.04	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
3	29	03	1.05	0001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.06	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.08	0001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan			
3	29	03	1.09	0001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan			
3	29	03	1.10	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
3	29	03	1.11	0001	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan			
3	29	05	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.02	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.04	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3	29	05	1.04	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3	29	05	1.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3	29	06	1.02	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	0002	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	0004	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	0005	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	0006	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	3.06	0008	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung			
3	30	02	1.02	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	30	02	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	30	04	1.03	0001	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi			
3	30	05	1.01	0005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			
3	30	06	1.02	0001	Verifikasi Mutu Produk			
3	30	06	1.02	0002	Pengembangan Layanan Pengujian			
3	30	06	1.02	0003	Pengembangan Layanan Sertifikasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			
3	30	06	1.03	0002	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen			
3	30	07	1.01	0001	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3	30	07	1.02	0001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3	30	07	1.03	0001	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3	30	07	1.03	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			
3	31	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	31	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi			
4	02	02	1.04	0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
4	02	04	3.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya			
4	02	04	3.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya			
4	02	04	3.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota			
4	02	04	3.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan			
4	02	04	3.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi			
4	02	04	3.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP			
4	02	04	3.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP			
4	02	04	3.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan			
4	02	05	4.01	0001	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri			
4	02	05	4.01	0002	Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB			
4	02	05	4.01	0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus			
4	02	05	4.01	0004	Bimbingan Teknis Pembekalan bagi Anggota DPRD			
4	02	05	4.01	0005	Fasilitasi Forum Komunikasi DPR Papua Barat			
4	02	06	4.01	0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan			
4	02	06	4.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya			
4	02	06	4.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya			
4	02	06	4.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota			
4	02	06	4.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	06	4.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi			
4	02	06	4.02	0004	Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP			
4	02	06	4.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP			
4	02	06	4.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan			

C. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1	01	02	2.01	0008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			
1	01	02	2.01	0012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1	01	02	2.01	0017	Pengadaan Perlengkapan Siswa			
1	01	02	2.01	0018	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan			
1	01	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1	01	02	2.01	0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1	01	02	2.01	0024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			
1	01	02	2.01	0040	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	2.02	0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1	01	02	2.02	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah			
1	01	02	2.02	0015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			
1	01	02	2.02	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama			
1	01	02	2.02	0028	Pengadaan Perlengkapan Siswa			
1	01	02	2.02	0029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan			
1	01	02	2.02	0031	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1	01	02	2.02	0033	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik			
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik			
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1	01	02	2.02	0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1	01	02	2.02	0037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU			
1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			
1	01	02	2.02	0053	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	2.02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK			
1	01	02	2.03	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1	01	02	2.03	0005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1	01	02	2.03	0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1	01	02	2.03	0010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
1	01	02	2.03	0014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			
1	01	02	2.03	0027	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0007	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0019	Pembangunan Laboratorium			
1	01	02	2.04	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
1	01	02	2.04	0022	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0029	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
1	01	03	2.01	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	2.02	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1	02	02	2.01	0005	Pengembangan Rumah Sakit			
1	02	02	2.01	0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	2.01	0016	Pengadaan Obat, Vaksin			
1	02	02	2.01	0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai			
1	02	02	2.01	0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	2.01	0019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	02	02	2.01	0021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1	02	02	2.02	0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			
1	02	02	2.02	0031	Pengelolaan Penelitian Kesehatan			
1	02	02	2.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
1	02	02	2.03	0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
1	02	02	2.03	0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			
1	02	02	3.02	0049	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria			
1	02	02	3.02	0063	Penanggulangan penyakit Malaria			
1	02	02	4.02	0049	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			
1	02	02	4.02	0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria			
1	02	02	4.02	0063	Penanggulangan penyakit Malaria			
1	02	04	2.01	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
1	02	04	2.06	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			
1	03	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
1	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			
1	03	02	2.01	0003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			
1	03	02	2.01	0004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0005	Pembangunan Bendungan			
1	03	02	2.01	0006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1	03	02	2.01	0007	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1	03	02	2.01	0008	Pembangunan Unit Air Baku			
1	03	02	2.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai			
1	03	02	2.01	0010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	2.01	0011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1	03	02	2.01	0012	Pembangunan Kanal Banjir			
1	03	02	2.01	0014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	2.01	0016	Pembangunan Check Dam			
1	03	02	2.01	0017	Pembangunan Breakwater			
1	03	02	2.01	0018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	2.01	0020	Rehabilitasi Bendungan			
1	03	02	2.01	0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1	03	02	2.01	0022	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1	03	02	2.01	0023	Rehabilitasi Unit Air Baku			
1	03	02	2.01	0024	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
1	03	02	2.01	0025	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	2.01	0027	Rehabilitasi Kanal Banjir			
1	03	02	2.01	0029	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	2.01	0032	Rehabilitasi Breakwater			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0033	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	2.01	0034	Peningkatan Tanggul Sungai			
1	03	02	2.01	0035	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
1	03	02	2.01	0036	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1	03	02	2.01	0037	Peningkatan Kanal Banjir			
1	03	02	2.01	0038	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir			
1	03	02	2.01	0039	Peningkatan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	2.01	0040	Peningkatan Bangunan Sabo			
1	03	02	2.01	0041	Peningkatan Check Dam			
1	03	02	2.01	0042	Peningkatan Breakwater			
1	03	02	2.01	0043	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	2.01	0044	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			
1	03	02	2.01	0045	Revitalisasi Danau			
1	03	02	2.01	0046	Normalisasi/Restorasi Sungai			
1	03	02	2.01	0047	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1	03	02	2.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan			
1	03	02	2.01	0050	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1	03	02	2.01	0052	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			
1	03	02	2.01	0053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			
1	03	02	2.01	0054	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			
1	03	02	2.01	0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			
1	03	02	2.01	0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			
1	03	02	2.01	0057	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo			
1	03	02	2.01	0058	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam			
1	03	02	2.01	0059	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1	03	02	2.01	0060	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0063	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0064	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1	03	02	2.01	0065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			
1	03	02	2.01	0066	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1	03	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
1	03	02	2.02	0020	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1	03	02	2.02	0027	Operasional Unit Pengelola Irigasi			
1	03	02	2.02	0028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
1	03	02	2.02	0029	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1	03	03	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM			
1	03	03	2.01	0003	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1	03	03	2.01	0004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1	03	03	2.01	0006	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0007	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1	03	03	2.01	0008	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0009	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum			
1	03	03	2.01	0010	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri			
1	03	03	2.01	0011	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			
1	03	03	2.01	0012	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM			
1	03	03	2.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM			
1	03	03	2.01	0014	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM			
1	03	03	2.01	0015	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			
1	03	03	2.01	0016	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0017	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0018	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0019	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	0020	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1	03	03	2.01	0021	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	04	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1	03	04	2.01	0004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1	03	04	2.01	0005	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1	03	04	2.01	0006	Penyediaan Sarana Persampahan			
1	03	04	2.01	0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			
1	03	04	2.01	0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1	03	05	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
1	03	05	2.01	0003	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			
1	03	05	2.01	0004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0005	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
1	03	05	2.01	0006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			
1	03	05	2.01	0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	2.01	0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	2.01	0009	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	2.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1	03	05	2.01	0011	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
1	03	05	2.01	0012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			
1	03	05	2.01	0013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			
1	03	05	2.01	0014	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
1	03	05	2.01	0015	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			
1	03	05	2.01	0016	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			
1	03	05	2.01	0017	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			
1	03	06	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0002	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			
1	03	06	2.01	0003	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0004	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0008	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan			
1	03	06	2.01	0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			
1	03	06	2.01	0010	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan			
1	03	06	2.01	0011	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan			
1	03	06	2.01	0013	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan			
1	03	06	2.01	0014	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan			
1	03	06	2.01	0015	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan			
1	03	06	2.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			
1	03	07	2.01	0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	07	2.01	0002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	07	2.01	0003	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
1	03	08	2.01	0002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0003	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0004	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0006	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0007	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0008	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0009	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan			
1	03	08	2.01	0010	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara			
1	03	08	2.01	0011	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi			
1	03	08	2.01	0012	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	08	2.01	0013	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	2.01	0003	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	2.01	0004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	2.01	0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	09	2.01	0006	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1	03	10	2.01	0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
1	03	10	2.01	0002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			
1	03	10	2.01	0003	Pengelolaan Leger Jalan			
1	03	10	2.01	0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
1	03	10	2.01	0005	Pembangunan Jalan			
1	03	10	2.01	0006	Pelebaran Jalan Menuju Standar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			
1	03	10	2.01	0008	Rekonstruksi Jalan			
1	03	10	2.01	0009	Rehabilitasi Jalan			
1	03	10	2.01	0010	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1	03	10	2.01	0011	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1	03	10	2.01	0012	Pembangunan Jembatan			
1	03	10	2.01	0013	Pembangunan Flyover			
1	03	10	2.01	0014	Pembangunan Underpass			
1	03	10	2.01	0015	Pembangunan Terowongan/Tunnel			
1	03	10	2.01	0016	Penggantian Jembatan			
1	03	10	2.01	0017	Pelebaran Jembatan			
1	03	10	2.01	0018	Rehabilitasi Jembatan			
1	03	10	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1	03	10	2.01	0020	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1	03	10	2.01	0021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			
1	03	10	2.01	0022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1	03	10	2.01	0023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1	03	10	2.01	0024	Pembangunan Jalan Strategis Desa			
1	03	10	2.01	0025	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa			
1	03	10	2.01	0026	Pembangunan Jembatan Gantung			
1	03	10	2.01	0027	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung			
1	03	11	2.01	0001	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0002	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan			
1	03	11	2.01	0003	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0005	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.01	0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
1	03	11	2.01	0008	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.02	0001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.02	0002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.02	0003	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			
1	03	11	2.02	0004	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU			
1	03	11	2.02	0005	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur			
1	03	11	2.02	0006	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			
1	03	11	2.02	0007	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			
1	03	11	2.02	0008	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02	0009	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi			
1	03	11	2.02	0010	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi			
1	03	11	2.02	0011	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi			
1	03	11	2.03	0001	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.03	0002	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional			
1	03	11	2.03	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.03	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional			
1	03	11	2.03	0005	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan			
1	03	11	2.04	0001	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0002	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	12	2.01	0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			
1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
1	03	12	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
1	03	12	2.03	0002	Sistem Informasi Penataan Ruang			
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
1	03	12	2.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			
1	03	12	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
1	03	13	5.01	0001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0004	Penetapan RTR KSP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.01	0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	0005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.02	0002	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan			
1	04	02	2.02	0003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP			
1	04	02	2.02	0005	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			
1	04	02	2.03	0002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.03	0003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
1	04	02	2.03	0005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.04	0001	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.04	0002	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			
1	04	03	2.01	0002	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.02	0009	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.03	0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.03	0005	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.03	0006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			
1	04	03	2.03	0008	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			
1	04	04	2.01	0002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	04	2.01	0003	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	05	2.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang			
1	04	05	2.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			
1	04	05	3.01	0007	Pembangunan Rumah Khusus			
1	04	05	4.01	0008	Pembangunan Rumah Khusus			
1	05	02	2.01	0001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
1	05	02	2.01	0002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
1	05	02	2.01	0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	05	02	2.01	0009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			
1	05	02	2.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
1	05	03	2.01	0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
1	05	03	2.02	0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	0005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
1	05	03	2.02	0007	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi			
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1	05	03	2.03	0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.04	0006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.04	0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			
1	05	04	2.01	0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
1	05	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1	05	04	2.01	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			
1	05	04	2.05	0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	07	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
2	07	04	2.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	1.03	0002	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			
2	08	07	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
2	08	07	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			
2	09	02	2.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			
2	09	02	2.01	0005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			
2	09	03	2.01	0004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.01	0005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			
2	09	03	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	04	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	0002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	0003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	2.01	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			
2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01	0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara			
2	11	02	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.02	0001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			
2	11	02	2.02	0003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
2	11	03	2.01	0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			
2	11	03	2.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			
2	11	03	2.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
2	11	03	2.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			
2	11	04	2.01	0002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
2	11	04	2.01	0005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			
2	11	06	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
2	11	08	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			
2	11	10	2.01	0001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			
2	11	11	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			
2	11	11	2.01	0002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
2	11	11	2.01	0006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan			
2	14	02	2.01	0001	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			
2	14	02	2.01	0003	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			
2	14	02	2.01	0005	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			
2	14	02	2.01	0006	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			
2	14	02	2.01	0010	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			
2	14	02	2.01	0011	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			
2	14	02	2.01	0014	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
2	14	02	2.01	0015	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			
2	14	02	2.02	0001	Perumusan Parameter Kependudukan			
2	14	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2	14	02	2.02	0004	Pemetaan Kependudukan			
2	14	02	2.02	0007	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			
2	14	02	2.02	0008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			
2	14	02	2.02	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			
2	14	03	2.01	0001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
2	14	03	2.01	0002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	2.01	0003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			
2	14	03	2.01	0004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
2	14	03	2.01	0005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			
2	14	03	2.01	0006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
2	14	03	2.01	0007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			
2	14	03	2.02	0001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
2	14	03	2.02	0003	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0002	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
2	14	03	2.03	0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			
2	14	03	2.03	0012	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			
2	14	03	2.04	0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			
2	14	04	2.01	0001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
2	14	04	2.01	0002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04	2.01	0009	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			
2	14	04	2.01	0010	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK			
2	14	04	2.01	0011	Advokasi dan Promosi IPK			
2	14	04	2.01	0012	Sosialisasi IPK			
2	14	04	2.01	0013	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK			
2	15	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.03	0002	Pembangunan Gedung Terminal			
2	15	02	2.03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			
2	15	02	2.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			
2	15	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			
2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2	15	02	2.06	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.06	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.07	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
2	15	02	2.07	0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			
2	15	02	2.07	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			
2	15	02	2.07	0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			
2	15	02	2.08	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ			
2	15	02	2.08	0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.08	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	15	02	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	15	02	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.16	0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2	15	02	3.17	0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2	15	02	3.17	0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2	15	02	4.17	0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2	15	02	4.17	0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2	15	03	2.06	0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.06	0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.07	0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.07	0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.13	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.13	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	04	2.01	0001	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter			
2	15	04	3.02	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	3.02	0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	4.02	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2	15	04	4.02	0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik			
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media			
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis			
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2	17	03	2.01	0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	17	03	2.01	0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	17	04	2.01	0002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.02	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2	17	05	2.03	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			
2	17	06	2.01	0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	17	07	2.01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
2	17	07	2.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
2	17	08	2.01	0001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			
2	18	02	2.01	0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
2	18	02	2.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			
2	18	04	2.01	0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	18	04	2.01	0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2	18	04	2.01	0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2	18	04	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2	18	05	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2	18	06	2.01	0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
2	19	02	2.01	0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			
2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah			
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			
2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			
2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur			
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka			
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
2	24	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3	25	03	2.05	0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3	26	02	2.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.03	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	0001	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	0003	Pengelolaan Investasi Pariwisata			
3	26	02	2.04	0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
3	26	02	2.04	0005	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			
3	26	03	2.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
3	26	03	2.01	0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	04	2.02	0001	Pengembangan Riset			
3	26	04	2.02	0006	Pemberian Insentif			
3	26	04	2.02	0007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			
3	26	04	2.02	0008	Perlindungan Hasil Kreativitas			
3	26	04	2.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3	26	05	2.01	0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
3	26	05	2.01	0003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			
3	26	05	2.01	0004	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
3	26	05	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.02	0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			
3	27	02	2.02	0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			
3	27	02	2.05	0001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			
3	27	02	2.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.05	0005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
3	27	02	2.06	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3	27	03	2.01	0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			
3	27	03	2.01	0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			
3	27	03	2.01	0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan			
3	27	03	2.02	0001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
3	27	03	2.02	0005	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage			
3	27	03	2.02	0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
3	27	04	2.01	0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.02	0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
3	27	04	2.02	0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			
3	27	04	2.02	0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.04	0001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			
3	27	04	2.04	0003	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis			
3	27	04	2.05	0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			
3	27	05	2.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3	27	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			
3	27	06	2.02	0004	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan			
3	27	07	2.01	0004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			
3	28	04	2.01	0001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3	28	04	2.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	0004	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			
3	28	04	2.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	0009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA			
3	30	04	1.03	0001	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi			
3	30	05	2.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			
3	30	05	2.01	0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	2.01	0001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
3	30	07	2.01	0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			
3	31	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
3	31	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			
4	01	02	2.02	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
4	02	02	2.04	0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			

H. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

Kode Akun						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	01	02			Pajak Rokok
2	1	01	02	01		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
2	1	01	02	02		Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
2	1	01	02	03		Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
2	1	01	03			Pajak Penerangan Jalan
2	1	01	03	01		Pajak Penerangan Jalan-Penyediaan Penerangan Jalan
2	1	02	02			Retribusi Perizinan Tertentu
2	1	02	02	01		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	1	02	02	02		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2	2	1	01			Dana Perimbangan
2	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	2	1	01	01	0001	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	2	1	01	01	0002	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2	2	1	01	01	0003	Kurang Bayar DBH Pajak
2	2	1	01	01	0004	Kurang Bayar DBH SDA
2	2	1	01	01	0014	DBH Sawit
2	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	1	01	02	0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
2	2	1	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	2	1	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	2	1	01	02	0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	2	1	01	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
2	2	1	01	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
2	2	1	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2	2	1	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
2	2	1	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2	2	1	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
2	2	1	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
2	2	1	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2	2	1	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
2	2	1	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
2	2	1	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
2	2	1	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
2	2	1	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
2	2	1	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	2	1	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
2	2	1	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
2	2	1	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
2	2	1	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
2	2	1	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
2	2	1	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2	2	1	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	2	1	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
2	2	1	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
2	2	1	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
2	2	1	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
2	2	1	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
2	2	1	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
2	2	1	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Kode Akun						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
2	2	1	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
2	2	1	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
2	2	1	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
2	2	1	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
2	2	1	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
2	2	1	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
2	2	1	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
2	2	1	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
2	2	1	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
2	2	1	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
2	2	1	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
2	2	1	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
2	2	1	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
2	2	1	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
2	2	1	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
2	2	1	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
2	2	1	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
2	2	1	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
2	2	1	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
2	2	1	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
2	2	1	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
2	2	1	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
2	2	1	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
2	2	1	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
2	2	1	01	03	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
2	2	1	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
2	2	1	01	03	0053	DAK Fisik- Bidang Transportasi Laut-Reguler
2	2	1	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
2	2	1	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
2	2	1	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
2	2	1	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
2	2	1	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
2	2	1	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
2	2	1	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	1	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
2	2	1	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
2	2	1	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
2	2	1	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
2	2	1	01	03	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
2	2	1	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
2	2	1	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
2	2	1	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
2	2	1	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
2	2	1	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
2	2	1	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
2	2	1	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
2	2	1	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
2	2	1	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
2	2	1	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
2	2	1	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
2	2	1	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
2	2	1	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	1	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	1	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	1	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	1	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	1	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	2	1	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	1	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	2	1	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	1	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	1	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	1	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	1	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	2	1	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	1	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	1	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	1	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	1	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	1	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	1	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	2	1	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	2	1	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	2	1	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	2	1	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
2	2	1	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
2	2	1	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	2	1	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
2	2	1	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
2	2	1	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
2	2	1	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
2	2	1	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
2	2	1	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
2	2	1	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
2	2	1	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
2	2	1	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	1	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
2	2	1	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
2	2	1	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	2	1	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
2	2	1	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	2	1	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
2	2	1	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
2	2	1	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
2	2	1	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	2	1	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2	1	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	2	1	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
2	2	1	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK

Kode Akun						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	04	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
2	2	1	01	04	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
2	2	1	01	04	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
2	2	1	01	04	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
2	2	1	01	04	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
2	2	1	01	04	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
2	2	1	01	04	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
2	2	1	01	04	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
2	2	1	01	04	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	1	01	04	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	2	1	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
2	2	1	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
2	2	1	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
2	2	1	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
2	2	1	06	01		Insentif Fiskal
2	2	1	06	01	0001	Insentif Fiskal
2	2	2	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
2	2	2	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
2	2	2	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

I-K. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING SESUAI DENGAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN SURAT DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
1	1	06	15	10	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	06	15	10	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	06	15	10	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	15	10	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	15	10	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
1	1	06	15	10	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	15	10	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1	1	06	15	10	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
1	1	06	15	10	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
1	1	06	15	10	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
1	1	06	15	10	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
1	1	06	15	10	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
1	1	06	15	10	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
1	1	06	15	10	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
1	1	06	15	10	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
1	1	07	01	01	0014	Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit
1	1	07	01	03	0066	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
1	1	07	01	03	0067	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SD
1	1	07	01	03	0068	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
1	1	07	01	03	0069	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
1	1	07	01	03	0070	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
1	1	07	01	03	0071	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
1	1	07	01	03	0072	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
1	1	07	01	03	0073	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	03	0074	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
1	1	07	01	03	0075	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
1	1	07	01	03	0076	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
1	1	07	01	03	0077	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
1	1	07	01	03	0078	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0079	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	07	01	03	0080	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	07	01	03	0081	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	07	01	03	0082	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
1	1	07	01	03	0083	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	07	01	03	0084	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
1	1	07	01	03	0085	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	07	01	03	0086	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	07	01	03	0087	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	07	01	03	0088	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	07	01	03	0089	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	07	01	03	0090	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	07	01	03	0091	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	07	01	03	0092	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0093	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0094	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0095	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0096	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	07	01	03	0097	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	07	01	03	0098	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	07	01	03	0099	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	07	01	03	0100	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	07	01	04	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
1	1	07	01	04	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
1	1	07	01	04	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
1	1	07	01	04	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1	1	10	01	04	7536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
1	1	10	01	04	7538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	10	01	04	7539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	10	01	04	7540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	10	01	04	7541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
1	1	10	01	04	7542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	10	01	04	7543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1	1	10	01	04	7544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
1	1	10	01	04	7545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
1	1	10	01	04	7546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
1	1	10	01	04	7547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
1	1	10	01	04	7548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
1	1	10	01	04	7549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
1	1	10	01	04	7550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	7551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
1	1	10	01	05	0134	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH Sawit
1	1	10	01	05	0137	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
1	1	10	01	05	0138	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
1	1	10	01	05	0139	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
1	1	10	01	05	0140	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
1	1	10	01	05	0141	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
1	1	10	01	05	0142	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
1	1	10	01	05	0143	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
1	1	10	01	05	0144	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
1	1	10	01	05	0145	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
1	1	10	01	05	0146	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
1	1	10	01	05	0147	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
1	1	10	01	05	0148	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
1	1	10	01	05	0149	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	10	01	05	0150	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	10	01	05	0151	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	10	01	05	0152	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	10	01	05	0153	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
1	1	10	01	05	0154	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	10	01	05	0155	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
1	1	10	01	05	0156	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	10	01	05	0157	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
1	1	10	01	05	0158	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	10	01	05	0159	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	10	01	05	0160	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	10	01	05	0161	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	10	01	05	0162	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
1	1	10	01	05	0163	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0164	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	10	01	05	0165	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	10	01	05	0166	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	10	01	05	0167	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	10	01	05	0168	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	10	01	05	0169	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
1	1	10	01	05	0170	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
1	1	10	01	05	0171	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1	1	10	01	05	0172	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
1	1	10	01	05	0173	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
1	1	10	01	05	0174	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
1	1	10	01	05	0175	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
2	1	06	01	03	0063	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
2	1	06	01	03	0064	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2	1	06	01	03	0065	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2	1	06	01	03	0066	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2	1	06	01	03	0067	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2	1	06	01	03	0068	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kebersihan
2	1	06	01	03	0069	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	03	0070	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
2	1	06	01	03	0071	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
2	1	06	01	03	0072	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
2	1	06	01	03	0073	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
2	1	06	01	03	0074	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
2	1	06	01	03	0075	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
2	1	06	01	03	0076	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
2	1	06	01	03	0077	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
2	1	06	01	03	0078	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
2	1	07	01	04	7558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2	1	07	01	04	7559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2	1	07	01	04	7560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2	1	07	01	04	7561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2	1	07	01	04	7562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
2	1	07	01	04	7563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	07	01	04	7564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
2	1	07	01	04	7565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
2	1	07	01	04	7566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
2	1	07	01	04	7567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
2	1	07	01	04	7568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	7569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
2	1	07	01	04	7570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
2	1	07	01	04	7571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
2	1	07	01	04	7572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
2	1	07	02	01	0139	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit
2	1	07	02	01	0142	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
2	1	07	02	01	0143	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
2	1	07	02	01	0144	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
2	1	07	02	01	0145	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
2	1	07	02	01	0146	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
2	1	07	02	01	0147	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
2	1	07	02	01	0148	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
2	1	07	02	01	0149	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
2	1	07	02	01	0150	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
2	1	07	02	01	0151	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
2	1	07	02	01	0152	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
2	1	07	02	01	0153	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
2	1	07	02	01	0154	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0155	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	1	07	02	01	0156	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	1	07	02	01	0157	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	1	07	02	01	0158	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0159	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	1	07	02	01	0160	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2	1	07	02	01	0161	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	1	07	02	01	0162	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
2	1	07	02	01	0163	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
2	1	07	02	01	0164	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	1	07	02	01	0165	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
2	1	07	02	01	0166	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	1	07	02	01	0167	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
2	1	07	02	01	0168	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0169	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0170	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0171	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0172	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	1	07	02	01	0173	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	1	07	02	01	0174	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
2	1	07	02	01	0175	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
2	1	07	02	01	0176	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
2	1	07	02	01	0177	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
2	1	07	02	01	0178	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
2	1	07	02	01	0179	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
2	1	07	02	01	0180	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4	1	04	15	10	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
4	1	04	15	10	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
4	1	04	15	10	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	15	10	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	15	10	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
4	1	04	15	10	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	15	10	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	04	15	10	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
4	1	04	15	10	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	04	15	10	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	04	15	10	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	04	15	10	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
4	1	04	15	10	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	04	15	10	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	04	15	10	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	2	01	01	01	0014	DBH Sawit
4	2	01	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
4	2	01	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
4	2	01	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
4	2	01	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
4	2	01	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
4	2	01	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
4	2	01	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
4	2	01	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
4	2	01	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
4	2	01	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
4	2	01	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
4	2	01	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
4	2	01	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
4	2	01	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
4	2	01	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
4	2	01	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
4	2	01	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
4	2	01	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
4	2	01	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
4	2	01	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
4	2	01	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
4	2	01	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
4	2	01	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
4	2	01	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
4	2	01	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
4	2	01	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
4	2	01	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
4	2	01	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4	2	01	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
4	2	01	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
4	2	01	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
4	2	01	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
4	2	01	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
5	1	01	03	01	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	01	03	01	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	01	03	01	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	01	03	01	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	01	03	01	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
5	1	01	03	02	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	01	03	02	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	01	03	02	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	01	03	02	0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
5	1	01	03	02	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	02	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
5	1	01	03	02	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	01	03	02	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
6	1	01	02	01	0130	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sawit
6	1	01	02	01	0137	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
6	1	01	02	01	0138	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SD
6	1	01	02	01	0139	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
6	1	01	02	01	0140	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
6	1	01	02	01	0141	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
6	1	01	02	01	0142	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
6	1	01	02	01	0143	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-SLB
6	1	01	02	01	0144	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
6	1	01	02	01	0145	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
6	1	01	02	01	0146	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
6	1	01	02	01	0147	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
6	1	01	02	01	0148	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
6	1	01	02	01	0149	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0150	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
6	1	01	02	01	0151	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0152	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
6	1	01	02	01	0153	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
6	1	01	02	01	0154	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6	1	01	02	01	0155	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
6	1	01	02	01	0156	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6	1	01	02	01	0157	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6	1	01	02	01	0158	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
6	1	01	02	01	0159	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
6	1	01	02	01	0160	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
6	1	01	02	01	0161	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
6	1	01	02	01	0162	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
6	1	01	02	01	0163	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0164	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0165	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0166	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0167	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
6	1	01	02	01	0168	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0169	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate
6	1	01	02	01	0170	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
6	1	01	02	01	0171	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
6	1	01	02	01	0172	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
6	1	01	02	01	0173	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
6	1	01	02	01	0174	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
6	1	01	02	01	0175	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
7	1	04	15	10	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat-LO
7	1	04	15	10	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
7	1	04	15	10	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
7	1	04	15	10	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	15	10	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	15	10	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO
7	1	04	15	10	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	04	15	10	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
7	1	04	15	10	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO
7	1	04	15	10	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO
7	1	04	15	10	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
7	1	04	15	10	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
7	1	04	15	10	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
7	1	04	15	10	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	15	10	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
7	2	01	01	01	0014	DBH Sawit-LO
7	2	01	01	03	0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO
7	2	01	01	03	0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO
7	2	01	01	03	0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO
7	2	01	01	03	0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB-LO
7	2	01	01	03	0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA-LO
7	2	01	01	03	0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK-LO
7	2	01	01	03	0072	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB-LO
7	2	01	01	03	0073	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan-LO
7	2	01	01	03	0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting-LO
7	2	01	01	03	0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO
7	2	01	01	03	0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah-LO
7	2	01	01	03	0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate-LO
7	2	01	01	03	0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
7	2	01	01	03	0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
7	2	01	01	03	0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
7	2	01	01	03	0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO
7	2	01	01	03	0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
7	2	01	01	03	0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu-LO
7	2	01	01	03	0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate-LO
7	2	01	01	03	0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
7	2	01	01	03	0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate-LO
7	2	01	01	03	0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
7	2	01	01	03	0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO
7	2	01	01	03	0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0096	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate-LO
7	2	01	01	03	0099	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas-LO
7	2	01	01	03	0100	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO
7	2	01	01	04	0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO
7	2	01	01	04	0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO
7	2	01	01	04	0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO
7	2	01	01	04	0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO
7	2	01	06	01		Insentif Fiskal-LO
7	2	01	06	01	0001	Insentif Fiskal-LO
8	1	01	03	01	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
8	1	01	03	01	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	01	03	01	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	01	03	01	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	01	03	01	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8	1	01	03	02	0034	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
8	1	01	03	02	0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	03	02	0036	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
8	1	01	03	02	0037	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
8	1	01	03	02	0038	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
8	1	01	03	02	0039	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
8	1	01	03	02	0040	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
8	1	01	03	02	0041	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
8	1	01	03	02	0042	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
8	1	01	03	02	0043	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
8	1	01	03	02	0044	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
8	1	07	04	15	3936	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
8	1	07	04	15	3937	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
8	1	07	04	15	3938	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	1	07	04	15	3939	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	04	15	3940	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3941	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan
8	1	07	04	15	3942	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
8	1	07	04	15	3943	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
8	1	07	04	15	3944	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
8	1	07	04	15	3945	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
8	1	07	04	15	3946	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
8	1	07	04	15	3947	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
8	1	07	04	15	3948	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
8	1	07	04	15	3949	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
8	1	07	04	15	3950	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
8	1	07	04	15	3951	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
8	1	07	05	01	0121	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit
8	1	07	05	01	0122	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD
8	1	07	05	01	0123	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD
8	1	07	05	01	0124	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP
8	1	07	05	01	0125	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB
8	1	07	05	01	0126	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA
8	1	07	05	01	0127	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK
8	1	07	05	01	0128	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SLB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0129	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan
8	1	07	05	01	0130	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
8	1	07	05	01	0131	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan
8	1	07	05	01	0132	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana
8	1	07	05	01	0133	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah
8	1	07	05	01	0134	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0135	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
8	1	07	05	01	0136	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate
8	1	07	05	01	0137	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
8	1	07	05	01	0138	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
8	1	07	05	01	0139	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
8	1	07	05	01	0140	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
8	1	07	05	01	0141	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
8	1	07	05	01	0142	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
8	1	07	05	01	0143	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate
8	1	07	05	01	0144	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
8	1	07	05	01	0145	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate
8	1	07	05	01	0146	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
8	1	07	05	01	0147	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
8	1	07	05	01	0148	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0149	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0150	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0151	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0152	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
8	1	07	05	01	0153	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
8	1	07	05	01	0154	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0155	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8	1	07	05	01	0156	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
8	1	07	05	01	0157	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
8	1	07	05	01	0158	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
8	1	07	05	01	0159	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru
8	1	07	05	01	0160	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana

I-K. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING BERDASARKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1	1	06	15	10	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
1	1	06	15	10	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
1	1	06	15	10	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
1	1	06	15	10	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
1	1	06	15	10	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
1	1	06	15	10	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
1	1	06	15	10	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	15	10	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
1	1	06	15	10	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
1	1	06	15	10	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	15	10	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	15	10	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
1	1	06	15	10	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1	1	06	15	10	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1	1	06	15	10	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
1	1	06	15	10	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	15	10	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
1	1	06	15	10	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	15	10	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	15	10	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1	1	06	15	10	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	15	10	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	15	10	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
1	1	06	15	10	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	15	10	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	15	10	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	15	10	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
1	1	06	15	10	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
1	1	06	15	10	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
1	1	06	15	10	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	15	10	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
1	1	06	15	10	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	15	10	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
1	1	06	15	10	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	15	10	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	15	10	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	15	10	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	15	10	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
1	1	06	15	10	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	15	10	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	06	15	10	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	06	15	10	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	06	15	10	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
1	1	06	15	10	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
1	1	06	15	10	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
1	1	06	15	10	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
1	1	06	15	10	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
1	1	06	15	10	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
1	1	06	15	10	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15	10	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
1	1	06	15	10	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
1	1	06	15	10	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK
1	1	06	15	10	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK
1	1	06	15	10	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK
1	1	06	15	10	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
1	1	06	15	86		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
1	1	06	15	86	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
1	1	06	15	86	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	86	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
1	1	06	15	86	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
1	1	06	15	86	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
1	1	07	01	01	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
1	1	07	01	01	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
1	1	07	01	01	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
1	1	07	01	01	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	07	01	01	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
1	1	07	01	01	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	07	01	01	0008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	07	01	01	0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	07	01	01	0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
1	1	07	01	01	0011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
1	1	07	01	01	0012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	07	01	01	0013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	07	01	02	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	02	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	07	01	02	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1	1	07	01	02	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1	1	07	01	02	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1	1	07	01	02	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1	1	07	01	03	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	07	01	03	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	07	01	03	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	07	01	03	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1	1	07	01	03	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	07	01	03	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
1	1	07	01	03	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	07	01	03	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	07	01	03	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	07	01	03	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	07	01	03	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
1	1	07	01	03	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	07	01	03	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	07	01	03	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	07	01	03	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
1	1	07	01	03	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
1	1	07	01	03	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	07	01	03	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	07	01	03	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan Rumah Sakit Pratama
1	1	07	01	03	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	07	01	03	0022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-BAPELKES
1	1	07	01	03	0023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas DTPK
1	1	07	01	03	0024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	07	01	03	0025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	07	01	03	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
1	1	07	01	03	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	07	01	03	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Swadaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	03	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Khusus
1	1	07	01	03	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	07	01	03	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	07	01	03	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	07	01	03	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	07	01	03	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1	1	07	01	03	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
1	1	07	01	03	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
1	1	07	01	03	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
1	1	07	01	03	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
1	1	07	01	03	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
1	1	07	01	03	0040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
1	1	07	01	03	0041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	07	01	03	0042	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0043	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0044	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
1	1	07	01	03	0045	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	07	01	03	0046	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
1	1	07	01	03	0047	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	07	01	03	0048	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	07	01	03	0049	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	07	01	03	0050	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	07	01	03	0051	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
1	1	07	01	03	0052	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
1	1	07	01	03	0053	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Transportasi Laut-Reguler
1	1	07	01	03	0054	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
1	1	07	01	03	0055	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
1	1	07	01	03	0056	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
1	1	07	01	03	0057	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
1	1	07	01	03	0058	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
1	1	07	01	03	0059	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
1	1	07	01	03	0060	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
1	1	07	01	03	0061	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
1	1	07	01	03	0062	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
1	1	07	01	03	0063	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
1	1	07	01	03	0064	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
1	1	07	01	03	0065	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	04	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	07	01	04	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	07	01	04	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
1	1	07	01	04	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
1	1	07	01	04	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
1	1	07	01	04	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
1	1	07	01	04	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	07	01	04	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	07	01	04	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1	1	07	01	04	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK
1	1	07	01	04	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	07	01	04	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	07	01	04	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	07	01	04	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	1	07	01	04	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM
1	1	07	01	04	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	07	01	04	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1	1	07	01	04	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
1	1	07	01	04	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal
1	1	07	01	04	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKB-KB
1	1	07	01	04	0022	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
1	1	07	01	04	0023	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	1	07	01	04	0024	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
1	1	07	01	04	0025	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-PK2UMK
1	1	07	01	04	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
1	1	07	01	04	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
1	1	07	01	04	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
1	1	07	01	04	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
1	1	07	01	04	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
1	1	07	01	04	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
1	1	07	01	04	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
1	1	07	01	04	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
1	1	07	01	04	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	07	01	04	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
1	1	07	06	01		Piutang Insentif Fiskal
1	1	07	06	01	0001	Piutang Insentif Fiskal
1	1	10	01	04	3551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	10	01	04	3552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	10	01	04	3553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
1	1	10	01	04	3555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
1	1	10	01	04	3556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
1	1	10	01	04	3557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
1	1	10	01	04	3558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
1	1	10	01	04	3559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
1	1	10	01	04	3560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1	1	10	01	04	3561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
1	1	10	01	04	3562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
1	1	10	01	04	3563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
1	1	10	01	04	3564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	10	01	04	3565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
1	1	10	01	04	3566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1	1	10	01	04	3567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	10	01	04	3569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
1	1	10	01	04	3570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	10	01	04	3571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
1	1	10	01	04	3572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	10	01	04	3573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	10	01	04	3574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	10	01	04	3575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1	1	10	01	04	3576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
1	1	10	01	04	3577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	10	01	04	3578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
1	1	10	01	04	3579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	10	01	04	3580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	10	01	04	3581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
1	1	10	01	04	3583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
1	1	10	01	04	3584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
1	1	10	01	04	3585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	10	01	04	3586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
1	1	10	01	04	3587	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
1	1	10	01	04	3588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	10	01	04	3589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
1	1	10	01	04	3590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	10	01	04	3591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
1	1	10	01	04	3592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	10	01	04	3593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	10	01	04	3594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
1	1	10	01	04	3595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	10	01	04	3597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	10	01	04	3598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	10	01	04	3599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
1	1	10	01	04	3600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
1	1	10	01	04	3601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
1	1	10	01	04	3602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
1	1	10	01	04	3603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
1	1	10	01	04	3604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
1	1	10	01	04	3605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10	01	04	3606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
1	1	10	01	04	3607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
1	1	10	01	04	3608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
1	1	10	01	04	6608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
1	1	10	01	04	6618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
1	1	10	01	04	6628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
1	1	10	01	04	6638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
1	1	10	01	04	6647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
1	1	10	01	05	0001	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
1	1	10	01	05	0002	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 21
1	1	10	01	05	0003	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0004	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT
1	1	10	01	05	0005	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	10	01	05	0006	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Gas Bumi
1	1	10	01	05	0007	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	10	01	05	0008	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	10	01	05	0009	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	10	01	05	0010	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-PSDH
1	1	10	01	05	0011	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
1	1	10	01	05	0012	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	10	01	05	0013	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Perikanan
1	1	10	01	05	0014	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	10	01	05	0015	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
1	1	10	01	05	0016	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	10	01	05	0017	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1	1	10	01	05	0018	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1	1	10	01	05	0019	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	10	01	05	0020	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	10	01	05	0021	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	10	01	05	0022	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1	1	10	01	05	0023	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	10	01	05	0024	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
1	1	10	01	05	0025	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	10	01	05	0026	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	10	01	05	0027	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	10	01	05	0028	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	10	01	05	0029	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
1	1	10	01	05	0030	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	10	01	05	0031	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	10	01	05	0032	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	10	01	05	0033	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0034	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
1	1	10	01	05	0035	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	10	01	05	0036	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	10	01	05	0037	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
1	1	10	01	05	0038	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	10	01	05	0039	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
1	1	10	01	05	0040	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
1	1	10	01	05	0041	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	10	01	05	0042	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	10	01	05	0043	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
1	1	10	01	05	0044	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0045	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0046	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
1	1	10	01	05	0047	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	10	01	05	0048	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	10	01	05	0049	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	10	01	05	0050	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	10	01	05	0051	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1	1	10	01	05	0052	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
1	1	10	01	05	0053	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
1	1	10	01	05	0054	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
1	1	10	01	05	0055	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
1	1	10	01	05	0056	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
1	1	10	01	05	0057	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
1	1	10	01	05	0058	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	10	01	05	0059	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
1	1	10	01	05	0060	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	10	01	05	0061	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0062	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	10	01	05	0063	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
1	1	10	01	05	0064	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	10	01	05	0065	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	10	01	05	0066	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	10	01	05	0067	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	10	01	05	0068	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
1	1	10	01	05	0069	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	10	01	05	0070	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	10	01	05	0071	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
1	1	10	01	05	0072	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
1	1	10	01	05	0073	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
1	1	10	01	05	0074	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	1	10	01	05	0075	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	10	01	05	0076	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	10	01	05	0077	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1	1	10	01	05	0078	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1	1	10	01	05	0079	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	10	01	05	0080	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	10	01	05	0081	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	10	01	05	0082	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
1	1	10	01	05	0083	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
1	1	10	01	05	0084	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	10	01	05	0085	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1	1	10	01	05	0086	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
1	1	10	01	05	0095	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Sekolah Menengah Kejuruan
1	1	10	01	05	0096	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
1	1	10	01	05	0097	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
1	1	10	01	05	0098	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0099	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
1	1	10	01	05	0100	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
1	1	10	01	05	0101	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
1	1	10	01	05	0102	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKB-KB
1	1	10	01	05	0103	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
1	1	10	01	05	0104	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	1	10	01	05	0109	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
1	1	10	01	05	0110	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
1	1	10	01	05	0111	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
1	1	10	01	05	0112	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
1	1	10	01	05	0113	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
1	1	10	01	05	0114	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
1	1	10	01	05	0115	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
1	1	10	01	05	0116	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
1	1	10	01	05	0117	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
1	1	10	01	05	0118	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-PK2UMK
1	1	10	01	05	0119	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
1	1	10	01	05	0120	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
1	1	10	01	05	0121	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
1	1	10	01	05	0122	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
1	1	10	01	05	0123	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
1	1	10	01	05	0124	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
1	1	10	01	05	0125	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
1	1	10	01	05	0126	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
1	1	10	01	05	0127	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
1	1	10	01	05	0128	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	10	01	05	0129	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
1	1	10	01	05	0130	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1	1	10	01	05	0131	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1	1	10	01	05	0132	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1	1	10	01	05	0133	Penyisihan Piutang Insentif Fiskal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	03	0005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
2	1	06	01	03	0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel
2	1	06	01	03	0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
2	1	06	01	03	0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
2	1	06	01	03	0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
2	1	06	01	03	0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	01	03	0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
2	1	06	01	03	0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
2	1	06	01	03	0013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	03	0014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
2	1	06	01	03	0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	03	0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	03	0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2	1	06	01	03	0019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	01	03	0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	03	0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	03	0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	03	0024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	03	0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2	1	06	01	03	0026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	03	0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	03	0028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
2	1	06	01	03	0029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03	0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	03	0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	03	0032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
2	1	06	01	03	0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
2	1	06	01	03	0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	03	0035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	03	0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	03	0037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	03	0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	03	0039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
2	1	06	01	03	0040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	03	0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	03	0042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	03	0043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	03	0044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	03	0045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	03	0046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	1	06	01	03	0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
2	1	06	01	03	0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
2	1	06	01	03	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
2	1	06	01	03	0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
2	1	06	01	03	0052	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2	1	06	01	03	0053	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
2	1	06	01	03	0054	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	01	03	0055	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	01	03	0056	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Persetujuan Bangunan Gedung
2	1	06	01	03	0057	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2	1	06	01	03	0058	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pertambangan Rakyat
2	1	06	01	03	0059	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK
2	1	06	01	03	0060	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK
2	1	06	01	03	0061	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03	0062	Utang Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
2	1	06	01	08		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0001	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0002	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0003	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0004	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0005	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0006	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0007	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0008	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0009	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0010	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
2	1	06	01	08	0011	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0012	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0013	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0014	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0015	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0016	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0017	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0018	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0019	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0020	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
2	1	06	01	08	0021	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0022	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0023	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0024	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0025	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0026	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0027	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0028	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	08	0029	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0030	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
2	1	06	01	08	0031	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0032	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0033	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0034	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0035	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0036	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0037	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0038	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0039	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
2	1	06	01	08	0040	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	3572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	04	3573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	04	3574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	04	3575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	07	01	04	3576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
2	1	07	01	04	3577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	07	01	04	3578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	07	01	04	3579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	07	01	04	3580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2	1	07	01	04	3582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	07	01	04	3583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
2	1	07	01	04	3584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	07	01	04	3585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	07	01	04	3586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
2	1	07	01	04	3587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	07	01	04	3588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	07	01	04	3589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	07	01	04	3590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
2	1	07	01	04	3591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	07	01	04	3592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	07	01	04	3593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	07	01	04	3595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	07	01	04	3596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2	1	07	01	04	3597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	07	01	04	3598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	07	01	04	3599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	07	01	04	3600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	07	01	04	3601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	07	01	04	3602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	07	01	04	3603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	07	01	04	3604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	07	01	04	3605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
2	1	07	01	04	3607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	07	01	04	3608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	07	01	04	3609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	07	01	04	3610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
2	1	07	01	04	3611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	07	01	04	3612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	07	01	04	3613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	07	01	04	3614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	07	01	04	3615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	07	01	04	3616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	07	01	04	3617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
2	1	07	01	04	3619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2	1	07	01	04	3620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
2	1	07	01	04	3621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
2	1	07	01	04	3622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
2	1	07	01	04	3623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
2	1	07	01	04	3624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
2	1	07	01	04	3625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
2	1	07	01	04	3626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2	1	07	01	04	3627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
2	1	07	01	04	3628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
2	1	07	01	04	3629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	07	01	04	6629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
2	1	07	01	04	6639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
2	1	07	01	04	6649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
2	1	07	01	04	6659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
2	1	07	01	04	6674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK
2	1	07	01	04	6676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK
2	1	07	01	04	6687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
2	1	07	02	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
2	1	07	02	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
2	1	07	02	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
2	1	07	02	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	1	07	02	01	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
2	1	07	02	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
2	1	07	02	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
2	1	07	02	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
2	1	07	02	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
2	1	07	02	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
2	1	07	02	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
2	1	07	02	01	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2	1	07	02	01	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
2	1	07	02	01	0019	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU
2	1	07	02	01	0020	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
2	1	07	02	01	0021	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	07	02	01	0022	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	1	07	02	01	0023	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
2	1	07	02	01	0024	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2	1	07	02	01	0025	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
2	1	07	02	01	0026	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
2	1	07	02	01	0027	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2	1	07	02	01	0028	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
2	1	07	02	01	0029	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0030	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
2	1	07	02	01	0031	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
2	1	07	02	01	0032	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
2	1	07	02	01	0033	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	1	07	02	01	0034	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
2	1	07	02	01	0035	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
2	1	07	02	01	0036	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
2	1	07	02	01	0037	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
2	1	07	02	01	0038	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
2	1	07	02	01	0039	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2	1	07	02	01	0040	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	1	07	02	01	0041	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
2	1	07	02	01	0042	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
2	1	07	02	01	0043	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
2	1	07	02	01	0044	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
2	1	07	02	01	0045	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
2	1	07	02	01	0046	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
2	1	07	02	01	0047	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
2	1	07	02	01	0048	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
2	1	07	02	01	0049	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
2	1	07	02	01	0050	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
2	1	07	02	01	0051	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
2	1	07	02	01	0052	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
2	1	07	02	01	0053	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
2	1	07	02	01	0054	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
2	1	07	02	01	0055	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
2	1	07	02	01	0056	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
2	1	07	02	01	0057	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0058	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
2	1	07	02	01	0059	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
2	1	07	02	01	0060	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
2	1	07	02	01	0061	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
2	1	07	02	01	0062	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
2	1	07	02	01	0063	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
2	1	07	02	01	0064	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
2	1	07	02	01	0065	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
2	1	07	02	01	0066	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
2	1	07	02	01	0067	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
2	1	07	02	01	0068	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
2	1	07	02	01	0069	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
2	1	07	02	01	0070	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
2	1	07	02	01	0071	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
2	1	07	02	01	0072	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
2	1	07	02	01	0073	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
2	1	07	02	01	0074	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
2	1	07	02	01	0075	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
2	1	07	02	01	0076	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
2	1	07	02	01	0077	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
2	1	07	02	01	0078	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
2	1	07	02	01	0079	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler
2	1	07	02	01	0080	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
2	1	07	02	01	0081	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	1	07	02	01	0082	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-TPG PNSD
2	1	07	02	01	0083	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
2	1	07	02	01	0084	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-TKG PNSD
2	1	07	02	01	0085	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP PAUD
2	1	07	02	01	0086	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
2	1	07	02	01	0087	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0088	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
2	1	07	02	01	0089	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
2	1	07	02	01	0090	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
2	1	07	02	01	0091	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
2	1	07	02	01	0092	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
2	1	07	02	01	0093	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	07	02	01	0094	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-PK2UKM
2	1	07	02	01	0095	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	1	07	02	01	0096	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
2	1	07	02	01	0097	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
2	1	07	02	01	0098	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
2	1	07	02	01	0099	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	1	07	02	01	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	1	07	02	01	0101	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	1	07	02	01	0114	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
2	1	07	02	01	0115	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
2	1	07	02	01	0116	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
2	1	07	02	01	0117	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
2	1	07	02	01	0118	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
2	1	07	02	01	0119	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
2	1	07	02	01	0120	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
2	1	07	02	01	0121	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
2	1	07	02	01	0122	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
2	1	07	02	01	0123	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-PK2UMK
2	1	07	02	01	0124	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
2	1	07	02	01	0125	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
2	1	07	02	01	0126	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
2	1	07	02	01	0127	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
2	1	07	02	01	0128	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
2	1	07	02	01	0129	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0130	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP BOP Kesetaraan Kinerja
2	1	07	02	01	0131	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
2	1	07	02	01	0132	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
2	1	07	02	01	0133	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
2	1	07	02	01	0134	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1	07	02	01	0135	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	1	07	02	01	0136	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
2	1	07	02	01	0137	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
2	1	07	02	01	0138	Utang Kelebihan Pembayaran Insentif Fiskal
4	1	04	15	10		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
4	1	04	15	10	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	04	15	10	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	04	15	10	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	04	15	10	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
4	1	04	15	10	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
4	1	04	15	10	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
4	1	04	15	10	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
4	1	04	15	10	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
4	1	04	15	10	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
4	1	04	15	10	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	15	10	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
4	1	04	15	10	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
4	1	04	15	10	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	15	10	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
4	1	04	15	10	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
4	1	04	15	10	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
4	1	04	15	10	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	04	15	10	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
4	1	04	15	10	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	04	15	10	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
4	1	04	15	10	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	04	15	10	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	04	15	10	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	04	15	10	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
4	1	04	15	10	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
4	1	04	15	10	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	04	15	10	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
4	1	04	15	10	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	04	15	10	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	04	15	10	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	04	15	10	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
4	1	04	15	10	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
4	1	04	15	10	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	04	15	10	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
4	1	04	15	10	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
4	1	04	15	10	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	04	15	10	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
4	1	04	15	10	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	04	15	10	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	04	15	10	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	04	15	10	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
4	1	04	15	10	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	15	10	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
4	1	04	15	10	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
4	1	04	15	10	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Retribusi Pertambangan Rakyat
4	1	04	15	10	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
4	1	04	15	10	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
4	1	04	15	10	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
4	1	04	15	10	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
4	1	04	15	10	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
4	1	04	15	10	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	15	10	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4	1	04	15	10	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
4	1	04	15	10	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK
4	1	04	15	10	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK
4	1	04	15	10	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK
4	1	04	15	10	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
4	1	04	15	86		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
4	1	04	15	86	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
4	1	04	15	86	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	86	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
4	1	04	15	86	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
4	1	04	15	86	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
4	2	01	01			Dana Perimbangan
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	01	02	0001	DAU
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
4	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4	2	01	01	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
4	2	01	01	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	02	0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
4	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
4	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
4	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
4	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
4	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
4	2	01	01	03	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
4	2	01	01	03	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
4	2	01	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
4	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
4	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
4	2	01	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
4	2	01	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
4	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
4	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
4	2	01	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
4	2	01	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
4	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
4	2	01	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
4	2	01	01	03	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
4	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
4	2	01	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
4	2	01	01	04	0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	2	01	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
4	2	01	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK
4	2	01	01	04	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
4	2	01	01	04	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
4	2	01	01	04	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
4	2	01	01	04	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
4	2	01	01	04	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
4	2	01	01	04	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
4	2	01	01	04	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
4	2	01	01	04	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
4	2	01	01	04	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
4	2	01	01	04	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	2	01	06	01		Insentif Fiskal
4	2	01	06	01	0001	Insentif Fiskal
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
5	1	01	03	02	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
5	1	01	03	02	0033	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	07		Belanja Honorarium
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5	1	01	03	08		Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	03	09		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
5	1	01	03	09	0001	Belanja TPG PPPK
5	1	01	03	10		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
5	1	01	03	10	0001	Belanja TKG PPPK
5	1	01	03	11		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
5	1	01	03	11	0001	Belanja Tamsil Guru PPPK
5	1	01	03	12		Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
5	1	01	03	12	0001	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
5	1	01	08			Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
5	1	01	08	01		Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0001	Belanja Uang Representasi Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0002	Belanja Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0003	Belanja Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0004	Belanja Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0007	Belanja Jaminan Kematian Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0008	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0009	Belanja Pembebanan PPh Wali Nanggroe
5	1	01	08	01	0010	Belanja Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
5	1	01	08	02		Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0001	Belanja Uang Representasi Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	08	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0003	Belanja Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0004	Belanja Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0007	Belanja Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0008	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0009	Belanja Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
5	1	01	08	02	0010	Belanja Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
5	1	01	08	03		Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0001	Belanja Uang Representasi Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0002	Belanja Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0003	Belanja Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0004	Belanja Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0007	Belanja Jaminan Kematian Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0008	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0009	Belanja Pembebanan PPh Majelis Tinggi
5	1	01	08	03	0010	Belanja Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
5	1	01	08	04		Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0001	Belanja Uang Representasi Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0002	Belanja Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0003	Belanja Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0004	Belanja Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0007	Belanja Jaminan Kematian Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0008	Belanja Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0009	Belanja Pembebanan PPh Majelis Fungsional
5	1	01	08	04	0010	Belanja Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
6	1	01	02	01	0065	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
6	1	01	02	01	0066	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
6	1	01	02	01	0067	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
6	1	01	02	01	0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
6	1	01	02	01	0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
6	1	01	02	01	0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
6	1	01	02	01	0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
6	1	01	02	01	0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
6	1	01	02	01	0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6	1	01	02	01	0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
6	1	01	02	01	0076	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
6	1	01	02	01	0077	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
6	1	01	02	01	0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6	1	01	02	01	0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
6	1	01	02	01	0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
6	1	01	02	01	0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
6	1	01	02	01	0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
6	1	01	02	01	0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
6	1	01	02	01	0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
6	1	01	02	01	0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
6	1	01	02	01	0086	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0095	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
6	1	01	02	01	0096	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
6	1	01	02	01	0097	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut Reguler
6	1	01	02	01	0098	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
6	1	01	02	01	0099	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
6	1	01	02	01	0100	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
6	1	01	02	01	0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
6	1	01	02	01	0102	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKB-KB
6	1	01	02	01	0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
6	1	01	02	01	0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	1	01	02	01	0105	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
6	1	01	02	01	0106	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
6	1	01	02	01	0107	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
6	1	01	02	01	0108	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
6	1	01	02	01	0109	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
6	1	01	02	01	0110	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
6	1	01	02	01	0111	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
6	1	01	02	01	0112	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
6	1	01	02	01	0113	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
6	1	01	02	01	0114	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PK2UMK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0115	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
6	1	01	02	01	0116	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
6	1	01	02	01	0117	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
6	1	01	02	01	0118	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
6	1	01	02	01	0119	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
6	1	01	02	01	0120	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
6	1	01	02	01	0121	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
6	1	01	02	01	0122	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
6	1	01	02	01	0123	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
6	1	01	02	01	0124	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
6	1	01	02	01	0125	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1	01	02	01	0126	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
6	1	01	02	01	0127	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
6	1	01	02	01	0128	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
6	1	01	02	01	0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal
6	1	01	05	01	0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
6	1	01	05	01	0032	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
7	1	04	15	10		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO
7	1	04	15	10	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor-LO
7	1	04	15	10	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
7	1	04	15	10	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	15	10	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok-LO
7	1	04	15	10	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel-LO
7	1	04	15	10	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran-LO
7	1	04	15	10	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan-LO
7	1	04	15	10	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame-LO
7	1	04	15	10	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	15	10	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir-LO
7	1	04	15	10	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	15	10	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	15	10	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	15	10	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan-LO
7	1	04	15	10	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO
7	1	04	15	10	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	04	15	10	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	04	15	10	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN-LO
7	1	04	15	10	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	04	15	10	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-LO
7	1	04	15	10	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	04	15	10	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	04	15	10	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	15	10	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	04	15	10	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	04	15	10	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	04	15	10	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	04	15	10	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	04	15	10	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	04	15	10	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-LO
7	1	04	15	10	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-LO
7	1	04	15	10	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	04	15	10	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	04	15	10	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-LO
7	1	04	15	10	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan-LO
7	1	04	15	10	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	04	15	10	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air-LO
7	1	04	15	10	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	04	15	10	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	04	15	10	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	04	15	10	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	04	15	10	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	04	15	10	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	04	15	10	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
7	1	04	15	10	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
7	1	04	15	10	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-LO
7	1	04	15	10	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO
7	1	04	15	10	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD-LO
7	1	04	15	10	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO
7	1	04	15	10	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO
7	1	04	15	10	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO
7	1	04	15	10	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	15	10	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)-LO
7	1	04	15	10	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO
7	1	04	15	10	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO
7	1	04	15	10	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK-LO
7	1	04	15	10	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK-LO
7	1	04	15	10	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK-LO
7	1	04	15	10	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah-Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah-LO
7	1	04	15	86		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	86	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe-LO
7	1	04	15	86	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi-LO
7	1	04	15	86	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi-LO
7	1	04	15	86	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	86	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional-LO
7	1	04	15	86	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional-LO
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
7	2	01	01	01	0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
7	2	01	01	01	0011	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
7	2	01	01	01	0012	DBH SDA Kehutanan–DR-LO
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Perikanan-LO
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
7	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
7	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
7	2	01	01	02	0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO
7	2	01	01	02	0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO
7	2	01	01	02	0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
7	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
7	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
7	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
7	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
7	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO
7	2	01	01	03	0010	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO
7	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
7	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
7	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
7	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
7	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO
7	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
7	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
7	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
7	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
7	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
7	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO
7	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus-LO
7	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
7	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
7	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO
7	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
7	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
7	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0051	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SMK-LO
7	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO
7	2	01	01	03	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler -LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler -LO
7	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO
7	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO
7	2	01	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO
7	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO
7	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan-LO
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
7	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
7	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
7	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
7	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
7	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO
7	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
7	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
7	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
7	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
7	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO
7	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
7	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO
7	2	01	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO
7	2	01	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO
7	2	01	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO
7	2	01	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO
7	2	01	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO
7	2	01	01	04	0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO
7	2	01	01	04	0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO
7	2	01	01	04	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO
7	2	01	01	04	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO
7	2	01	01	04	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO
7	2	01	01	04	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO
7	2	01	01	04	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO
7	2	01	06	01		Insentif Fiskal-LO
7	2	01	06	01	0001	Insentif Fiskal-LO
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	01	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	03	01	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	03	01	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	03	01	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	03	01	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	03	02	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	03	02	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	01	03	02	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	03	02	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	03	02	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	02	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	01	03	02	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	03	02	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	03	02	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	03	02	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	01	03	02	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	03	02	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	03	02	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	03	02	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
8	1	01	03	02	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	03	02	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	03	02	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	01	03	02	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	03	02	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	02	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	03	02	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	01	03	02	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	03	02	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	03	02	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	03	02	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	01	03	02	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	03	02	0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
8	1	01	03	02	0032	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
8	1	01	03	02	0033	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	07		Beban Honorarium
8	1	01	03	07	0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
8	1	01	03	07	0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8	1	01	03	07	0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
8	1	01	03	08		Beban Jasa Pengelolaan BMD
8	1	01	03	08	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
8	1	01	03	08	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	01	03	09		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK
8	1	01	03	09	0001	Beban TPG PPPK
8	1	01	03	10		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK
8	1	01	03	10	0001	Beban TKG PPPK
8	1	01	03	11		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK
8	1	01	03	11	0001	Beban Tamsil Guru PPPK
8	1	01	03	12		Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
8	1	01	03	12	0001	Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah
8	1	01	08			Beban Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe
8	1	01	08	01		Beban Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0001	Beban Uang Representasi Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0002	Beban Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0003	Beban Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0004	Beban Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0006	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0007	Beban Jaminan Kematian Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0008	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0009	Beban Pembebanan PPh Wali Nanggroe
8	1	01	08	01	0010	Beban Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
8	1	01	08	02		Beban Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0001	Beban Uang Representasi Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0002	Beban Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0003	Beban Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	08	02	0004	Beban Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0006	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0007	Beban Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0008	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0009	Beban Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
8	1	01	08	02	0010	Beban Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
8	1	01	08	03		Beban Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0001	Beban Uang Representasi Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0002	Beban Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0003	Beban Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0004	Beban Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0006	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0007	Beban Jaminan Kematian Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0008	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0009	Beban Pembebanan PPh Majelis Tinggi
8	1	01	08	03	0010	Beban Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
8	1	01	08	04		Beban Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0001	Beban Uang Representasi Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0002	Beban Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0003	Beban Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0004	Beban Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0006	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0007	Beban Jaminan Kematian Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0008	Beban Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0009	Beban Pembebanan PPh Majelis Fungsional
8	1	01	08	04	0010	Beban Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	0054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	07	04	15	0055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	07	04	15	0056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	07	04	15	0057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	07	04	15	0058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	07	04	15	0059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	07	04	15	0060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	07	04	15	0061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	07	04	15	0063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	04	15	0064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	07	04	15	0065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	07	04	15	0066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	04	15	0067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	04	15	0068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
8	1	07	04	15	0069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	07	04	15	0070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	07	04	15	0071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	07	04	15	0072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
8	1	07	04	15	0073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	07	04	15	0074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	07	04	15	0076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	07	04	15	0077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	07	04	15	0078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
8	1	07	04	15	0079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	07	04	15	0080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	07	04	15	0081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	07	04	15	0082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	07	04	15	0083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	07	04	15	0084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	07	04	15	0085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
8	1	07	04	15	0086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	07	04	15	0088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	07	04	15	0089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	07	04	15	0090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	07	04	15	0091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	07	04	15	0092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	07	04	15	0093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	07	04	15	0095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	07	04	15	0096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	07	04	15	0097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	07	04	15	0098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
8	1	07	04	15	0100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
8	1	07	04	15	0102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
8	1	07	04	15	0103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
8	1	07	04	15	0104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
8	1	07	04	15	0105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
8	1	07	04	15	0106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	07	04	15	0107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
8	1	07	04	15	0108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8	1	07	04	15	0109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
8	1	07	04	15	0110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
8	1	07	04	15	0111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	07	04	15	3080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Keluarga Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Jabatan Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Transportasi Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nanggroe

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kecelakaan Kerja Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Jaminan Kematian Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Tunjangan Pakaian Dinas Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembebanan PPh Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Pembulatan Gaji Wali Nanggroe
8	1	07	04	15	3090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Uang Representasi Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Keluarga Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Jabatan Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Transportasi Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Iuran Jaminan Kesehatan Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kecelakaan Kerja Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Jaminan Kematian Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Tunjangan Pakaian Dinas Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembebanan PPh Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Waliyul Ahdi-Pembulatan Gaji Waliyul Ahdi
8	1	07	04	15	3100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Uang Representasi Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Keluarga Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Jabatan Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Transportasi Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Jaminan Kematian Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembebanan PPh Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi-Pembulatan Gaji Majelis Tinggi
8	1	07	04	15	3110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Uang Representasi Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Keluarga Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Jabatan Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Transportasi Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kecelakaan Kerja Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Jaminan Kematian Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Tunjangan Pakaian Dinas Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembebanan PPh Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-Gaji dan Tunjangan Majelis Fungsional-Pembulatan Gaji Majelis Fungsional
8	1	07	04	15	3125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK
8	1	07	04	15	3126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK-TKG PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK
8	1	07	05	01		Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan
8	1	07	05	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
8	1	07	05	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
8	1	07	05	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
8	1	07	05	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
8	1	07	05	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
8	1	07	05	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
8	1	07	05	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
8	1	07	05	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
8	1	07	05	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
8	1	07	05	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
8	1	07	05	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
8	1	07	05	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
8	1	07	05	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
8	1	07	05	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
8	1	07	05	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
8	1	07	05	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	07	05	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
8	1	07	05	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
8	1	07	05	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
8	1	07	05	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
8	1	07	05	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
8	1	07	05	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
8	1	07	05	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
8	1	07	05	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
8	1	07	05	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
8	1	07	05	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
8	1	07	05	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
8	1	07	05	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
8	1	07	05	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
8	1	07	05	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
8	1	07	05	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
8	1	07	05	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
8	1	07	05	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
8	1	07	05	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
8	1	07	05	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
8	1	07	05	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
8	1	07	05	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
8	1	07	05	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
8	1	07	05	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
8	1	07	05	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
8	1	07	05	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
8	1	07	05	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
8	1	07	05	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
8	1	07	05	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
8	1	07	05	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
8	1	07	05	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
8	1	07	05	01	0050	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
8	1	07	05	01	0051	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
8	1	07	05	01	0052	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
8	1	07	05	01	0053	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
8	1	07	05	01	0054	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
8	1	07	05	01	0055	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
8	1	07	05	01	0056	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
8	1	07	05	01	0057	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
8	1	07	05	01	0058	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0059	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0060	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0061	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
8	1	07	05	01	0062	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
8	1	07	05	01	0063	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
8	1	07	05	01	0064	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
8	1	07	05	01	0065	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
8	1	07	05	01	0066	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
8	1	07	05	01	0067	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
8	1	07	05	01	0068	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
8	1	07	05	01	0069	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
8	1	07	05	01	0070	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
8	1	07	05	01	0071	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
8	1	07	05	01	0072	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
8	1	07	05	01	0073	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
8	1	07	05	01	0074	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
8	1	07	05	01	0075	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
8	1	07	05	01	0076	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
8	1	07	05	01	0077	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
8	1	07	05	01	0078	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
8	1	07	05	01	0079	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
8	1	07	05	01	0080	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
8	1	07	05	01	0081	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
8	1	07	05	01	0082	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
8	1	07	05	01	0083	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
8	1	07	05	01	0084	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
8	1	07	05	01	0085	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0086	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	07	05	01	0087	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	07	05	01	0088	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8	1	07	05	01	0089	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
8	1	07	05	01	0090	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
8	1	07	05	01	0091	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
8	1	07	05	01	0092	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
8	1	07	05	01	0093	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
8	1	07	05	01	0094	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
8	1	07	05	01	0095	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
8	1	07	05	01	0096	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
8	1	07	05	01	0097	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
8	1	07	05	01	0098	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
8	1	07	05	01	0099	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
8	1	07	05	01	0100	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
8	1	07	05	01	0101	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
8	1	07	05	01	0102	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKB-KB
8	1	07	05	01	0103	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
8	1	07	05	01	0104	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	1	07	05	01	0105	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
8	1	07	05	01	0106	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-PK2UMK
8	1	07	05	01	0107	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
8	1	07	05	01	0108	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
8	1	07	05	01	0109	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
8	1	07	05	01	0110	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
8	1	07	05	01	0111	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
8	1	07	05	01	0112	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
8	1	07	05	01	0113	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
8	1	07	05	01	0114	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
8	1	07	05	01	0115	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
8	1	07	05	01	0116	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
8	1	07	05	01	0117	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1	07	05	01	0118	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
8	1	07	05	01	0119	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
8	1	07	05	01	0120	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
8	1	07	05	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Insentif Fiskal

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001